

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

GAWAT-DARURAT EKONOMI INDONESIA

Analisis dan
Nasihat HT
untuk Taliban

Pantang
Mundur
Memenangkan
Islam

Dr. Arim Nasim:

**SEGERA TERAPKAN
EKONOMI ISLAM!**



Perjalanan Sultan Reşad Ke Balkan. Kisah Kunjungan Ke Abdulhamid Han Di Pengasingan

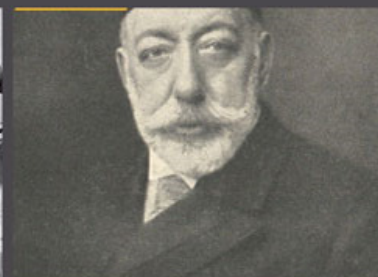
Sultan Mehmed Reşad naik tahta setelah Abdulhamid II. Efek dari Perang terjadi kebingungan di Balkan berlanjut karena konsekuensi dari deklarasi Monarki Konstitusional Kedua dan kegagalan Komite Persatuan dan Kemajuan untuk menetapkan kebijakan yang tepat mengenai administrasi. Oleh karena itu, dirasa tepat bagi Sultan Reşad untuk berwisata di wilayah geografi ini. Selama dalam pengasingan di Tesalonika, Abdulhamid II juga dikunjungi. Abdulhamid II kemudian berkata kepada kerabatnya tentang perjalanan ini: "Semoga Allah merahmati saudaraku. Mereka memainkan pria itu seperti anak kecil. Orang-orang seperti itu terus menyeretnya dari satu tempat ke tempat lain."

Sumber:

<https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/sultan-resadin-balkanlar-gezisi-surgundeki-abdulhamid-hana-ziyaretin-hikayesi/>



Untuk menjalani kehidupan di bawah pengawasan, dua Sultan sebelum Abdulhamid; yaitu, pencopotan Sultan Abdulaziz dan Murad V. Abdülhamid II prihatin dengan alasan ini dan melarang Mehmed Reşad untuk bertemu dengan siapa pun selain kerabatnya sendiri di istana. Kehidupan yang tertutup dan menakutkan ini sangat mempengaruhinya. Faktanya, kenaikan takhta Sultan Reşad memiliki hasil yang serupa dengan sultan-sultan sebelumnya. Setelah Insiden 31 Maret, majelis, yang mayoritas terdiri dari Komite Persatuan dan Kemajuan. Mereka mencopot Sultan Abdulhamid II dan memutuskan bahwa pewaris Mehmed Reşad Efendi naik takhta. Sultan Reşad naik tahta pada 27 April 1909 dan bersumpah akan melindungi syariat, Kanun Asasi, sistem ketatanegaraan, hak-hak bangsa dan kepentingan tanah air. Setelah upacara baiat, beliau menyatakan bahwa segala keinginan dan keinginannya adalah kesejahteraan dan kebahagiaan negara dan bangsa. Meskipun dia naik tahta dengan gelar Mehmed Kelima, dia dipanggil Sultan Reşad oleh orang-orang.



9 tahun pemerintahan Sultan Reşad, yang berusia 65 tahun ketika menjadi sultan, berlalu dengan depresi berat. Pada periode ini, terjadi 10 kali pergantian pemerintahan, masing-masing pemerintahan menjabat dalam krisis dan meninggalkan kekuasaan akibat krisis baru. Sultan Mehmed Reşad tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman politik untuk mencegah atau mengarahkan krisis ini. Juga, menurut konstitusi, kepala cabang eksekutif adalah wazir agung. Meskipun Sultan memiliki kekuasaan untuk mengangkat wazir agung, ia tidak memiliki tanggung jawab eksekutif. Karena itu, peran politik Sultan Utsmaniyah melemah dan istana tidak lagi menjadi fokus kehidupan politik. Mahmud evket Pasha, komandan Pasukan Gerakan, yang mengendalikan Istanbul setelah insiden 31 Maret, adalah mantan Sultan selama upacara baiat. Dia telah mengasingkan Sultan Abdülhamid II ke Tesalonika. Baik Sultan maupun wazir agung tidak tahu bahwa Abdulhamid akan diasingkan



Sultan Mehmed V Reşad menjabat sebagai Sultan ke-35 dan Khalifah Islam ke-114 dari Kekhalifahan Ottoman antara tahun 1909-1918. Lahir pada 2 November 1844 di Istana rağan, ayah Reşad adalah Sultan Abdülmecid dan ibunya adalah Gülcermal Kadinefendi. Mehmed Reşad, yang dibesarkan menurut tradisi istana, belajar bahasa Arab, Persia, dan beberapa pengetahuan agama. Dengan akses Abdülhamid II ke takhta pada tahun 1876, Mehmed Reşad menjadi putra mahkota dan tinggal di bawah pengawasan di istana.



Setelah Monarki Konstitusional Kedua dideklarasikan pada tahun 1908, kerusuhan dimulai di negara itu dan situasi ini berlanjut pada masa pemerintahan Sultan Reşad. Sumber utamanya adalah perbedaan pendapat di antara berbagai elemen Utsmaniyah tentang masalah yang diatur oleh konstitusi. Bahkan, situasi ini memicu kerusuhan di berbagai pelosok tanah air. Sultan Reşad, yang ingin berbicara dengan publik dan mengenal negaranya lebih dekat, sering melakukan perjalanan di Istanbul. Sultan Mehmed Reşad, yang mengunjungi Bursa dan Izmit bersama Wazir Agung dan beberapa menteri, bertemu dengan berbagai segmen masyarakat tanpa memandang agama dan ras.

Daftar Isi

Hiwar: Segera Terapkan Ekonomi Islam!

43

Baru-baru ini Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%. Angka yang cukup tinggi. Namun anehnya, di lapangan yang terjadi sebaliknya. Ekonomi masyarakat terpuruk. Banyak PHK dan pengangguran. Daya beli turun drastis. Penanganan pandemi sangat buruk. Pemerintah pun masih terus menambah utang baru. Bagaimana menjelaskan kontradiksi ini?

Nafsiyah: Pantang Mundur Memenangkan Islam

56

Allah SWT mengutus Rasul-Nya dengan membawa Islam untuk dimenangkan atas semua agama yang ada. Rasulullah saw. pun menegaskan bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi Islam. Jelas, semua ini merupakan jaminan pasti dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena itu tentu tidak pantas jika para pengemban dan pejuang Islam mundur ke belakang saat ada sejumlah tantangan dalam perjuangan memenangkan Islam.

Siyasah Dakwah: Analisis dan Nasihat HT untuk Taliban

23

Jauh-jauh hari, sebelum kemenangan Taliban yang kembali sukses memimpin Afganistan, Hizbut Tahrir (HT) telah menyampaikan 2 nasihat kepada Taliban. *Pertama*, agar Taliban memutuskan sama sekali negosiasi apapun dengan AS dan sekutu-sekutunya, termasuk dengan antek-anteknya, *Kedua*, agar Taliban fokus pada penegakkan Khilafah *á la minhaj an-nubuwwah* tanpa terjebak pada skenario musuh-musuh Islam.

<i>Pengantar</i>	2	<i>Lintas Dunia</i>	42
<i>Dari Redaksi:</i> Pelajaran Politik Dari Afganistan ..	3	<i>Hiwar:</i> Dr. Arim Nasim: Segera Terapkan Ekonomi Islam!	43
<i>Opini</i>	5	<i>Iqtishadiyah:</i> Benarkah Indonesia Tidak Punya Ulang?	48
<i>Muhasabah:</i> Waspada! Fitnah!	7	<i>Tafsir:</i> Sifat Manusia Penghuni Neraka	52
<i>Fokus:</i> Gawat Darurat Ekonomi Indonesia	9	<i>Nafsiyyah:</i> Pantang Mundur Memenangkan Islam	56
<i>Analisis:</i> Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan	14	<i>Nisa:</i> Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bukan Jalan Kemuliaan	59
<i>Afkar:</i> Hanya Dengan Khilafah Mimpi Buruk Kaum Muslim Dapat Diakhiri	19	<i>Ibrah:</i> <i>Muhasabah</i> Diri	62
<i>Siyasah Dakwah:</i> Analisis Dan Nasihat Hizbut Tahrir Untuk Taliban	23	<i>Hadis Pilihan:</i> Kebolehan Kontrak Kerja	64
<i>Telaah Kitab:</i> <i>Hima</i> Oleh Negara Atas Area Milik Umum (Telaah Kitab Pasal 141 <i>Muqaddimah al-Dustur</i>)	26	<i>Soal Jawab:</i> Bagaimana status " <i>Imarat Islamiyyah</i> " yang diusung Taliban?	66
<i>Catatan Dakwah:</i> Tekad	30	<i>Takrifat:</i> <i>Mafhûm al-Mukhâlafah - Mafhûm al- Ghâyah</i>	69
<i>Fikih:</i> Bermuamalah Dengan Bank Syariah	33	<i>Dunia Islam:</i> Amerika Memimpin Kemunduran Barat, Umat Islam Harus Memanfaatkan Kesempatan Ini (2 - habis)	73
<i>Baiti Jannati:</i> Mendidik Anak Mengelola Keuangan	37	<i>Tarikh:</i> Jejak Khilafah Di Tatar Sunda (2)	78
<i>Atsar</i>	40		

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pengantar

Pembaca yang budiman, ekonomi Indonesia jelas tidak sedang baik-baik saja. Apalagi sejak bencana pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir dua tahun. Indikasinya pun terang-benderang. Banyak perusahaan gulung tikar. Banyak kegiatan usaha lainnya, termasuk UMKM, tutup. Pengangguran dan PHK besar-besaran. Daya beli masyarakat turun drastis. Kemiskinan naik. Kesenjangan ekonomi dan sosial makin tinggi. Utang Pemerintah makin membengkak. Penanganan bencana pandemi Covid-19 juga mengalami kegagalan.

Namun anehnya, tiba-tiba beberapa waktu lalu Pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi naik 7,07%. Pemerintah lalu mengklaim ekonomi Indonesia baik-baik saja. Padahal jelas, di lapangan ekonomi masyarakat menengah ke bawah berdarah-darah. Hanya ekonomi segelintir orang-orang kaya, terutama para pengusaha yang dekat dengan kekuasaan atau diuntungkan dengan kebijakan penguasa, yang meningkat tajam.

Lalu mengapa bisa terjadi kontradiksi antara klaim pertumbuhan ekonomi yang “tinggi” dan realitas di lapangan? Jawabannya: *Pertama*, angka pertumbuhan ini sebetulnya rendah jika kita bandingkan dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama setelah setahun sebelumnya mengalami kontraksi yang lebih dalam. Kita bandingkan, misalnya, dengan Cina yang bisa tumbuh sebesar 18,3%, Singapura 14%, Amerika 12,2% dan Eropa 13,2%. *Kedua*, pertumbuhan PDB pada Triwulan II-2021 ini menunjukkan pertumbuhan yang semu. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II tahun 2021 sebesar 7,07% itu menggunakan dasar Triwulan II Tahun 2020 atau *year on year (yoy)* terhadap Triwulan 2 tahun 2020. Kita ketahui angka pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar – 5,3%. Jadi, pertumbuhan ini tinggi karena dasar pembandingnya, yaitu Kuartal 2 tahun 2020, sangat rendah atau *low base effect* (dasar perhitungan rendah).

Pertanyaannya: Lalu dimana akar persoalannya? Bagaimana pula cara Islam mengatasi kondisi ekonomi yang terpuruk seperti saat ini?

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam **Alamat :** Gedung
Graha Mampang Lt-1 -
Suite 101. Jl.
Mampang Prapatan
Raya Kav. 100, Jakarta
Selatan
e-mail: redaksialwaie
@gmail.com **Pemimpin**
Umum: M. Anwari.
Pemimpin Perusahaan
dan Keuangan: M.
Anwari **Pemimpin**
Redaksi: Ibnu Faruq.
Redaktur Pelaksana:
M. Arief Billah.
Redaktur: Abu Umam,
Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 10.000,- (P.
Jawa) dan Rp.
14.000,- (Luar P.
Jawa).

PELAJARAN POLITIK DARI AFGHANISTAN

Setelah 20 tahun menduduki Afghanistan, akhirnya Amerika menarik pasukan militernya dari bumi jihad ini. Tidak lama setelah pengumuman Biden memastikan mundurnya militer Amerika, Taliban mulai menguasai kota-kota penting di Afghanistan, termasuk ibukota Kabul. Presiden Asraf Gani dilaporkan kabur ke luar negeri meninggalkan rakyatnya.

Apa yang terjadi di Afghanistan memberikan pelajaran politik penting bagi siapapun. *Pertama*: betapa rapuhnya penguasa boneka yang didukung Barat. Larinya Asraf Gani, jatuhnya Husni Mubarak dan Zainal Abidin bin Ali dalam Arab Spring, menunjukkan para penguasa negeri Islam sesungguhnya bisa bertahan karena didukung oleh Barat.

Di sisi lain, betapa mudahnya Barat menyingkirkan agen-agen mereka yang tidak lagi dianggap berguna. Padahal selama ini mereka telah melayani dengan sepenuh hati kepentingan-kepentingan Barat. Padahal mereka selama ini telah berkhianat kepada rakyatnya sendiri, korup bahkan menumpahkan darah rakyatnya sendiri. Semua ini tidak ada artinya bagi Barat. Mereka dicampakkan bagaikan sampah yang tak berguna lagi. Ini menjadi peringatan para rezim diktator yang merasa hebat dengan kekuasaannya. Semuanya ada batasnya.

Kedua: Kembali membuktikan anggapan bahwa militer Amerika sebagai negara adidaya

tidak bisa dikalahkan adalah mitos. Mundurnya Amerika jelas adalah kekalahan militer mereka, seperti yang terjadi di Vietnam maupun Irak. Persenjataan canggih, dana yang besar, ternyata tidak bisa mengalahkan para pejuang yang tulus ikhlas membela negaranya, mengusir penjajah. Kekuatan melawan penjajahan ini semakin dahsyat karena didasarkan pada kewajiban syariah Islam. Allah SWT telah mewajibkan jihad fi sabilillah untuk mengusir penjajah dari negeri Islam. Inilah yang menjadi kekuatan utama pejuang Taliban, mujahidin Irak, Suriah dan Palestina, yang tidak pernah benar-benar bisa dikalahkan bahkan oleh negara adidaya sekalipun.

Hal ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi para penguasa negeri Islam yang tunduk kepada Amerika karena takut dengan kekuatan militer Amerika. Pelajaran bagi para penguasa Arab termasuk Iran, Turki, Pakistan, Malaysia dan Indonesia, yang tidak mengirimkan pasukan militernya untuk membebaskan Palestina. Padahal para penguasa negeri-negeri Islam ini memiliki pasukan militer terlatih dan unggul, serta persenjataan berat yang canggih. Tentu semua itu jauh dari persenjataan mujahidin Taliban dan Palestina. Namun, karena pengkhianatan mereka terhadap umat Islam dan pelayanan mereka terhadap negara-negara imperialis membuat mereka menjadi penguasa pengecut. Mereka membangun opini seolah Amerika



adalah negara yang tidak bisa dikalahkan.

Islam dan ajaran jihad fi sabilillah inilah yang membuat mujahidin Afghanistan rela berkorban, bersabar hingga meraih kemenangan. Ajaran Islam inilah yang membuat Bumi Afghanistan tidak bisa ditaklukkan oleh tiga negara besar dunia: Inggris, Soviet dan Amerika Serikat.

Karena itu sungguh sangat membahayakan kalau ada di negeri ini yang berupaya untuk mengkriminalkan ajaran syariah Islam, mengkriminalkan kewajiban jihad fi sabilillah dan khilafah. Padahal semua itu merupakan ajaran Islam yang menjadi kunci kekuatan melawan penjajahan. Bisa diduga mereka yang berupaya menjauhkan negeri ini dan penduduknya yang mayoritas Muslim dari syariah Islam adalah antek-antek penjajah yang tetap menginginkan negeri ini dijajah dalam berbagai bentuk.

Namun, perlu kita ingat, Amerika adalah negara penjajah dengan segala kejahatan dan kelicikannya. Tentu Amerika tidak akan membiarkan Afghanistan dan negeri-negeri lain lepas begitu saja dari cengkeraman mereka. Apalagi Afghanistan adalah kawasan yang sangat penting secara geo-politik dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Karena itu umat Islam di Afghanistan termasuk Taliban yang sedang berkuasa sekarang harus mewaspadai akal bulus Amerika. Sebabnya, apa yang dilakukan Amerika saat ini merupakan exit strategi agar mereka bisa keluar dari Bumi Afghanistan tanpa kehilangan muka. Namun, mereka akan tetap berupaya mempertahankan penjajahan mereka dalam bentuk lain.

Inilah yang diperingatkan oleh Amir Hizbut Tahrir dalam *Soal-Jawab*-nya terkait Afghanistan. Taliban harus menghentikan segala bentuk negosiasi dan kompromi dengan Amerika. Ini cara Amerika untuk tetap mempertahankan penjajahannya dalam bentuk lain. Peringatan Amir Hizbut Tahrir sangat penting diperhatikan dan menjadi catatan penting buat umat Islam

di Afghanistan, terutama Taliban, “Kelanjutan negosiasi (sesungguhnya) tidak mengarah pada pencabutan Amerika dari Afghanistan, tetapi lebih untuk menipu. Jadi, Amerika keluar melalui pintu depan dan masuk kembali melalui pintu belakang yang dijaga oleh para agen dan pengikut di Pakistan, Turki dan Iran serta mereka yang berputar bersama mereka di antara alat-alat Amerika di Afghanistan sendiri. Kemudian mereka memainkan peran utama dalam mempertahankan pengaruh Amerika di Afghanistan.”

Sesungguhnya inilah kesempatan emas bagi Taliban dan rakyat Afganistan untuk menyatukan umat Islam seluruh dunia. Kesempatan emas ini bisa menjadi momentum kebangkitan Islam kalau didasarkan pada dua hal. *Pertama*, kembali pada Islam secara *kaffah*. *Kedua*, mengikis habis intervensi negara-negara imperialis baik langsung atau tidak langsung; baik personal, kelompok, maupun sistem. Inilah harapan kita.

Sebagai kelompok yang dikenal selama ini menyatakan berpegang teguh pada al-Quran dan as-Sunnah, seharusnya Taliban benar-benar menerapkan syariah Islam yang totalitas dan *kaffah*. Bicara penegakan Islam *kaffah*, salah satu kunci pentingnya adalah sistem pemerintahan, sedangkan kalau bicara penegakan *syariah* Islam secara totalitas adalah khilafah.

Kita berharap Taliban menegakkan Khilafah yang sebelumnya ditolak. Membatasi menerapkan Ijarah Islam yang berdasarkan *nation state* (negara-bangsa) akan sulit berhadapan dengan kekuatan global Amerika Serikat. Taliban tidak bisa sendirian menghadapi kekuatan negara imperialis itu. Umat Islam harus memiliki kekuatan global. Hal ini tidak terwujud, kecuali umat Islam kembali menegakkan khilafah. Khilafahlah yang akan menyatukan negeri-negeri Islam. Inilah kunci jika kita berharap kemenangan Taliban akan menjadi kemenangan Islam. *Allahu Akbar!* [Farid Wadji]

Opini

Pembaca

Standar Sesat dan Tidak Sesat

Suardi Basri
(HRC)



ernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjadi sasaran kecaman publik perihal ucapan Selamat

Hari Raya Naw-Ruz 178 EB kepada pemeluk agama Baha'i. Mengapa? Karena Bahai tergolong ajaran sesat.

Soal status kesesatan aliran atau ajaran memang, siapapun tidak boleh serampangan menuding suatu kelompok sesat. Perlu didudukan makna sesat (*dhala*) itu sendiri. Suatu paham dikatakan sesat jika bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum syariah yang *qath'i*.

Suatu paham yang menyimpang dari rukun iman, rukun Islam dan atau tidak mengimani kandungan al-Quran dapat dikategorikan sesat. Apalagi syahadatnya bukan syahadat Islam. Dilihat dari sudut ini, ajaran Baha'i dengan keyakinannya dapat digolongkan kelompok sesat karena keluar dari akidah Islam.

Pengakuan suatu kelompok atas seseorang sebagai rasul yang diutus dengan suatu syahadat adalah suatu bentuk kemungkaran yang merusak kesucian akidah Islam yang hanya mengakui Nabi Muhammad saw. sebagai nabi dan rasul terakhir. Hal ini bisa dibaca dalam QS al-Ahzab [33]: 40). Imam ath-Thabari menafsirkan ayat tersebut antara lain dengan menyatakan, "Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi (*khâtam an-nabiyyîn*). Beliau adalah penutup kenabian (*nubuwwah*) sekaligus orang yang diberi cap kenabian. Atas dasar itu, kenabian (*nubuwwah*) tidak akan dibukakan kepada seorang pun setelah beliau hingga Hari Kiamat." (Ath-Thabari, *Tafsîr ath-Thabari*, XX/278).

Imam Ibnu Katsir pun menyatakan, "Ayat ini merupakan nash yang menunjukkan tidak adanya nabi setelah Nabi Muhammad saw. Jika tidak ada nabi setelah Beliau, apalagi seorang rasul. Sebab, kedudukan risalah (kerasulan) lebih khusus daripada kedudukan nuwuh (kenabian). Pasaunya, setiap rasul adalah nabi, dan tidak sebaliknya. Oleh karena itu, masalah ini telah disebutkan oleh hadis-hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh mayoritas Sahabat dari Nabi saw... Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. pernah bersabda, '[Sungguhny, risalah dan nuwuh telah terputus. Tidak akan ada rasul dan nabi setelahku.]' (HR Ahmad) (Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibn Katsîr*, QS al-Ahzab [33]: 40).

Pengakuan tentang nabi/rasul setelah Muhammad saw. ini pun menikam hadis-hadis

Rasulullah saw., antara lain sabda beliau, *“Dulu Bani Israil diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sungguh tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah, yang berjumlah banyak.”* (HR al-Bukhari).

Hadis-hadis dengan redaksi dan pengertian senada juga diriwayatkan oleh para imam hadis yang lain. Semuanya menggambarkan bahwa Muhammad saw. adalah nabi dan rasul terakhir. Sesudah beliau, umat dipimpin bukan oleh nabi atau rasul, melainkan para khalifah yang menerapkan Islam yang dibawa Rasulullah saw. *Wallahu a'lam.* □

Penyakit Akut Politisi Demokrasi

Ainul Mizan
(Peneliti
LANSKAP)



Baliho-baliho bernuansa politik mulai terlihat di ruang-ruang publik. Disebut bernuansa politik karena yang nampang adalah para politisi. Bahkan sebagian

ada yang membawa pesan ke arah Pilpres 2024.

Menanggapi maraknya baliho-baliho para politisi tersebut, pengamat politik komunikasi massa dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menegaskan bahwa tidak tepat di tengah sulitnya masyarakat saat pandemi, para politisi berlomba memasang baliho. Tentu arahnya untuk naiknya elektabilitas di Pilpres 2024. Mestinya mereka peka. Membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi. Bahkan Hendri Satrio menyayangkan dengan berkata, “Mereka itu orang pintar, masak harus diberitahu”.

Senada dengan itu, Dosen Komunikasi Politik, Putri Hergianasari juga menyayangkan sikap para politisi demikian.

Jika kita menengok kondisi pandemi di Indonesia yang berlangsung sejak Maret 2020. Pilkada serentak 2020 tetap saja diselenggarakan. Banyak pihak yang sudah mengingatkan untuk tidak ditiadakan. Mengingat Pilkada tersebut menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Tidak tanggung-tanggung, biaya Pilkada serentak 2020 membengkak hingga Rp 20,49 Triliun. Mestinya biaya yang demikian besar bisa disalurkan negara untuk penanggulangan pandemi dan membantu meringankan kesulitan ekonomi rakyat.

Bahkan lebih miris lagi, dana bansos Covid pun dikorupsi. Demikianlah potret track record politisi dalam sistem demokrasi. Sistem Demokrasi telah melahirkan para politisi yang tidak peka dengan penderitaan rakyat. Mereka hanya sibuk mengurus kepentingan pribadi dan partai serta kelompoknya.

Berbeda dengan Islam. Sebab, politik dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Afkaru Siyasi*, didefinisikan sebagai: *Politik itu adalah mengurus urusan umat baik dalam negeri maupun di luar negeri. Yang mengurus adalah negara dan umat. Adapun negara adalah pihak yang mengurus secara langsung. Adapun umat itu pihak yang melakukan koreksi pada negara.*

Jadi politisi dalam Islam bukanlah sosok yang egois, tidak empati dengan urusan rakyat dan mempunyai ambisi kekuasaan. Tatkala seorang politisi tersebut kebetulan berkuasa, maka mereka menjadi sosok yang tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan kemaslahatan rakyatnya.

Rasulullah saw. bersabda mengenai sosok pemimpin dan tugasnya, *“Pemimpin atas manusia itu adalah pengurus rakyat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”* (HR Muslim).

Paradigma Islam tentang politik dan politisi semacam ini hanya bisa diwujudkan dalam sistem kehidupan yang berasaskan akidah Islam dan menerapkan Islam secara paripurna. □



WASPADAI FITNAH!

Muhammad Rahmat Kurnia

"Kok libur tahun baru Islam 1 Muharram diubah, ya?" tanya Pak Nardi. "*Kan* ada aturan dari Pemerintah. Katanya *sih* untuk menghindari dari kerumunan. Tanggal 1 Muharram jatuh pada hari Selasa bertepatan dengan 10 Agustus 2021. Takutnya, libur panjang dari Sabtu sampai Minggu, lalu Senin hari kejeput dan Selasa libur lagi."

Mas Anto menjelaskan. "Libur *mauludan* juga digeser ya? Itu *kan* hari Selasa juga?" tanya Pak Nardi.

"Iya, *kan* alasannya sama. Hari Selasa digeser menjadi hari Rabu untuk menghindari kerumunan," papar Mas Anto.

Perubahan ini memang tercantum dalam Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712, 1, dan 3 tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin mengatakan, "Tahun Baru Islam tetap 1 Muharram 1443 H, bertepatan 10 Agustus 2021 M. Hari libur yang digeser menjadi 11 Agustus 2021 M."

Pak Eman turut nimbrung, "Kalau menurut saya mah sebagai orang awam alasan itu *kayak* dibuat-buat. Hanya bersilat lidah *doang*. Tahun barunya tetap, *kok* libur yang digeser."

"Iya, apalagi sekarang *kan* sedang rame-ramenya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di seluruh Indonesia. Mana ada orang bepergian dan berkerumun," tambahna.

"Saya *sih* setuju dengan pendapat yang menyebutkan bahwa itu adalah uji coba terhadap sikap umat Islam. Istilahnya *test the water*. Kalau umat Islam diam saja maka mereka akan makin berani mengubah-ubah ajaran Islam," Mas Rendi turut meramalkan.

Saya hanya mengatakan bahwa kita perlu merenungkan apa yang dikatakan Eggi Sudjana. Pengacara kondang itu mengatakan, "Secara spiritual hari Selasa harusnya libur 1 Muharram 1443 tahun baru Islam karena dianggap kejeput digeser Rabu. Tanggal 17 Agustus hari Selasa tolong Jokowi geser hari libur," ungkap Bang Eggi (begitu saya biasa memanggilnya) dalam video yang beredar.

"Kalian jangan merasa lebih hebat dari Rasulullah, berani *nggak* kalian geser libur 17 Agustus 2021 yang jatuh pada hari Selasa menjadi hari Rabu juga," paparnya.

Tidak heran jika sebagian masyarakat mencurigai ada sesuatu di balik semua itu. Sebab, harus diakui ada pikiran-pikiran di tengah masyarakat yang berkeyakinan 'jangan hari libur, perintah Tuhan pun bisa dikesampingkan'.

"Terlepas setuju atau tidak, ya dimana pun negaralah yang mengambil kebijakan. Bahkan perintah Tuhan pun bisa kalah dengan kebijakan negara terkait penanganan Covid-19 ini," kata Gus Muwafiq seperti dikutip *Detik.com* (1/8/2021). Itu di antaranya.

"Shalat Idul Adha hanya bisa dilakukan di rumah. Tidak ada shalat Idul Adha di masjid atau di lapangan dalam masa PPKM Darurat

ini,” kata Menteri Agama Yaqut (16/7/2021).

Bahkan selama PPKM Level 4 dikeluarkan peraturan: “Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah”.

Seakan-akan semua itu menjadi bukti bahwa aturan-aturan agama, khususnya Islam, dapat diubah dan dikalahkan oleh aturan negara. Dengan kata lain, aturan Islam dapat dan layak dikesampingkan. Jika hal ini dijadikan pegangan maka jangan heran pada masa depan akan muncul ‘kelancangan’ terhadap ajaran Islam dan tak merasa perlu berpegang pada aturan Islam.

Saya menjadi teringat pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi pada Februari 2020 silam. “Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” ujarnya.

Sebelumnya, ia berbicara terkait dengan adanya *ijtima’* ulama. Dengan demikian, agama yang dimaksud adalah Islam. Dari sini terasa aroma permusuhan terhadap Islam. Belum lagi persetujuan antara pihak yang meyakini ‘ayat konstitusi di atas ayat suci’ dengan pihak yang meyakini ‘ayat suci (al-Quran) di atas ayat konstitusi’ terus berkecamuk. Pihak pertama lebih mencerminkan sekularisme, sementara pihak kedua lebih mencerminkan kalangan Islam. Pertarungan pemikiran itu tak berhenti. Begitu juga cap negatif radikal yang terus disematkan kepada umat Islam yang konsisten terikat dengan ajaran Islam makin mengokohkan hal tersebut. Apalagi sebutan kardun (kadal gurun) kepada aktivis Islam turut mengokohkan persetujuan itu.

Menengok realitas demikian, kebijakan-kebijakan yang dirasa menyakitkan dan

menomorduakan umat Islam itu dapat dipahami sebagai pembuktian bahwa yang sedang berkuasa adalah keyakinan ‘ayat konstitusi di atas ayat suci’. “Berarti benar *dong* ayat konstitusi itu berada di atas ayat suci?” tanya Romy.

Saya sampaikan, “Tidak. Sebab, kebenaran itu tolok ukurnya adalah aturan Allah SWT Sang Pencipta. Realitas itu tidak lebih sekadar menunjukkan bahwa yang tengah berkuasa adalah sekularisme”.

“Saya *mah* rada ngeri lihat kondisi kayak begini,” Pak Eman mengungkapkan rasa galanya. “Disebut tokoh Islam tapi hanya namanya doang,” tambahnya. “Anak muda yang senang mengamalkan agama Islam malah dicurigai,” tambahnya lagi.

“Iya, pada saat Menteri Agama Fachrul Razi itu terjadi,” sambung Pak Nardi. Seraya ia mengutip pernyataan Fachrul pada September 2020, “Cara masuk mereka gampang, kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak yang *good looking*, penguasaan bahasa Arabnya bagus, *hafizh*, mulai masuk, jadi imam, lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi pengurus mesjid, kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide seperti yang kita takutkan.”

“Kekhawatiran itu sesuatu yang wajar,” ungkap saya. “Kita perlu waspada terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw,” saya mengingatkan. Lalu saya sampaikan sabda Nabi saw., “*Hampir saja akan datang kepada manusia suatu zaman ketika Islam tidak tersisa kecuali namanya; tidak tersisa dari al-Quran kecuali tulisannya; masjid-masjid subur, namun jauh dari petunjuk; ulama-ulama mereka orang terburuk di bawah kolong langit; dari sisi mereka fitnah datang dan kepada mereka fitnah itu Kembali.*” (HR al-Baihaqi dalam kitab *Sya’b al-Iman*, 3/317).

Waspadai datangnya fitnah! *Wallahu a’lam*. []



GAWAT DARURAT EKONOMI INDONESIA

Pandemi Covid-19 tidak hanya memporak-porandakan sistem kesehatan Indonesia, namun juga membuat kondisi ekonominya semakin gawat. Hingga pertengahan Agustus, Indonesia menempati urutan ke-10 negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat pandemi Covid-19, dengan jumlah mendekati 114 ribu orang. Semua itu bersumber dari kebijakan Pemerintah yang amburadul dalam penanganan pandemi tersebut.

Kebijakan pembatasan sosial yang serba tanggung tanpa disertai dengan pemberian bantuan sosial secara cukup dan berkelanjutan selama masa pandemi menyebabkan jutaan penduduk terlunta-lunta hidupnya. Jumlah pengangguran meningkat tajam selama masa pandemi. Pada bulan Februari 2021, jumlah pekerja yang terdampak pandemi mencapai 19 juta orang, baik menganggur, mendapat pemotongan jam kerja, hingga sementara tidak bekerja.

Pengangguran yang meningkat tersebut berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin meningkat dari 26,4 juta orang pada Maret 2020 menjadi 27,5 juta orang pada Maret 2021. Angka tersebut belum termasuk penduduk menengah bawah yang pendapatannya sedikit di atas garis kemiskinan. Sebelum pandemi saja,

menurut data BPS, penduduk yang rentan dan hampir miskin mencapai 67 juta orang. Tragisnya, penduduk yang mengalami kesulitan ekonomi tersebut tidak mendapatkan bantuan yang memadai dari Pemerintah. Bantuan Pemerintah lewat Bansos tetap saja bermasalah, baik salah sasaran, cakupan penerima yang sangat kecil, nilai bantuan yang minim, dan intensitas yang hanya sekali dua kali selama pandemi. Karena itu banyak rumah tangga miskin yang sama sekali tak mendapatkan bansos meskipun hanya sebutir beras. Pada saat yang sama mereka dilarang untuk mencari nafkah oleh Pemerintah.

Dampak lain dari buruknya penanganan pandemi adalah keuangan negara yang semakin tidak sehat. Pada awal pandemi, di tengah penurunan pendapatan negara, Pemerintah mengambil kebijakan yang melebarkan defisit APBN hingga mencapai 6,1 persen terhadap PDB. Pada tahun 2021, setelah terbukti tidak mampu menyerap anggaran secara optimal, Pemerintah mengurangi defisit menjadi 5,7 persen. Kebijakan Pemerintah yang tidak matang mengakibatkan anggaran penanganan Covid-19, yang mencapai Rp 1.440 triliun dalam dua tahun ini tidak sebanding dengan manfaatnya. Pandemi masih sulit dikendalikan. Kesejahteraan masyarakat bawah kian memburuk. Pihak yang diuntungkan adalah

segelintir pejabat yang mengkorupsi anggaran jumbo tersebut.

Kebijakan fiskal tersebut telah menimbulkan goresan yang mendalam pada sejarah perekonomian nasional. Utang Pemerintah naik tajam lebih dari 1000 triliun rupiah, menjadi Rp 6.554 triliun per Juni 2021. Dampaknya, saat pendapatan negara merosot, belanja APBN untuk pembayaran utang naik menjadi Rp 373 triliun pada tahun 2021. Kondisi tersebut diperparah oleh keuangan sejumlah BUMN yang berdarah-darah. Tidak hanya menanggung utang yang sangat besar, tetapi juga mengalami kerugian besar pada tahun lalu. Jika kondisi mereka semakin buruk, mau tidak mau, Pemerintah terpaksa harus turun tangan untuk menyelamatkan mereka melalui suntikan Penanaman Modal Negara (PNM), menjual aset mereka, atau bahkan melego saham mereka kepada investor asing. Kedua langkah pertama telah dilakukan Pemerintah. Sejumlah BUMN Karya, yang sebelumnya dipaksa menggarap infrastruktur

yang jauh di bawah kemampuan finansial mereka, kini ramai-ramai menjual jalan tol yang mereka bangun kepada pihak asing.

Sementara itu, daya saing ekspor Indonesia di pasar global tak kunjung membaik. Neraca transaksi berjalan (*current account*) masih mengalami defisit sepanjang tahun 2020 hingga kuartal pertama 2021. Namun, defisit tahun lalu sedikit menipis lantaran impor menurun signifikan karena resesi ekonomi. Impor bahan baku, yang menyumbang sekitar 70 persen impor, turun tajam akibat industri pengolahan tumbuh negatif pada tahun 2020. Sepanjang paruh pertama tahun 2021 ekspor memang naik tajam sejalan dengan pulihnya permintaan negara-negara mitra dagang Indonesia, seperti Cina, AS, dan Uni Eropa. Namun, seperti biasanya, pendapatan ekspor masih mengandalkan komoditas mentah dan setengah jadi, seperti batubara, nikel dan produk-produk kelapa sawit, yang nilai tambahnya relatif rendah. Perdagangan jasa sebagaimana biasanya tetap mengalami defisit yang menganga.

Industri manufaktur, yang menjadi sokoguru ekonomi domestik di samping sektor pertanian, semakin terpuruk karena pandemi. Sektor ini memang mampu tumbuh 7 persen pada kuartal kedua 2021, terutama ditopang oleh industri farmasi yang mengalami lonjakan permintaan selama pandemi, serta industri logam dan turunannya yang naik tajam sejalan dengan meningkatnya investasi dari Cina di sektor pertambangan, khususnya nikel. Namun, secara umum keadaan sektor industri manufaktur memburuk. Beberapa sektor yang menjadi penyerap utama tenaga kerja, seperti industri tekstil, semakin rendah kontribusinya terhadap ekonomi karena tertekan oleh produk impor. Ketergantungan pada bahan baku impor semakin tinggi. Industri farmasi yang moncer itu, hampir 90 persen bahan bakunya diperoleh dari impor. Pada saat yang sama, liberalisasi

Utang Pemerintah naik tajam lebih dari 1000 triliun rupiah, menjadi Rp 6.554 triliun per Juni 2021. Dampaknya, saat pendapatan negara merosot, belanja APBN untuk pembayaran utang naik menjadi Rp 373 triliun pada tahun 2021. Kondisi tersebut diperparah oleh keuangan sejumlah BUMN yang berdarah-darah. Tidak hanya menanggung utang yang sangat besar, tetapi juga mengalami kerugian besar pada tahun lalu.

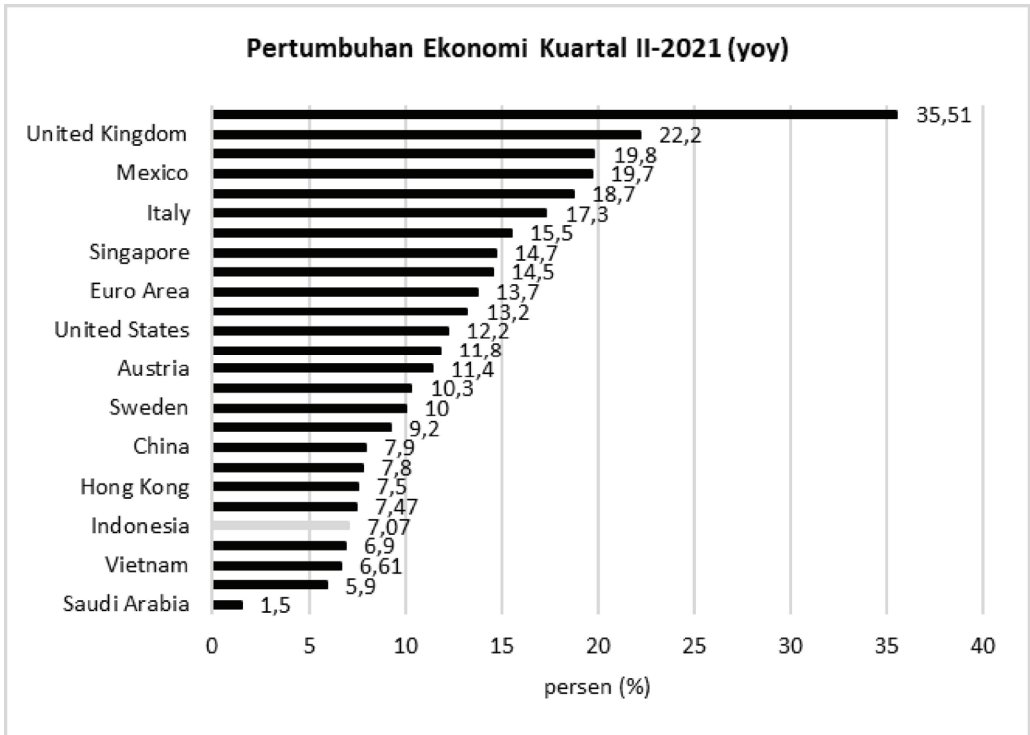
di sektor perdagangan menyebabkan produk-produk impor tumbuh pesat sehingga sektor industri manufaktur domestik semakin terjepit. Kemampuan mereka dalam menyerap tenaga kerja akhirnya menyusut. Ketergantungan terhadap barang-barang impor tersebut menyebabkan cadangan devisa Indonesia tak mengalami peningkatan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Per Juli 2021, cadangan devisa Indonesia hanya USD 137 miliar, jauh di bawah Cina yang mencapai USD 3,4 triliun. Padahal dalam sistem moneter saat ini, tanpa cadangan devisa yang besar, negara akan bergantung pada utang dan investasi asing untuk menjaga stabilitas rupiah dari serangan para spekulan di sektor keuangan.

Rapuh dan Berbahaya

Setelah mengalami kontraksi selama empat kuartal berturut-turut, ekonomi pada kuartal

kedua 2021 tumbuh sebesar 7 persen, dibandingkan tahun lalu. Pemerintah kemudian menganggap bahwa ekonomi Indonesia relatif kuat menghadapi pandemi. Klaim ini tentu tidak berdasar. Pasalnya, dasar perhitungan (*baseline*) 7 persen itu berasal dari -5 persen pada kuartal kedua tahun lalu.

Bahkan jika dibandingkan dengan ekonomi negara-negara lain yang tahun lalu mengalami kontraksi akibat pandemi, pertumbuhan mereka tahun ini jauh lebih signifikan dibandingkan Indonesia. Inggris misalnya, yang mengalami kontraksi pada kuartal pertama 2020, mampu tumbuh 22 persen pada periode yang sama tahun berikutnya. Berdasarkan data Trading Economics, dari 26 negara yang telah merilis pertumbuhan ekonominya pada kuartal kedua tahun 2021, nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di urutan ke-22. Vietnam yang berada di bawah Indonesia, sebenarnya



Sumber: Trading Economics

tidak dapat dijadikan pembandingan, sebab negara itu tidak pernah tumbuh negatif selama pandemi.

Secara alami pertumbuhan kuartal kedua tahun ini jelas lebih baik. Sebabnya, Pemerintah telah melonggarkan kegiatan ekonomi dibandingkan periode tahun lalu, yang dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Namun, kebijakan itu harus dibayar mahal dengan meroketnya kasus kematian akibat pandemi. Lalu apa yang bisa dibanggakan dengan pertumbuhan tersebut?

Lagi pula, jika ditelusuri lebih jauh, penyumbang pertumbuhan pada kuartal kedua adalah konsumsi swasta. Lalu hampir separuh, tepatnya 45 persen, konsumsi itu digerakkan oleh 20 persen kelompok menengah atas yang selama masa pembatasan sosial menahan konsumsi mereka.

Pemerintah juga selalu mengklaim bahwa melonjaknya utang selama masa pandemi ini, yang pada bulan Juni 2021 sudah mencapai Rp 6.554 triliun, masih sangat aman. Hal ini tentu tidak berdasar. Sebabnya, bagaimanapun stok utang tersebut memiliki konsekuensi berupa pembengkakan pembayaran bunga yang akan menyedot APBN dalam jumlah yang semakin besar. Selain itu, sebagian besar utang tersebut dalam bentuk surat berharga. Sebagian bunganya mengambang mengikuti suku bunga pasar. Sebagian lagi dalam mata uang asing. Berkaca pada pengalaman berbagai negara yang bergantung pada utang, ketika suku bunga meroket dan nilai tukar merosot tajam, pokok utang dan pembayaran bunganya meningkat tajam sehingga mereka harus meminta bantuan IMF untuk membayar utang mereka. Jika demikian, lagi-lagi yang dirugikan adalah rakyat yang selama ini membiayai Pemerintah lewat pajak.

Alasan bahwa rasio utang Pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Jepang, AS, dan negara-

negara Uni Eropa jelas tidak *compatible*. Peralannya, negara-negara tersebut merupakan negara maju yang memiliki kemampuan membayar yang tinggi. Jepang, misalnya, memiliki rasio utang sebesar 237 persen terhadap PDB-nya. Namun, sebagian besar kepemilikannya dimiliki investor domestik, terutama Bank of Japan. Selain dalam bentuk mata uang lokal, bunga obligasi di negara itu nyaris menyentuh nol persen sehingga tidak terlalu membebani Pemerintah. Lagi pula Jepang merupakan negara pemberi utang terbesar di dunia, dengan nilai lebih dari USD 3 triliun. Sebaliknya, di Indonesia, sebanyak 24 persen surat utang Pemerintah dimiliki oleh investor luar negeri. Sebagian surat utang tersebut dalam bentuk mata uang asing, plus tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN sehingga sangat berpotensi terpapar risiko pasar yang membuat beban pembayaran utang pemerintah semakin besar.

Celakanya lagi, semangat Pemerintah dalam berutang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membelanjakan utang tersebut secara efektif. Perolehan utang untuk menutupi defisit jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dibelanjakan. Akibatnya, utang yang tak terpakai, yang dikenal dengan istilah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) cukup besar, mencapai Rp 234,7 triliun. Padahal, pada saat yang sama, ribuan tenaga medis tidak mendapatkan insentif anggaran yang memadai. Rumah sakit-rumah sakit mengeluh lantaran utang Pemerintah kepada mereka belum dibayar. Jutaan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lebih dari itu, utang yang tidak terserap tersebut tetap harus dibayar bunganya.

Pemerintah juga mengklaim bahwa sepanjang tahun ini kurs rupiah relatif stabil sehingga perekonomian relatif aman. Memang, sepanjang semester pertama tahun ini, kurs

rupiah mengalami fluktuasi yang relatif rendah. Hal ini terjadi lantaran spekulasi di pasar modal relatif mereda selama pandemi. Tingkat suku bunga obligasi yang ditawarkan Pemerintah kepada investor masih cukup tinggi sehingga mereka berbondong-bondong menyerbu aset investasi tersebut.

Sementara itu, kemungkinan Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan selama pandemi ini sangat rendah, sehingga potensi pelarian modal ke AS, yang lazim terjadi ketika the Fed menaikkan suku bunga acuan, juga menurun. Dengan demikian, ketika situasi ekonomi di AS semakin solid, yang ditandai dengan kenaikan inflasi dan berkurangnya angka pengangguran, maka peluang the Fed menaik-turunkan suku bunga acuan semakin terbuka. Alhasil, rupiah akan mengalami gonjang-ganjing. Sebagai pengingat, pada akhir Maret tahun lalu, hampir sebulan ketika kasus baru diumumkan pemerintah, nilai tukar rupiah per dollar AS nyaris mencapai Rp 16.500, membuat pelaku ekonomi menjerit-jerit lantaran biaya impor dan nilai utang luar negeri mereka naik tajam.

Perubahan Fundamental

Struktur ekonomi Indonesia sebelum pandemi telah banyak dikritik lantaran sangat rapuh. Pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen sehingga penyerapan tenaga kerja relatif rendah. Padahal jumlah angkatan kerja semakin besar. Indonesia juga mengalami deindustrialisasi sehingga Indonesia semakin bergantung pada impor yang menyebabkan kemampuan negara ini memupuk devisa sangat rendah.

Pada saat yang sama, Pemerintah malah menyalakan APBN dengan belanja-belanja yang tidak efektif, seperti bansos yang pelaksanaannya amburadul dan nilai pembayaran bunga utang yang melampaui pos-pos belanja pemerintah pusat lainnya,

Struktur ekonomi Indonesia sebelum pandemi telah banyak dikritik lantaran sangat rapuh. Pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen sehingga penyerapan tenaga kerja relatif rendah. Padahal jumlah angkatan kerja semakin besar. Indonesia juga mengalami deindustrialisasi sehingga Indonesia semakin bergantung pada impor yang menyebabkan kemampuan negara ini memupuk devisa sangat rendah.

seperti subsidi dan bantuan sosial. Kondisi fiskal tersebut diperburuk dengan sistem moneter yang sangat rapuh terhadap guncangan eksternal. Akibatnya, dalam seketika Pemerintah dan pelaku ekonomi swasta bisa rugi ratusan triliun hanya karena rupiah yang tiba-tiba melemah oleh ulah spekulasi. Jika model ekonomi ini terus berjalan maka Indonesia akan semakin sulit untuk naik kelas menjadi negara maju dan mandiri.

Sistem ekonomi tersebut jelas tidak sehat dan membahayakan masa depan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, selain segera mengatasi pandemi secara efektif, agenda yang sangat fundamental dan esensial bagi seluruh elemen bangsa ini adalah merombak sistem ekonomi negara ini—sistem kapitalisme yang dibangun di atas fondasi sekularisme—yang menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami gawat darurat. Penggantinya apalagi jika bukan sistem yang berlandaskan Islam.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. [Muis]

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

Dr. Julian Sigit, M.E.Sy.

Ketua HILMI

Baru baru ini BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, yaitu sekitar 7,07. Padahal saat ini Indonesia masih dalam keadaan pandemik. Tentu sangat sulit ekonomi bisa tumbuh sebesar itu. Pertanyaannya: Betulkah pertumbuhan ekonomi itu bersifat riil atau hanya semu?

Tidak Selalu Mencerminkan Kondisi Riil

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah indikator efisien secara makro, yaitu nilai *output* nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Jadi salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah naik-turunnya besaran pendapatan nasional atau *Gross Domestic Product* (GDP). Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan pendekatan Produk Domestik Bruto (GDP) atas harga konstan.¹

Namun demikian, pencapaian pendapatan domestik bruto (PDB) yang tinggi selama ini, ternyata masih tak mampu mewujudkan berbagai fenomena penting bagi kualitas hidup rakyat. Tak heran jika saat sebagian kalangan bangga dengan prestasi pertumbuhan PDB yang kita capai, mayoritas rakyat justru kurang

merasakan ada perbaikan taraf kehidupannya.

Dalam waktu yang bersamaan kesenjangan penduduk miskin dan penduduk kaya di Indonesia tidak banyak berubah. Koefisien gini/rasio gini masih tetap tinggi. Dengan begitu, tidak sulit menggambarkan dengan jelas siapa yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, justru rata-rata gini rasio menunjukkan angka peningkatan. Ini berarti pencapaian pendapatan domestik bruto (PDB) yang tinggi selama ini ternyata masih tak mampu mewujudkan berbagai fenomena penting bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Tak heran jika saat sebagian kalangan bangga dengan prestasi pertumbuhan PDB yang kita capai, mayoritas rakyat justru kurang merasakan ada perbaikan taraf kehidupannya.

Selama pandemi Covid-19 memang ada kenaikan jumlah orang kaya. Data lembaga keuangan Credit Suisse, bertajuk “Global Wealth Databook 2021” menyebut jumlah orang kaya di Indonesia melonjak 61,69%. Seharusnya peningkatan jumlah orang kaya mampu mengurangi kuantitas masyarakat miskin. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah orang miskin semakin bertambah sejak pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah orang miskin per Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang, naik 1,12 juta

jika dibandingkan dengan akhir Maret 2020.

Dalam pandangan Islam, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek kualitas hidup masyarakat. Lebih jauh perlu adanya keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu ketimpangan, keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam.²

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan indikator PDB. Bukan indikator kesejahteraan masyarakat. Menurut Lorenzo Fioramonti, penggunaan PDB sebagai alat ukur kesejahteraan sangat berbahaya. Dia menjelaskan penggunaan PDB menghantarkan sebuah era kekayaan materi yang menumbuhkan ketimpangan, pengurasan sumberdaya alam dan naiknya keresahan sosial.³ Bahkan Richard Easterlin mengklaim bahwa setelah tingkat pendapatan tercapai, kebahagiaan yang dirasakan tidak meningkat dengan PDB.

Hal ini dapat dibuktikan melalui tingkat gini ratio Indonesia Pendapatan Indonesia hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Pencapaian pendapatan domestik bruto (PDB) yang tinggi selama ini ternyata masih tak mampu mewujudkan berbagai fenomena penting bagi kualitas hidup rakyat. Tak heran jika saat sebagian kalangan bangga dengan prestasi pertumbuhan PDB yang kita capai, mayoritas rakyat justru kurang merasakan ada perbaikan taraf kehidupannya.

Memotret Kondisi Riil Ekonomi

Dalam memotret ekonomi riil suatu negara terdapat beberapa indikator makro ekonomi yang bisa dijadikan rujukan. Indikator makro ekonomi tersebut di antaranya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gini rasio. Jika kesejahteraan masyarakat tinggi, artinya angka kemiskinan berkurang, maka angka pengangguran kecil dan setiap kebutuhan hidup masyarakatnya terpenuhi.

Dari aspek neraca perdagangan, harus dapat dipastikan bahwa neraca tersebut tidak negatif dan disuplai oleh faktor produksi yang memiliki nilai tambah lebih. Ekonomi yang baik adalah jika nilai ekspor jauh lebih tinggi dari nilai impor. Hal itu menunjukkan bahwa ekonomi negara tersebut sehat dan produktif. Hanya saja, nilai ekspor akan lebih baik jika ditopang dengan nilai tambah yang tinggi, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan berupa barang jadi.

Adapun indikator ketiga yang sering dijadikan ukuran makro ekonomi suatu negara adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan menyeluruh terkait transaksi ekonomi internasional suatu negara. Indikator makro ekonomi ini sangat penting karena mencerminkan kondisi faktual ekonomi suatu negara. Bukan hanya sebatas angka-angka statistika semata, seperti kesejahteraan yang tercermin dari kemiskinan dan dan pengangguran. Negara harus bisa mengupayakan itu semua bisa terjaga. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjadi penting.

Untuk kasus Indonesia saat ini, memang benar ada peningkatan terhadap neraca pembayaran. Hanya saja, apa dan siapa yang menyumbang pada neraca pembayaran tersebut? Jika hanya mengandalkan utang luar negeri, memang benar cadangan devisa akan naik. Hanya saja, jika cadangan devisa tersebut disandarkan pada mata uang yang lemah, maka akan sulit. Fakta terbaru, saat nilai tukar rupiah

terdepresiasi oleh dolar, maka praktis cadangan devisa menjadi berkurang.⁴ Selain itu banyaknya utang akan menggerus cadangan devisa.

Membangun Ekonomi yang Kuat dan Mensejahterakan

Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang disandarkan pada sektor riil. Indikasinya, jumlah uang dan produksi barang dan jasa mengalir secara sehat. Tidak ada yang namanya penggelembungan. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung berbasis pada non-riil. Sangat rentang terjadi fluktuasi dan krisis ekonomi. Hal itu wajar karena memang uang tidak beredar sebagaimana mestinya. Uang hanya beredar pada bisnis-bisnis non-riil yang tak tampak kasatmata. Bahkan sangat erat kaitannya dengan spekulasi. Wajar sistem ini sangat rawan terhadap krisis bahkan berteman dekat seolah menjadi siklus yang tak bisa dihindari.

Roy Davies dan Glyn Davies menguraikan sejarah kronologi secara komprehensif. Menurut mereka, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.⁵

Siklus krisis ekonomi yang terus berulang itu tentu menunjukkan sistem kapitalisme sejatinya adalah sistem rusak yang amat rawan karena berbasis ekonomi non-riil. Solusinya hanya ada pada sistem Islam dengan tumpuan sektor riilnya.

Bagaimana ekonomi Islam bisa menggerakkan sektor ekonomi. Negara akan melarang setiap transaksi non-riil yang berbasis riba dan spekulasi. Negara akan mendorong penciptaan ekonomi yang sehat dengan menggerakkan sektor riil. Negara, misalnya, membuka industri baik dalam bentuk barang dan jasa yang jelas tidak bertentangan dengan hukum syariah.

Negara juga mendorong UMKM dengan mengerakkan sektor pertanian dan industri lainnya yang mampu menyerap tenaga kerja banyak. Uang akan betul-betul berputar seiring dengan laju ekonomi yang ada dimasyarakat. Tidak ada yang namanya penimbunan, juga penumpukan uang pada segelintir orang, termasuk para spekulan. Pasalnya, negara akan berlaku tegas terhadap praktik-praktik curang dalam ekonomi yang akan merugikan masyarakat. Negara pun akan memastikan bahwa uang harus terdistribusi.

Negara harus memastikan bahwa uang beredar di masyarakat. Tak ada sendatan yang menghambat laju ekonomi barang dan jasa. Dengan itu distribusi harta bisa dimaksimalkan. Dengan itu pula ekonomi berjalan dengan baik. Masyarakat bisa memperoleh pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini menjadi faktor terpenting penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, masalah pengaturan distribusi kekayaan ini, menjadi kunci utama penyelesaian masalah ekonomi.

Kedaulatan Ekonomi

Kedaulatan merupakan ekonomi aspek penting dalam pengelolaan suatu negara. Kedaulatan ekonomi sering diartikan sebagai bentuk kemandirian ekonomi suatu bangsa dan tidak tergantung pada pihak lain.

Dalam konteks Islam kedaulatan ekonomi yang dimaksud adalah mewujudkan perekonomian yang mandiri dan jauh dari intervensi dan ketergantungan terhadap asing. Dia akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki demi mewujudkan kemandirian ekonomi. Dengan itu tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

Sangat sulit untuk dapat mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi yang ada seperti saat ini. Dengan berbagai instrumen yang dimiliki serta *track record*-nya sistem ekonomi ini hanya

akan mewujudkan pro terhadap pemilik modal. Lebih jauh hanya pemilik modal yang benar-benar berdaulat.

Berdasarkan fakta dan catatan-catatan sejarah tampak begitu jelas, bahwa sistem ekonomi kapitalisme senantiasa mewujudkan kedaulatan bagi pemilik modal. Pemilik modal memiliki kewenangan penuh, bisa mengatur arus barang dan jasa. Pemilik modal inilah yang senantiasa menghancurkan keadilan distribusi ekonomi. Mereka selalu mengambil hak-hak banyak orang seperti dalam aset-aset kepemilikan umum yang diprivatisasi dan menjadi milik mereka. Intinya, kedaulatan ditangan pemilik modal inilah biang keladi kegagalan negara menciptakan kesejahteraan rakyat karena rusaknya distribusi ekonomi yang adil.

Islam Menjamin Kebutuhan Pokok Setiap Individu rakyat

Pada dasarnya Islam memandang bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Jika kebutuhan kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka bisa dipastikan akan timbul masalah dalam kehidupannya. Hanya saja, dalam implementasinya, siapa dan pihak mana yang wajib menjaga dan menjamin setiap kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi. Pada tataran ini ekonomi Islam memiliki cara pandang yang berbeda dengan kapitalis.

Islam memandang negara adalah pihak yang berkewajiban dalam menjaga dan memastikan setiap individu masyarakat untuk bisa mengakses kebutuhan dasar tersebut, baik berupa kebutuhan pokok berupa barang seperti; sandang, pangan dan papan maupun dalam bidang jasa seperti; pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Islam memandang pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan asasi dan harus dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang dan papan) dijamin pemenuhannya

oleh Negara melalui mekanisme yang bertahap. Adapun pemenuhan kebutuhan jasa pendidikan, kesehatan dan keamanan dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum” (*ri'ayatu asy syu-uun*) dan kemaslahatan hidup terpenting. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara. Negaralah yang harus mewujudkan semua pemenuhan kebutuhan tersebut agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim, miskin atau kaya. Seluruh biaya yang diperlukan ditanggung oleh Baitul Mal.

Dalam konteks pemenuhan jasa pendidikan, Al-Badri menyatakan suatu peristiwa dari al-Wadliyah bin Atha'. Ia mengatakan bahwa di Kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Oleh Khalifah Umar Ibnu al-Khatthab ra., atas jerih-payah itu beliau memberikan gaji kepada mereka sebesar 15 dinar setiap bulan (satu dinar = 4,25 gram emas).

Berkaitan dengan jaminan kesehatan, diriwayatkan bahwa Mauquqis, Raja Mesir, pernah menghadiahkan seorang dokter (ahli pengobatan)-nya untuk Rasulullah saw. Oleh Rasulullah saw., dokter tersebut dijadikan sebagai dokter kaum Muslim dan untuk seluruh rakyat.

Stabilitas Keuangan Berdasarkan Dinar dan Dirham

Sistem mata uang emas lebih stabil bila dibandingkan dengan *fiat money*. Pasalnya, ada kesamaan antara nilai intrinsik dan nominal yang membuat mata uang emas sulit untuk dimonopoli oleh negara tertentu. Sebaliknya, dalam penggunaan mata uang kertas ada fluktuasi dan ketidakstabilan dengan sistem bunga. Inilah yang membedakannya dengan uang emas sebagai standar moneter⁶ Maka dari

itu, tak heran para pakar ekonom dari barat mengakui kehebatan mata uang yang berbasis emas dan perak ini. Alan Greenspan (mantan Chairman The Fed), menyatakan, “Emas masih menjadi bentuk utama pembayaran di dunia. Dalam kondisi ekstrem, tidak ada yang mau menerima uang *fiat*. Namun, emas selalu diterima.”

Menurut Cristopher Wood, seorang analis Emerging Market CLSA, “Emas adalah satu-satunya jaminan nyata terhadap eksese-eksese keuangan massif yang masih dirasakan dunia Barat. Wood juga mengatakan ketika nilai tukar dolar anjlok, harga emas akan terus naik.”

Hal yang sama disampaikan Robert Mundell, penerima nobel ekonomi. Ia memperkirakan bahwa emas akan kembali menjadi bagian sistem keuangan internasional pada abad ke-21.⁷

Sejarah pun membuktikan emas bisa menjelma menjadi mata uang yang sangat stabil dibandingkan dengan mata uang kertas (*fiat money*) manapun, termasuk dolar. Pada tahun 1800 harga emas persatu troy ons setara dengan 19,39 dolar AS, sementara tahun 2004, satu troy ons emas senilai 455,757. Dengan kata lain selama dua abad berlalu, emas mengalami apresiasi yang luar biasa sebesar 2.250 persen terhadap dolar.”⁸

Sistem moneter stabil ini lebih memudahkan untuk memunculkan keadilan distribusi dan menciptakan kesejahteraan ekonomi. Berkaitan dengan itu, An-Nabhani menyatakan Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan apa saja yang dia sukai. Hanya saja, pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam satu sistem moneter. Islam telah menetapkan bagi kaum Muslim jenis tertentu, yaitu emas dan perak.⁹

Optimalisasi Sumber Pendapatan

Negara

Untuk membiayai semua pengeluaran negara, Islam memandang penting untuk dapat mengoptimalkan semua potensi sumber-sumber pendapatan negara. Islam memandang sumber sumber ekonomi sangat luas. Seperti sektor perdagangan, pertanian, kepemilikan umum, dll. Berbeda halnya dengan kapitalis yang hanya berpatokan secara rigid pada pajak. Pajak dijadikan sebagai pendapatan budgeter. Padahal Islam memandang potensi dari sumber-sumber ekonomi ini, jika dikelola dengan baik, memiliki potensi pendapatan yang sangat besar.

Pendapatan yang diperoleh negara akan dikumpulkan di Baitul Mal, lalu dikelola dan distribusikan untuk keberlangsungan dan kemaslahatan masyarakat. Ini semua dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melakukan pengurusan rakyat. Negara yang mampu menjalankan hal ini ialah hanya institusi negara kuat dan berdaulat. Berdasarkan catatan sejarah, hanya intitusi Khilafah yang mampu menerapkan sistem ekonomi Islam secara *kaffah*. □

Catatan kaki:

- ¹ J., Juliana dkk. (2018). *Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli 2018, hlm 259-268
- ² Beik, I. S. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- ³ Fioramonti, Lorenzo. 2013. *Gross Domestic Problem: The Politics Behind the World's Most Powerful Number*. London and New York: Zed Books
- ⁴ <https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-diprediksi-masih-akan-tergerus-di-bulan-ini>
- ⁵ Roy Davies dan Glyn Davies, 1996. *The History of Money From Ancient Time of Present Day*
- ⁶ Indra, F. A. & J. Juliana. (2021). *Transition to A True Currency: Impact of COVID-19 on The World Currency System*. Vol. 4, No. 2, 2021. Pages 42 – 47
- ⁷ Juliana. (2017). *Uang Dalam Pandangan Islam*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 217-230
- ⁸ Hamidi, L. (2007). *Gold Dinar Sistem Moneter Global Yang Stabil dan Berkeadilan*. Jakarta: Senayan Publisng.
- ⁹ *an-Nabhani, T. (2010). An-Nizham Allqitshadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam)*. Bogor: Al Azhar Press.

HANYA DENGAN KHILAFAH, MIMPI BURUK KAUM MUSLIM DAPAT DIAKHIRI

Muhammad Bajuri

Kaum Muslim adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Namun, faktanya status umat terbaik bagi kaum Muslim sudah jauh panggang dari api. Kehidupan kaum Muslim saat ini diwarnai dan diselimuti berbagai keburukan dan kerusakan, perpecahan di antara sesama, bahkan pelanggaran terhadap kehormatan dan tempat-tempat suci mereka menjadi realita sehari-hari, baik oleh kaum Muslim sendiri maupun oleh kaum kafir penjajah. Semua ini terjadi karena tiadanya Khalifah, sang perisai umat dan pelaksana penerapan Islam secara *kaffah*. Dengan demikian, mendirikan Khalifah menjadi keniscayaan. Tidak ada pilihan lain. Apalagi mendirikan Khalifah adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam di seluruh belahan dunia,

Dalil kewajiban mendirikan Khalifah bagi semua umat Islam di seluruh belahan dunia adalah al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak Sahabat.

1. Dalil al-Quran.

Allah SWT memerintahkan Rasulullah saw.

untuk memutuskan perkara di antara kaum Muslim dengan wahyu-Nya. Perintah-Nya dalam hal ini bersifat tegas:

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾

Putuskanlah perkara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (QS al-Maidah [5]: 48).

Seruan kepada Rasul adalah juga seruan kepada umatnya selama tidak ada dalil yang menghususkan hanya untuk beliau. Karena dalil yang menghususkan itu tidak ada, maka seruan itu menjadi seruan bagi kaum Muslim untuk mendirikan pemerintahan. Sebabnya, pengangkatan seorang khalifah tidak berarti apa-apa tanpa adanya pemerintahan dan kekuasaan. Juga, karena Allah SWT telah mewajibkan kaum Muslim untuk menaati Ulil Amri, yaitu penguasa. Ini menunjukkan kewajiban kaum Muslim

memiliki Ulil Amri (penguasa). Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan Ulil Amri di antara kalian (QS an-Nisa' [4]: 59).

Allah SWT tentu tidak akan memerintahkan ketaatan kepada yang tidak ada. Dengan demikian, mengadakan Ulil Amri untuk ditaati adalah wajib. Adanya Ulil Amri menyebabkan adanya penegakan hukum Allah. Tidak adanya Ulil Amri mengakibatkan hilangnya penegakan hukum Allah. Oleh karena itu, wajib mengadakan Ulil Amri karena ketiadaannya menyebabkan keharaman, yaitu hilangnya penegakan hukum Allah.

2. Dalil as-Sunnah.

Rasulullah saw. bersabda:

﴿مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً﴾

Siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, maka ia mati seperti mati jahiliyah (HR Muslim).

Nabi saw. telah mewajibkan setiap Muslim memiliki baiat di pundaknya. Beliau menggambarkan seseorang yang mati, sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, seperti mati jahiliyah (berdosa). Baiat itu tentu hanya diberikan kepada Khalifah. Dengan demikian mewujudkan seorang khalifah adalah wajib.

Rasulullah saw. hanya mewajibkan adanya baiat kepada Khalifah di pundak setiap Muslim, bukan mewajibkan setiap Muslim untuk berbaiat kepada Khalifah. Dengan demikian, yang wajib adalah adanya baiat di pundak setiap Muslim, yaitu adanya seorang khalifah, yang dengan itu berarti ada baiat di pundak setiap Muslim. Jadi, adanya seorang Khalifah itulah yang membuat ada baiat di pundak setiap Muslim, baik ia telah

berbaiat maupun yang belum.

Oleh karena itu, hadis tersebut merupakan dalil kewajiban mendirikan Khalifah, bukan merupakan dalil bahwa setiap orang wajib berbaiat kepada Khalifah. Sebab yang dicela Rasulullah saw. adalah tidak adanya baiat di pundak seorang Muslim sampai ia meninggal, dan Rasulullah saw. tidak mencela ketiadaannya baiat.

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda:

﴿إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ﴾

Sungguh Imam (Khalifah) itu perisai. Orang-orang akan berperang di belakang dia (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya (HR Muslim).

Abu Hazim berkata: Saya telah mengikuti majlis Abu Hurairah ra. selama lima tahun. Saya mendengar ia menyampaikan hadis dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda, “*Bani Israil dulu telah diurus urusan mereka oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, dia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak ada seorang nabi pun setelahku. Yang akan ada adalah para khalifah sehingga jumlah mereka banyak.*” (HR Muslim).

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda, “*Siapa saja yang membenci sesuatu pada diri pemimpinnya, hendaknya ia bersabar. Sebabnya, tidaklah seseorang keluar dari kepemimpinan (kaum Muslim) walau sejengkal, kemudian mati kecuali ia mati seperti mati jahiliyah.*” (HR Muslim).

Hadis-hadis ini berisi pemberitaan dari Rasulullah bahwa kaum Muslim akan dipimpin para wali (penguasa). Rasulullah menggambarkan Khalifah sebagai perisai, yakni pelindung. Pemberitaan Rasulullah bahwa Imam (Khalifah) itu perisai adalah untuk menjelaskan tentang manfaat keberadaan Imam (Khalifah). Pemberitaan itu merupakan tuntutan (permintaan). Sebabnya, pemberitaan dari Allah dan Rasul-Nya, jika berisi celaan, maka itu adalah tuntutan untuk meninggalkan, yakni larangan.

Jika berisi pujian, maka itu adalah tuntutan untuk melakukan. Jika perbuatan yang diminta itu menyebabkan penegakan hukum Allah, atau jika tidak dilakukan mengakibatkan hilangnya hukum Allah, maka tuntutan itu bersifat tegas (harus dilakukan).

Dalam hadis-hadis tersebut dijelaskan juga bahwa yang mengatur kaum Muslim adalah para khalifah, yang berarti tuntutan untuk mengangkatnya. Juga menjelaskan keharaman seorang Muslim keluar (memberontak) terhadap kekuasaan. Artinya, seorang Muslim wajib menjaga kekuasaan itu. Karena Rasulullah saw. memerintahkan ketaatan kepada para khalifah, dan memerangi orang-orang yang berusaha merebut kekuasaannya, maka ini artinya adalah perintah untuk mendirikan Khalifah, dan mempertahankan kekuasaannya dengan memerangi semua orang yang berusaha merebut kepemimpinannya. Nabi saw. bersabda:

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ،
فَلْيُطِئْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاصْرَبُوا
عُنُقَ الْآخَرِ»

Siapa saja yang membaiat seorang Imam (Khalifah), lalu dia memenuhi baiatnya dengan sepenuh hati, hendaklah dia menaati dirinya semampunya. Jika ada orang lain yang hendak merampas kekuasaannya, maka penggallah leher (bunuhlah) orang itu (HR Muslim).

Perintah untuk menaati Imam adalah perintah untuk menegakkannya. Perintah untuk memerangi orang-orang yang hendak merampas kekuasaannya adalah indikasi yang tegas tentang keharusan adanya satu orang khalifah saja.

3. Ijmak Sahabat.

Para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah bersepakat atas kewajiban menangat seorang khalifah (mendirikan Khilafah) setelah Rasulullah saw. Wafat. Mereka bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar, lalu Umar dan

kemudian Utsman sebagai khalifah setelah masing-masing mereka wafat.

Konfirmasi Ijmak Sahabat tentang kewajiban mendirikan Khalifah tampak dari penundaan mereka dalam memakamkan jenazah Rasulullah saw. setelah wafatnya dan kesibukan mereka dengan menunjuk Khalifah yang akan menggantikan beliau. Padahal segera memakamkan jenazah setelah kematiannya adalah wajib. Mereka yang berkewajiban memakamkan jenazah haram mengerjakan sesuatu yang lain sampai pemakamannya selesai. Dalam hal ini, para Sahabat yang wajib memakamkan jenazah Rasulullah saw. justru sebagian dari mereka sibuk mengangkat khalifah daripada mengerjakan pemakaman Rasul. Sebagian lagi diam dari kesibukan ini. Bahkan mereka ikut menunda pemakaman selama dua hari. Padahal mereka mampu untuk mengingkarinya. Mereka mampu untuk memakamkannya. Dengan demikian, hal tersebut merupakan ijmak (konsensus) untuk lebih sibuk mengangkat Khalifah daripada memakamkan jenazah. Tentu ini hanya terjadi jika mendirikan Khalifah lebih wajib daripada memakamkan jenazah. Juga, semua Sahabat sepakat sepanjang hidup mereka tentang kewajiban mendirikan Khilafah. Mereka memang berselisih tentang orang yang dipilih sebagai khalifah. Namun, mereka sama sekali tidak berselisih tentang kewajiban mendirikan Khalifah, baik pada saat wafatnya Rasulullah, atau setelah wafatnya salah satu di antara Khulafaur Rasyidin. Jadi, Ijmak Sahabat merupakan dalil yang jelas dan kuat tentang wajibnya mengangkat Khalifah.

Adapun pendapat para ulama tentang kewajiban mendirikan Khilafah, sangat banyak sekali. Berikut ini kami pilihkan sebagian saja:

Asy-Syahristani berkata, yang menggambarkan kondisi para sahabat menjelang wafatnya Abu Bakar *ra.* dan terpilihnya Umar *ra.*, “Tidak ada di hatinya (Abu Bakar) atau dalam hati siapa pun—dari para Sahabat—tentang kebolehan di bumi ada suatu masa tanpa seorang imam (khalifah). Semua ini menunjukkan bahwa

para Sahabat—generasi pertama Islam—bersepakat akan keharusan adanya Imam/Khalifah. Ijmak mereka ini menjadi dalil yang tegas akan kewajiban kepemimpinan (Khilafah).”

Imam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata dalam *Majmû' al-Fatâwa* (28/390): “Harus diketahui bahwa kekuasaan untuk menjaga urusan manusia adalah salah satu kewajiban terbesar agama. Bahkan hanya dengan kekuasaan itu, urusan agama atau dunia dapat ditegakkan dengan sempurna. Sungguh, kemaslahatan manusia tidak dapat terwujud tanpa hidup bersama, sebab satu sama lain saling membutuhkannya. Ketika mereka hidup bersama, mereka harus memiliki seorang pemimpin...Allah SWT memerintahkan amar makruf nahi mungkar. Ini hanya dapat dilakukan dengan kekuatan dan kekuasaan, begitu juga dengan kewajiban-kewajiban lainnya, seperti jihad, penyebaran keadilan, pelaksanaan ibadah haji, persatuan, hari-hari besar, membantu orang yang terzalimi, dan menegakkan hudud. Semuanya ini hanya dapat dicapai dengan adanya kekuatan dan kepemimpinan.”

Al-Khatib al-Baghdadi *rahimahullah* berkata: “Ketika Rasulullah saw. bersabda, *'Siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, maka ia mati seperti mati jahiliah'* (HR Muslim), dari sini dipahami bahwa yang dituntut adalah keberadaan seorang khalifah sehingga ada baiat di pundak kaum Muslim. Bukan baiatnya setiap Muslim. Dengan demikian, jika jumlah Muslim adalah satu miliar, satu miliar Muslim itu tidak semuanya diharuskan untuk berbaiat. Namun yang dituntut adalah bagi satu miliar Muslim itu ada Khalifah yang dibaiat oleh sebagian umat, atau mereka yang mewakili umat!”

Syaikh Thahir bin Asyur berkata dalam *Ushûl al-Nizhâm al-Ijtimâ'î fi al-Islâm*: “Pembentukan pemerintahan umum dan khusus bagi kaum Muslim adalah salah satu dasar dari hukum Islam, yang ditetapkan berdasarkan banyak dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencapai derajat *mutawatir maknawi*. Bahkan inilah yang

mendorong para Sahabat, setelah wafatnya Nabi saw., untuk segera berkumpul dan berunding dalam rangka mendirikan pengganti dari Rasulullah saw. dalam memelihara urusan kaum Muslim. Kaum Muhajirin dan Ansar sepakat pada hari—mereka berkumpul—di Syaqifah untuk mengangkat Khalifah setelah beliau. Lalu terpilih Abu Bakar sebagai Khalifah pengganti Rasulullah saw. dalam memimpin kaum Muslim. Setelah itu tidak ada perselisihan kaum Muslim tentang kewajiban mendirikan Khilafah, kecuali orang-orang ekstrem yang mengingkari ijmak Sahabat di antara pengikut Khawarij dan Mu'tazilah. Namun, mereka tidak diperhitungkan karena pendapatnya tidak memiliki arti sama sekali dalam penetapan hukum Islam.”

Karena posisi Khilafah dalam dasar syariah, maka para ulama *ushûluddîn* memasukkannya ke dalam masalah-masalah *ushûl* (dasar), yaitu bab *al-Imâmah* (kepemimpinan). Imam al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni berkata dalam *Al-Irsyâd*: “Pembicaraan tentang *Imâmah* bukan bagian dari dasar-dasar keyakinan, namun bagi orang yang tergelincir dalam masalah ini, bahayanya jauh lebih besar dari orang yang tidak mengetahui salah satu dasar agama.”

Makna perkataan al-Juwayni ini adalah, bahwa sebab *Imâmah* tidak mereka jadikan di antara dasar keyakinan, karena ia memang bukan dasar keyakinan. Akan tetapi, kesalahan dan tergelincir dalam masalah ini, sama dengan bahayanya ketika tergelincir dalam masalah dasar agama, mengingat pentingnya masalah *Imâmah*.

Dengan semua ini, masikhah kita berdiam diri, serta membiarkan kaum Muslim terus diwarnai dan diselimuti mimpi buruk berkepanjangan, dengan tidak mendirikan Khilafah? Untuk itu, bersegeralah bergabung dengan mereka yang selama ini terus menyuarakan dan berjuang agar Khilafah Rasyidah *'ala minhâjin nubuwwah* tegak kembali.

Wallah a'lam. □

ANALISIS DAN NASIHAT HIZBUT TAHRIR UNTUK TALIBAN

Kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan jelas menunjukkan kekalahan Amerika secara militer di bumi jihad itu. Setelah Presiden Ashraf Gani melarikan diri ke luar negeri, Taliban mengumumkan bahwa perang telah usai.

Terkait dengan kondisi di Afghanistan, Amir Hizbut Tahrir telah menganalisis apa yang terjadi Afghanistan. Amir Hizbut Tahrir juga mengingatkan Taliban untuk tidak berkompromi dengan kekuatan penjajah Amerika dan sekutunya, termasuk negara-negara regional yang selama ini dikendalikan Amerika.

Berikut beberapa catatan penting dari Amir Hizbut Tahrir tentang kondisi Afghanistan yang dikutip dari soal jawab dalam soal jawab yang berjudul, “Dampak Politik di Afghanistan” (09 Dzulhijjah 1442 H/19 Juli 2021 M):

Hal yang penting disebutkan adalah sikap negara paling menonjol yang digunakan Amerika secara aktif dalam negosiasi dengan Taliban di Afghanistan:

Pakistan: Pakistanlah yang memaksa Taliban untuk mengadakan pembicaraan dengan AS pada 2018. Zalmay Khalilzad berterima kasih kepada Pakistan karena

memfasilitasi perjalanan Taliban untuk pembicaraan di Doha. Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga menyatakan “terima kasih”-nya kepada mitranya dari Pakistan pada Maret 2021 dalam “Dukungan Berkelanjutan Pakistan untuk Proses Perdamaian Afghanistan”. “Kepala Pentagon memuji peran Pakistan dalam proses perdamaian Afghanistan” (Majalah *Al-Fajr*, 23 Maret 2021).

Perwira militer senior dan kelas politik di Pakistan telah memainkan peran utama dalam strategi AS di Afghanistan.

Demikianlah, peran Pakistan adalah peran utama dan memiliki sejarah. Gerakan Taliban Afghanistan memiliki asal-usul Pakistan. Dinas intelijen dan intelijen Pakistan memiliki pengaruh di Afghanistan dan memiliki kontak serta orang-orang di dalam Taliban. Karena semua itu, Amerika bergantung banyak pada peran Pakistan.

Turki: Seperti yang dilakukan di Suriah dan Libya, Turki bergerak menuju Afghanistan dan membantu tujuan politik luar negeri Amerika Serikat. Selama pertemuan internasional di resor laut Turki, Antalya, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengusulkan pengoperasian dan penjagaan keamanan Bandara Kabul Afghanistan oleh Turki.

Washington menyambut baik komitmen Ankara yang jelas untuk memainkan peran kunci dalam mengamankan Bandara Kabul setelah Biden bertemu Erdogan pada bulan lalu di Brussel. Biden ingin Turki melakukan tugas penjaga di Bandara, yang masih mempertahankan sekitar 500 tentara di dekat Bandara. Dalam pidatonya baru-baru ini, Biden mengindikasikan dalam pidato terakhirnya bahwa, “Kami berkoordinasi erat dengan mitra kami untuk mengamankan bandara internasional di Kabul.”

Erdogan mengatakan, “Kami bersama dengan Amerika Serikat dan NATO telah menentukan pengaturan untuk misi masa depan

dan apa yang kami terima dan apa yang tidak kami terima. Kami menawarkan masalah ini selama pertemuan NATO, dan selama pertemuan saya dengan Biden dan selama diskusi antara delegasi kami. Kami akan menerapkan prosedur ini di Afghanistan dengan cara sebaik mungkin.” (*Al-Jazeera*, 9/7/2021).

Juru Bicara Kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, mengatakan: “Turki dapat melanjutkan tugas mengamankan Bandara Kabul setelah penarikan pasukan NATO dan berakhirnya misi dukungan tegas yang dipimpin oleh Amerika di Afghanistan pada musim panas ini.” (*Middle East*, 3/7/2021).

Gerakan Taliban menolak kehadiran Turki. Gerakan Taliban mengumumkan dalam sebuah pernyataan, “Penolakannya terhadap bertahannya pasukan Turki di Afghanistan setelah penarikan pasukan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dari negara itu. Gerakan Taliban menekankan bahwa keputusan seperti itu tercela. Gerakan Taliban mengatakan bahwa keputusan para pemimpin Turki itu tidak bijaksana, karena itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan, persatuan dan integritas teritorial kami dan bertentangan dengan kepentingan nasional kami.” (*Al-Jazeera*, 13/7/2021).

Asia Tengah: Amerika Serikat telah berbicara dengan para pemimpin di Asia Tengah tentang reposisi beberapa kekuatannya di sana. *The New York Times* melaporkan bahwa para pejabat AS telah melakukan kontak dengan pihak berwenang Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan tentang kemungkinan penggunaan pangkalan-pangkalan di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengatakan dalam *tweet* bahwa ia berbicara pada 22 April dengan Menteri Luar Negeri Uzbekistan dan Kazakhstan tentang penggunaan pangkalan militer oleh AS dan pasukan NATO lainnya. Drone, pengebom jarak jauh dan jaringan mata-mata akan dibuat untuk

menjaga Afghanistan (*The New York Times*, 27 April 2021).

Dari paparan di atas menjadi jelas hal-hal berikut:

Kelanjutan negosiasi tidak mengarah pada pencabutan Amerika dari Afghanistan, tetapi lebih untuk menipu. Jadi, Amerika keluar melalui pintu depan dan masuk kembali melalui pintu belakang yang dijaga oleh para agen dan pengikut di Pakistan, Turki dan Iran serta mereka yang berputar bersama mereka di antara alat-alat Amerika di Afghanistan sendiri. Kemudian mereka memainkan peran utama dalam mempertahankan pengaruh Amerika di Afghanistan.

Adapun Qatar mempersiapkan suasana negosiasi untuk dua tujuan: *Pertama*, demi barter dengan Amerika untuk mencabut embargo Saudi (blokade) terhadap Qatar. Inilah yang terjadi. Terutama setelah Perjanjian Doha ditandatangani pada 29 Februari 2020 selama pemerintahan Trump. *Kedua*, Qatar dan Inggris di belakangnya, telah mulai menggunakan kontak-kontak mereka dengan Taliban untuk menyulitkan Amerika. Ini merupakan pengacauan yang telah dipelajari. Qatar memberikan bantuan keuangan kepada gerakan Taliban dan membuka kantor perwakilan dan mimbar media untuk gerakan Taliban. Kemudian Amerika membutuhkan peran Qatar untuk memfasilitasi kontak dengan gerakan Taliban. Begitulah, Inggris menjadi ada dalam potret apa yang sedang terjadi. Mereka menggunakannya untuk melayani kepentingan mereka di Qatar dan Teluk, memanfaatkan kebutuhan Amerika akan peran Qatar dalam memfasilitasi kontak dengan Taliban.

Masuknya Taliban ke dalam negosiasi dengan Amerika dan agen-agennya di rezim Afghanistan merupakan kesalahan besar. Kami memohon kepada Allah Yang Mahakuasa untuk melindungi umat Islam di Afghanistan dari keburukannya. Orang-orang kafir imperialis

hanya bernegosiasi untuk mencapai kepentingan mereka disebabkan keadaan yang mengelilingi mereka. Orang yang meneliti keadaan yang melingkupi Amerika sekarang niscaya menemukan hal itu tampak jelas. Jelas bagi setiap orang yang memiliki akal atau menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan:

Pertama, kemunculan China sebagai kekuatan militer dan ekonomi di abad ini mengancam kepentingan Amerika. Orientasi Amerika terhadap China telah menjadi prioritas. Pernyataan para pejabat Amerika mengatakan yang demikian seperti yang kami sebutkan di atas Dalam pidato Biden pada 8/7/2021, dia berkata, “Bahaya menjadi berada di luar Afghanistan dan yang menjadi prioritas sekarang adalah persaingan strategis dengan China.”

Kedua, kerugian yang ditanggung oleh Amerika di Afghanistan selama pendudukan-nya di Afghanistan, seperti yang kami sebutkan di atas: (*BBC News* menambahkan pada 29 Februari 2020, mengomentari Perjanjian Doha, *BBC News* mengatakan: Lebih dari 2.400 tentara Amerika tewas di Afghanistan).

Semua ini menunjukkan bahwa Amerika keluar dari Afghanistan dengan menyeret ekor kekalahan tanpa keluar dengan negosiasi-negosiasi yang akan melindungi pengaruhnya, sesuatu yang tidak dapat dicapainya dalam perang!

Kami menyadari bahwa ada saudara-saudara yang jujur dan setia di Taliban. Kepada mereka kami sampaikan:

Hendaknya mereka memperbaiki perkara tersebut sehingga menghentikan negosiasi ini. Mereka hendaknya tidak memberi kemungkinan kepada Amerika untuk mencapai apa yang tidak dapat dia capai dalam perang.

Hendaknya mereka meyakini bahwa agenda utama kaum Muslim adalah mengembalikan Khilafah setelah sekian lama menghilang. Hal

itu merupakan kewajiban dari Allah SWT dan merupakan ketaatan kepada Rasulullah saw.

Hendaknya mereka tahu bahwa partisipasi dalam pemerintahan campuran Islam dan sekularisme tidak diterima oleh Allah SWT. Allah Yang Mahaperkasa hanya menerima yang baik. Inilah yang haq.

﴿مَمَّاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾

Tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan (QS Yunus [10]: 32).

Mengikuti kebenaran adalah yang menyelamatkan Taliban, negeri Afganistan dan warganya serta kaum Muslim seluruhnya. Inilah yang kami dari Hizbut Tahrir nasihatkan kepada Anda semua sebagaimana kami menasihatkannya di awal pemerintahan Anda dengan jalan mendeklarasikan Khilafah. Namun, Anda menolak, dan kemudian Anda tahu bahwa Anda keliru dengan penolakan itu sebagaimana yang dinukil dari Mullah Umar *rahimahullah* dalam salah satu sesinya, tetapi setelah kesempatannya berlalu.

Sekarang kami kembali mengulangi nasihat tersebut. Lalu adakah orang yang menyambutnya?

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika Rasul menyeru kalian pada suatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan bahwa kepada Dialah kalian semua akan dikumpulkan (QS al-Anfal [8]: 24).

[Yahya Abdurrahman. Sumber: <http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/76695.html>]

HIMA OLEH NEGARA ATAS AREA MILIK UMUM

(Telaah Kitab Pasal 141 Muqaddimah al-Dustur)

S eluruh manusia memiliki hak memanfaatkan harta milik umum. Tentu sesuai dengan fungsi dan keberadaannya harta milik umum tersebut. Jalan umum, misalnya, boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Tak seorang pun boleh menguasai jalan umum hingga menyebabkan orang lain kesulitan atau tidak mampu mengaksesnya dengan mudah. Selain itu, fungsi jalan umum adalah untuk lalu-lintas orang, bukan untuk tujuan-tujuan lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatan jalan umum harus memperhatikan fungsi dasarnya. Seseorang tidak boleh menggunakan jalan umum untuk berdagang, istirahat, transaksi jual-beli, atau transaksi lain. Sebabnya, jalan umum dibuat bukan untuk tujuan tersebut. Jalan umum dibuat untuk lalu-lintas, bukan untuk tujuan lain.

Begitu pula sungai. Ia tidak boleh dimanfaatkan kecuali sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatannya tidak boleh mengganggu atau mempersulit pengguna lain. Apabila saluran air atau sungai kecil digunakan untuk pengairan, tidak boleh dipergunakan untuk penggaraman. Apabila sungai digunakan untuk banyak fungsi (misalnya untuk lalu lintas, pengairan, dan fungsi-fungsi lainnya), maka ia boleh dimanfaatkan untuk kepentingan-

kepentingan itu sekaligus, seperti halnya sungai-sungai besar di Kalimantan dan Sumatera, Sungai Nil, Tigris, dan sungai Euphrat.

Telaah Kitab edisi kali ini, membahas satu ketentuan hukum yang berhubungan erat dengan pemanfaatan tanah milik umum, atau harta-harta yang termasuk bagian dari kepemilikan umum. Di antara ketentuan syariah terkait dengan pemanfaatan harta milik umum adalah, Khalifah berhak menetapkan sebagian tanah milik umum, baik suatu daerah, kawasan, atau tempat tertentu sebagai kawasan lindung untuk kepentingan dan kemaslatan kaum Muslim. Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 141 yang berbunyi:

يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ أَنْ تَحْمِيَ مِنَ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ وَمِمَّا هُوَ
دَاخِلٌ فِي الْمِلْكِيَّةِ الْعَامَّةِ لِأَيَّةِ مَصْلَحَةٍ تَرَاهَا مِنْ
مَصَالِحِ الرَّعِيَّةِ

Negara boleh memproteksi sebagian tanah mati atau yang termasuk ke dalam kepemilikan umum untuk suatu kemashatan tertentu, yang dipandang oleh negara sebagai bagian dari kemaslhatan rakyat.

Pasal di atas menjelaskan bahwa Khilafah boleh menetapkan suatu kawasan milik umum, atau tanah mati, sebagai kawasan lindung yang



digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Negara juga boleh menetapkan dataran mati, gunung, hutan, kebun, dan lain sebagainya sebagai daerah lindung atau kawasan yang berada dalam penguasaan negara. Negara juga boleh menetapkan ketentuan semacam itu untuk harta-harta yang termasuk dalam kepemilikan umum demi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, negara boleh menguasai tambang minyak bumi, gas, dan lain sebagainya, dan menetapkan pendapatannya untuk pembiayaan-pembiayaan urusan rakyat. Negara juga boleh menetapkan sebuah kawasan hutan sebagai hutan lindung atau suaka margasatwa, atau menetapkan sebagian tanah mati untuk resapan air, kamp militer, pabrik senjata, dan lain sebagainya. Negara berhak melarang siapa saja yang berusaha mengeksploitasi semua itu di luar batas undang-undang yang ditetapkan negara.

Adapun dalil yang mendasari pasal di atas adalah Sunnah Nabi saw. Rasulullah saw. dan para khalifah setelah beliau menetapkan sebagian harta yang termasuk milik umum dengan cara tertentu, sebagai kawasan khusus. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Sha'bi bin Jutsamah yang berkata:

«لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»

Tidak ada hima (proteksi) kecuali (hal itu) merupakan hak Allah dan Rasul-Nya (HR al-Bukhari).

Makna kalimat “Tidak ada penguasaan kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya” adalah tidak ada hak penguasaan (*hima*) kecuali oleh negara (khalifah). Allah dan Rasul-Nya telah meng-*hima* tanah milik umum untuk keperluan jihad, orang-orang fakir, orang-orang miskin serta untuk kemaslahatan kaum Muslim secara keseluruhan.

Hima (penguasaan sebagian harta milik

Yang dimaksud dengan *hima* adalah tempat yang dikuasai (diproteksi/dilindungi). Dengan kata lain, *hima* adalah kawasan larangan, bukan tanah bebas. Islam datang dan melarang penguasaan harta milik umum oleh individu (penguasa) untuk kepentingan dirinya sendiri hingga menghalangi hak orang lain. Makna hadis di atas adalah tidak seorang pun memiliki hak *hima* atas sesuatu yang termasuk bagian harta milik umum, selain Allah dan Rasul-Nya. Hanya Allah dan Rasul-Nya semata yang berhak untuk melakukan *hima* atas tanah dan harta milik umum.

umum) sudah dipraktikkan pada masa Jahiliah. Asal-muasal *hima* dalam tradisi orang Arab Jahiliah, adalah apabila pemimpin mereka menempati suatu tempat yang subur, maka ia membawa dan menempatkan seekor anjing di tempat yang paling tinggi. Ketika anjing itu melolong, maka ia berhak menguasai wilayah itu seluas radius suara lolongan anjing bisa terdengar. Selajutnya, ia menguasai wilayah itu dari segala penjuru, dan melarang orang lain masuk ke dalamnya. Ia juga bekerjasama dengan orang lain untuk mempertahankan wilayah tersebut dari intervensi orang lain.

Yang dimaksud dengan *hima* adalah tempat yang dikuasai (diproteksi/dilindungi). Dengan kata lain, *hima* adalah kawasan larangan, bukan tanah bebas. Islam datang dan melarang penguasaan harta milik umum oleh individu (penguasa) untuk kepentingan dirinya sendiri hingga menghalangi hak orang lain.



Makna hadis di atas adalah tidak seorang pun memiliki hak *hima* atas sesuatu yang termasuk bagian harta milik umum, selain Allah dan Rasul-Nya. Hanya Allah dan RasulNya semata yang berhak untuk melakukan *hima* atas tanah dan harta milik umum.

Nabi saw. meng-*hima* wilayah tertentu untuk kepentingan dan kemashlahatan tertentu. Dari Nafi', dari Ibnu Umar ra. diriwayatkan bahwa ia berkata:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّبْعِيعَ لِلْحَيْلِ،
حَيْلَ الْمُسْلِمِينَ»

Rasulullah saw. pernah meng-hima daerah Naqi' (suatu tempat berair yang terletak 20 farsakh dari Kota Madinah, red.) untuk unta-unta kaum Muslim.

Khalifah Abu Bakar ra. juga pernah meng-*hima* padang rumput untuk menggembalakan unta-unta zakat. Beliau mempekerjakan maula

Penguasaan/proteksi yang dilakukan Nabi saw. Abu Bakar dan Umar ra. terjadi pada tanah milik umum. Tanah-tanah tersebut digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar meng-*hima* tempat-tempat di atas untuk menggembalakan unta-unta yang membawa perbekalan perang di jalan Allah, peternakan unta zakat, dan melarang kaum Muslim menggembalakan ternak-ternak mereka di dalam wilayah hima.

beliau, Abu Salamah, untuk mengurus padang rumput tersebut.

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. juga pernah meng-*hima* padang rumput pada bagian yang tinggi, dan mempekerjakan Hunaiy, untuk menjaga dan mengatur tempat tersebut.

Penguasaan/proteksi yang dilakukan Nabi saw. Abu Bakar dan Umar ra. terjadi pada tanah milik umum. Tanah-tanah tersebut digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar meng-*hima* tempat-tempat di atas untuk menggembalakan unta-unta yang membawa perbekalan perang di jalan Allah, peternakan unta zakat, dan melarang kaum Muslim menggembalakan ternak-ternak mereka di dalam wilayah hima.

Dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya, ia berkata: Seorang Arab Baduwi pernah mendatangi Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. dan berkata:

Seorang Arab Baduwi mendatangi Umar bin al-Khaththab seraya berkata, "Amirul Mukminin, negeri kami adalah negeri yang pada masa Jahiliah, kami berperang di atasnya, dan kami masuk Islam di atasnya. Lantas, mengapa Anda meng-*hima*-nya? Umar pun terketuk hingga membuat ia mendengus dan memelintir kumisnya (Umar, jika ada suatu urusan yang menyusahkannya, beliau memelintir kumisnya dan berdengus). Tatkala orang Arab itu menyaksikan reaksi Umar, ia pun menarik kembali hal itu. 'Umar pun berkata, "*Harta itu adalah harta Allah. hamba-hamba itu adalah hamba-hamba Allah. Demi Allah, seandainya aku tidak berkewajiban memikulnya di jalan Allah, sungguh aku tidak akan meng-hima tanah sejenkal pun.*"

Dituturkan dari Aslam yang berkata:



Saya mendengar 'Umar bin al-Khatthab tengah berkata kepada Haniy, maulanya, saat beliau mempekerjakan dia untuk daerah hima al-Rabdzah, "Hani, katupkanlah dua sayapmu dari manusia (jangan berlaku kasar kepada manusia); berhati-hatilah dengan doa orang yang dianiaya. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu mustajab. Masukkan ke dalam wilayah hima orang yang memiliki unta dan kambing sedikit. Tolaklah atas namaku unta-unta Bani 'Affan dan Bani 'Auf. Sesungguhnya, dua bani ini, jika ternak-ternak mereka binasa, mereka berdua akan kembali ke (kebun) tanaman dan kurma. Adapun orang-orang miskin ini, jika ternak mereka binasa, mereka datang dan berteriak, 'Wahai Amirul Mukminin!' Lantas apakah padang rumput itu yang lebih ringan bagi saya atau kerugian emas dan perak? Sesungguhnya tanah itu benar-benar tanah mereka. Mereka berperang di atasnya pada masa Jahiliah dan mereka masuk Islam di atasnya. Mereka memandang kami telah menzalimi mereka. Seandainya tidak karena ada unta-unta yang (bertugas) memikul beban di jalan Allah, niscaya aku tidak meng-hima apapun atas manusia dari negeri-negeri mereka selama-lamanya."

Hima yang dijelaskan dalam hadis di atas mencakup dua hal: *Pertama*, tanah mati, yang berhak dikuasai dan digarap oleh setiap orang. *Kedua*, barang-barang milik umum.

Alhasil, berdasarkan riwayat-riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah saw. pernah meng-hima beberapa tempat. Beliau pernah meng-hima daerah Naqi' yang secara khusus beliau gunakan untuk memberikan minum kuda-kuda perang kaum Muslim. Daerah Naqi merupakan tempat yang mengandung banyak air. Jika airnya susut, tumbuhlah di atas tanahnya rerumputan yang terhampar luas. Beliau menggunakan tempat itu untuk merawat kuda-kuda perang. Beliau melarang kaum

Alhasil, telah terjadi Ijmak Sahabat atas kebolehan seorang khalifah meng-hima tanah atau harta milik umum untuk kemaslatan dan kepentingan kaum Muslim.

Atas dasar itu, negara boleh meng-hima tanah mati dan barang-barang milik umum untuk kemaslahatan kaum Muslim.

Muslim menggembalakan ternaknya di tempat itu. Dengan kata lain, Nabi saw. menjadikan Naqi' sebagai kawasan lindung (*hima*) untuk merawat kuda-kuda perang.

Sepeninggal beliau, para khalifah juga meng-hima tempat-tempat tertentu. Khalifah Umar ra. dan Khalifah Utsman ra. juga telah meng-hima beberapa harta milik umum. Hal ini merupakan perkara masyhur di kalangan para sahabat dan tak seorang pun dari mereka mengingkari.

Alhasil, telah terjadi Ijmak Sahabat atas kebolehan seorang khalifah meng-hima tanah atau harta milik umum untuk kemaslatan dan kepentingan kaum Muslim.

Atas dasar itu, negara boleh meng-hima tanah mati dan barang-barang milik umum untuk kemaslahatan kaum Muslim.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. [Gus Syams]



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

TEKAD

Kita hanya bisa disatukan dan disolidaritkan dengan perang, jihad dan penaklukan. Ini saat yang tepat untuk kita berhijrah. Kita bukan hijrah ke tempat kita bisa mendapatkan makanan, tetapi ke tempat kita akan bangkit berjaya dan melindungi diri dari penguasa zalim. Inilah jalan suci, jalan jihad, jalan yang diberkahi itu. Siapa saja yang percaya kepada saya dan memiliki iman di dalam hati, mari bersama saya tanpa ragu....”

Di atas adalah ucapan tandas lagi bernas Ertugrul di hadapan para pemimpin suku atau kabilah Kayi dan Dodurgan dalam forum musyawarah membicarakan rencana migrasi atau hijrah ke wilayah yang lebih baik. Saat mayoritas tokoh yang hadir memilih Ahlat, tempat yang dinilai aman dan nyaman, Ertugrul justru mengajak mereka bergerak ke arah matahari tenggelam, ke wilayah yang dekat dengan perbatasan Bizantium. Mengapa? Rangkaian kata-kata itulah yang kemudian ia lontarkan.

Ertugrul adalah salah satu anak dari Sulaiman Syah, pemimpin kabilah Kayi yang ketika itu tinggal secara nomaden di wilayah Kesultanan Rum. Kabilah ini selamat dari serbuan pasukan Mongol pada 1220 M.

Prof. Ali Muhammad ash-Shallabi dalam *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah* (2003) menyebutkan, Ertugrul memimpin

migrasi kabilahnya yang terdiri atas 100 kepala keluarga dan 400 pasukan berkuda. Di tengah perjalanan, mereka terlibat dalam peperangan antara pasukan kaum Muslim dengan tentara Bizantium. Saat itu, Bizantium tengah berjaya di tengah merosotnya militer Saljuk. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Islam. Atas dukungan itu, Ertugrul dan kabilahnya akhirnya benar-benar mendapatkan tanah yang memang diharapkan, di Anatolia Barat, dekat wilayah perbatasan Bizantium.

Pada 1299 M, Ertugrul meninggal dunia. Ia lalu digantikan oleh putranya. Tak lain adalah Osman Ghazi. Dalam menjalankan roda pemerintahan, sang peletak fondasi Kesultanan Utsmaniyah itu mengikuti kebijakan ayahnya, termasuk dalam memperluas wilayah kekuasaan hingga ke kota-kota yang menjadi bagian dari kekuasaan Bizantium.

++++

Ertugrul adalah salah satu dari sekian banyak pejuang Islam pada masa lalu yang mewarisi kekokohan tekad Baginda Rasulullah saw. Kekokohan tekad yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah semacam inilah yang berhasil mengubah dunia. Bermula dari langkah kecil di Makkah selama 13 tahun, kemudian dilanjutkan dengan 10 tahun di Madinah, berkembang menjadi sebuah gelombang dahsyat perubahan di Jazirah Arab yang

menandai tegaknya peradaban baru dunia. Para sejarawan menyebut 700 tahun sebagai *the golden age*. Sepanjang waktu itu peradaban Islam menjadi arus utama peradaban dunia. Ini terjadi saat belahan lain termasuk kawasan Eropa dan Amerika tengah dalam kegelapan.

Dalam setiap kesempatan, tak henti Rasulullah saw. memompakan tekad untuk meraih kemajuan dan kemenangan. Menjelang Perang Khandaq, misalnya, umat Islam masih sangat lemah serta tengah dalam tekanan secara politik dan militer akibat kepungan pasukan Ahzab yang terdiri dari berbagai kabilah. Namun, Rasulullah tidak tampak mengendurkan tekad. Beliau justru berkata tentang bakal terjadinya penaklukan wilayah Jazirah Arab, lalu Rum, salah satu adikuasa saat itu. Di lain waktu Rasulullah saw. juga berbicara tentang penaklukan ibukota Romawi Timur, Konstantinopel, yang saat itu hampir tak tersentuh oleh lawan dari manapun datangnya. *“Pastilah akan ditaklukkan al-Konstantiniyah (Konstantinopel). Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penakluk kota itu dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan kota itu.”* (HR Ahmad).

Mendengar semua ungkapan Rasulullah itu, umat yang memang sudah memiliki tekad besar, makin bersemangat untuk mencapai kemajuan dan kemenangan. Hasilnya, semua daerah yang disebut Rasulullah saw. tadi akhirnya memang benar-benar berhasil ditaklukkan. Jazirah Arab dikuasai semasa Rasul masih hidup. Romawi Timur berhasil ditaklukkan setelah lebih dari 800 tahun kemudian. Oleh siapa? Oleh Muhammad al-Fatih, yang tak lain adalah anak keturunan Ertugrul!

Luar biasa memang pengaruh tekad dalam memandu orang untuk berjuang meraih kemajuan dan kemenangan. Nyatalah, sejarah besar hanya akan tercetak dari tekad yang besar, dan di tangan orang-orang yang mempunyai tekad besar itu.

Tekad yang besar itu hanya mungkin dilahirkan dari keyakinan yang kokoh. Keyakinan bahwa Islam adalah risalah mulia, satu-satunya jalan menuju kerahmatan yang dijanjikan Allah. Keyakinan bahwa hijrah dan jihad guna memperjuangkan risalah Islam itu adalah jalan mulia. Allah SWT akan memberi kita pahala yang tak ada bandingannya (*la mitsla laha*), juga *muraghamah katsirah* dan rezeki yang luas, sebagaimana dinyatakan dalam QS an-Nisa [4]: 100.

Tekad yang besar itu hanya mungkin dilahirkan dari keyakinan yang kokoh. Keyakinan bahwa Islam adalah risalah mulia, satu-satunya jalan menuju kerahmatan yang dijanjikan Allah. Keyakinan bahwa hijrah dan jihad guna memperjuangkan risalah Islam itu adalah jalan mulia. Allah SWT akan memberi kita pahala yang tak ada bandingannya (*la mitsla laha*), juga *muraghamah katsirah* dan rezeki yang luas, sebagaimana dinyatakan dalam QS an-Nisa [4]: 100. Hijrah dalam ayat ini dimaknai oleh Imam Thabari sebagai orang yang rela meninggalkan bumi syirik dan penduduknya guna menyelamatkan agamanya dan menjauhi agama mereka, menuju ke wilayah Islam dan penduduknya merupakan kaum beriman. Secara *syar'i*, hijrah oleh para ulama didefinisikan sebagai keluar dari negeri kufur menuju negeri Islam, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Sahabat pergi dari Makkah menuju Madinah.

Tentang makna *muraghamah*, Ibnu Mujâhid

Catatan Dakwah

memaknai sebagai tersingkir, terasingkan atau terjauhkan. Ibnu Abbas, Al-Dhahâk dan Ar-Rabi' menakwilkan kata itu sebagai tempat pindah atau tempat yang dituju saat bepergian. Kesimpulannya, *muraghamah* adalah istilah untuk menyebut tempat hijrah dan mengasingkan diri. Jadi, berdasar ayat 100 QS an-Nisa itu, ketika berhijrah, Allah SWT menjamin kita akan mendapatkan tempat hijrah yang banyak, karena bumi Allah itu memang luas. Dengan kuasanya, Allah akan memberikan tempat yang baik kepada siapa saja yang ingin berhijrah.

Keyakinan semacam itulah yang sejak awal dimiliki oleh Ertugrul. Akhirnya, memang terbukti. Ia dan kabilahnya mendapatkan tempat hijrah yang lebih baik, di Anatolia Barat. Benar pula, di tempat itu mereka bisa meraih kejayaan. Bukan hanya untuk kabilahnya sendiri, tapi juga untuk Dunia Islam. Dari anak keturunannya lah terwujud Kekhilafahan yang berhasil mewujudkan peradaban Islam lebih dari 4 abad lamanya.

Ertugrul menjadi legenda karena berhasil mencetak generasi yang mencintai Islam dan mencintai jihad di jalan Allah. Muhammad al-Fatih, keturunannya, berhasil mewujudkan *nubuwwah* Rasulullah saw. tentang kepastian penaklukan Konstantinopel. Ketika Muhammad al-Fatih memasuki benteng Konstantinopel, ia membaca hadis itu. Seolah pujian Nabi saw. tentang sebaik-baik panglima perang adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel itu ditujukan kepada dirinya.

Lalu ada Sultan Salim I, cucu Muhammad al-Fatih, yang kemudian menjadi penegak tonggak Kekhilafahan Ustmani setelah Kekhilafahan Abbasiyah runtuh. Sama seperti sifat kakek buyutnya, Salim disebut dengan julukan "Yavuz" (tegas). Di bawah kepemimpinannya yang hanya 8 tahun, ia berhasil mengendalikan wilayah yang meluas secara dramatis hingga ke kawasan Syam, Mesir

Ertugrul menjadi legenda karena berhasil mencetak generasi yang mencintai Islam dan mencintai jihad di jalan Allah. Muhammad al-Fatih, keturunannya, berhasil mewujudkan *nubuwwah* Rasulullah saw. tentang kepastian penaklukan Konstantinopel. Ketika Muhammad al-Fatih memasuki benteng Konstantinopel, ia membaca hadis itu. Seolah pujian Nabi saw. tentang sebaik-baik panglima perang adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel itu ditujukan kepada dirinya.

dan Hijaz. Dialah khalifah yang mendapat gelar *Khadim al-Haramayn* (Pelayan Dua Kota Suci)

Sulaiman al-Qanuni dikenal dengan julukan "*Suleiman the Magnificent*" (Suleiman yang Hebat). Dengan tekad bajanya, pada masa kepemimpinannya, Islam berkembang hingga semenanjung Balkan meliputi Hungaria, Belgrade, Austria. Pengaruhnya membuat sejarahwan menggelari beliau sebagai tokoh terpenting di Eropa abad ke-16.

Tekad baja juga tak pernah luluh ditunjukkan oleh khalifah Abdul Hamid II untuk terus mempertahankan Islam dan Kekhilafahan meski dalam keadaan sakit keras, di tengah konspirasi zionisme internasional untuk meruntuhkan sistem Kekhilafahan itu.

++++

Adakah tekad baja untuk bangkit, meraih kemajuan dan kemenangan Islam itu ada di diri kita? Semoga. Insya Allah. □

BERMUAMALAH DENGAN BANK SYARIAH

Soal:

Apakah bank-bank islami bermuamalah berdasarkan syariah islamiyah di Tulkarim dan Provinsi Tepi Barat?

Apakah boleh menitipkan (menyetorkan) uang di situ ataukah itu hanya nama untuk menutupi aktifitas-aktifitas ribawi? Bagaimana kita memastikan hal itu?

Jawab:

Pertama: Kami telah menjawab pertanyaan semisal itu lebih dari satu kali! Pada 20/8/2010, 5/3/2011...dst. Di antara jawaban-jawaban adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya akad-akad di dalam Islam itu tidak rumit dan bukan tidak jelas. Akad-akad di dalam Islam itu mudah telah dijelaskan di dalam syariah sebagai berikut:

Penjual suatu barang haruslah pemilik barang itu. Lalu dia tawarkan untuk dijual. Pembeli melihat barang tersebut. Jika dia menerima maka menjadikan akad. Jika tidak, barang itu tetap milik pemiliknya itu. Tidak sah jual-beli barang yang tidak dimiliki oleh penjualnya. Di antara dalil-dalilnya:

Dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Aku berkata, "Ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku. Ia memintaku menjual apa yang bukan milikku yang aku jual. Lalu aku membelinya dari pasar." Beliau bersabda:

«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

Jangan engkau jual apa yang bukan milikmu (HR Ahmad).

Semisal itu, seandainya Khalifah ingin mendistribusikan kepemilikan umum kepada masyarakat, atau mendistribusikan kepada masyarakat makanan dari kepemilikan negara, dan masing-masing orang mengetahui bagiannya, maka orang tidak boleh menjual bagiannya lebih dulu sebelum dia menerimanya dari negara.

Ini yang dialami oleh para Sahabat Rasulullah saw. Dari Nafi', ia berkata: Hakim bin Hizam pernah membeli makanan yang diperintahkan oleh Umar bin al-Khaththab untuk orang-orang.. Lalu Hakim menjual makanan itu sebelum dia menerimanya. Hal itu sampai kepada Umar bin al-Khaththab. Umar mengembalikan makanan itu kepada dia. Umar berkata:

«لَا تَبِعْ طَعَاماً ابْتِغَاءً حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ»

Jangan engkau jual makanan yang engkau beli sampai engkau menerimanya (HR Malik).

Imam Malik telah meriwayatkan:

Shukuk (cek) telah keluar untuk orang-orang pada zaman Marwan bin al-Hakam berupa makanan yang disimpan di al-Jâri (tempat di pantai yang di situ makanan dikumpulkan

dan disimpan). Lalu orang-orang memperjualbelikan shukuk (cek) itu di antara mereka sebelum mereka menerimanya. Zaid bin Tsabit dan seseorang dari Sahabat Rasulullah saw. lalu menemui Marwan bin al-Hakam. Keduanya pun berkata, "Apakah engkau menghalalkan jual-beli riba, wahai Marwan?" Marwan berkata: "Aku berlindung kepada Allah. Apa itu?" Keduanya berkata, "Shukuk (cek) ini diperjualbelikan orang-orang. Mereka menjualnya sebelum mereka menerimanya (makanan)." Marwan pun mengirim para penjaga untuk menelusuri shukuk (cek) itu, lalu mereka ambil dari tangan orang-orang dan mereka kembalikan kepada pemiliknya (HR Malik).

Namun demikian, muncul di negeri-negeri kaum Muslim lembaga-lembaga yang melakukan trik terhadap syariah dan menyebut dirinya sendiri "*islâmi*" seperti bank yang disebut "*islami*". Lembaga itu bermuamalah secara haram, tetapi tidak dengan cara ribawi seperti muamalah bank-bank ribawi. Hanya saja, bank-bank yang diklaim islami tersebut tetap berjalan dengan cara haram dalam bentuk lain:

a- Jika Anda pergi ke bank konvensional, lalu Anda ingin utang, maka bank memberi Anda (utang) dengan bunga ribawi tertentu. Namun, jika Anda pergi ke bank yang disebut "*islami*" dan Anda ingin utang, maka bank itu memberi Anda utang tanpa tambahan. Namun, karena bank manapun bukanlah lembaga yang membantu orang karena Allah, dia tetap menginginkan tambahan meski tidak secara gamblang sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional. Sebabnya, bank itu namanya *islami*! Dia tidak ingin bermuamalah dengan riba yang haram dengan pengharaman yang diketahui hingga oleh orang umum sekalipun. Karena itu bank itu berkata

kepada Anda, "Untuk apa Anda ingin utang?" Lalu Anda katakana, "Untuk membeli mobil atau barang tertentu, sementara saya tidak memiliki uang." Lalu bank berkata kepada Anda, "Baik. Kami belikan Anda mobil (barang) itu dan kami bayar harganya secara kontan. Lalu kami jual kepada Anda secara kredit dengan tambahan begini." Lalu dibuatlah kesepakatan dengan Anda sebelum bank membeli barangnya. Artinya, jual-beli antara bank dengan Anda secara angsuran (kredit) telah terjadi dan ditandatangani akadnya dan menjadi mengikat sebelum bank membeli barang tersebut. Berikutnya Anda terikat untuk mengambil barang itu setelah bank membelinya. Artinya, akad jual-beli telah dilakukan sebelum pemilikan bank atas barang itu. Anda tidak membeli barang setelah bank memiliki barang tersebut dan menawarkannya kepada Anda sehingga Anda bisa setuju atau tidak setuju. Di sini Anda tidak mampu menolak. Sebabnya, pada asalnya barang itu dibeli untuk Anda, bukan untuk bank. Jadi itu merupakan jual-beli apa yang tidak dimiliki. Ini secara *syar'i* tidak boleh. Namun, seandainya bank itu punya *showroom* mobil miliknya dan menawarkannya kepada orang-orang, lalu dia jual kepada orang yang ingin secara angsuran (kredit), tentu sah jual-beli tersebut. Hanya saja, bank bukanlah pedagang dengan makna yang telah dikenal. Bank hanya menginginkan keuntungan atas harta yang dia bayarkan. Jadi bank itu memang tidak mengambil bunga ribawi yang tidak sesuai dengan namanya yang "*islâmi*". Namun, bank tersebut malah mendapatkan keuntungan lebih banyak dari itu melalui muamalah yang tidak *syar'i*, yaitu jual-beli apa yang tidak dimiliki, yang diharamkan di dalam Islam!

b- Mereka menyebut transaksi di atas dengan

istilah *murabahan*, padahal bukan. Jual-beli *murâbahah* secara *syar'i* adalah Anda pemilik barang dan Anda tawarkan untuk dijual. Lalu pembeli datang dan menawar harganya kepada Anda. Kemudian Anda berkata kepada dia, "Beri saya untung sekian atas apa yang Anda beli itu." Lalu dia sepakat setelah dia menelaahnya atas harga yang bebankan untuk pembeliannya dan dia merasa tenteram dengan itu. Lalu dia membayar harga ini dan keuntungan yang Anda berdua sepakati. Seperti yang Anda lihat, barang itu dimiliki oleh penjual ketika dia menawarkannya kepada pembeli. Jelas bahwa ini bukan yang ditransaksikan oleh bank yang disebut *islâmi* itu atau lembaga-lembaga serupa.

- c- Kadang-kadang mereka menyebut transaksi tersebut dengan "*wa'd[un]* (komitmen)" dan bukan "*bay'[un]* (jual beli)". Ini rancu dan perkataan yang tidak benar. Sebabnya, *al-wa'du* (komitmen) atau *al-muwâ'adah* (komitmen timbal balik) itu tidak bersifat mengikat. Namun, di dalam muamalah bank, komitmen itu bersifat mengikat. Kesepakatan dibuat sebelum bank memiliki barang. Oleh karena itu, orang tidak bisa berkata kepada bank, setelah bank memiliki mobil itu, "Saya tidak ingin membelinya." Ini tidak mungkin terjadi di dalam muamalah bank. Sebabnya, akad telah terjadi sebelum pembeliannya (oleh bank). Itu bersifat mengikat dan bukan termasuk komitmen. Adapun *al-wa'du bi al-bay'i* (komitmen menjual) atau *al-wa'du bi asy-syirâ`i* (komitmen membeli) maka itu tentu saja tidak bersifat mengikat.

Al-wa'du bi asy-syirâ`i (komitmen membeli) adalah tidak bersifat mengikat. Yang mengikat adalah akad yang dilakukan dengan ijab dan qabul. Ini telah terjadi antara bank dan orang itu sebelum bank memiliki mobil tersebut. Yang terjadi di

antara bank dan orang itu adalah akad jual-beli yang mengikat bagi orang itu. Jadi jual-beli secara riil dan praktis telah terjadi antara bank dan orang itu sebelum bank memiliki mobil tersebut. Dalilnya, ketika bank memiliki mobil tersebut, orang itu tidak bisa menolak untuk membelinya. Ini jelas menyalahi hukum syariah yang menjelaskan jual-beli di dalam Islam.

- d- Kadang-kadang mereka menyebutnya pembelian dan bukan penjualan, dan bahwa orang itu adalah orang yang menyuruh membeli (*âmiru bi asy-syirâ`i*). Dia berkata kepada bank, "Beli untukku mobil." Ini juga merupakan perkataan yang rancu. Sebabnya, muamalah ini dengan sifat ini merupakan wakalah, yakni bahwa orang itu mewakilkan kepada bank dalam membeli untuk dia mobil itu dengan harga sekian dengan imbalan upah tertentu untuk bank sebagai wakil membeli. Namun, yang terjadi tidak demikian. Sebabnya, mobil itu dicatitkan dengan nama bank. Jadi banklah yang membelinya dari *showroom*. Bank lalu menjualnya dengan angsuran (kredit) untuk orang itu. Mobil itu tetap dicatitkan dengan nama bank sampai orang itu membayar harganya yang disebut angsuran. Mobil itu tidak dicatitkan dengan nama orang itu. Bank adalah wakil orang itu dalam membeli dengan imbalan upah tertentu, tetapi tidak demikian sama sekali. Itu dari semua aspek bukanlah wakalah. Seandainya orang itu mampu secara finansial dan dia ingin mewakilkan kepada bank untuk membelikan mobil untuk dia dengan upah sekian, seandainya orang itu mampu secara finansial atas yang demikian, niscaya dia tidak datang ke bank, tetapi niscaya dia lebih afdhal secara pengalaman dalam membeli dan lebih ringan upah (biaya)-nya dari bank.

Oleh karena itu apa yang mereka namakan

jual-beli seperti itu tidak boleh.

Ringkasnya, muamalah ini tidak boleh secara *syar'î*.

Sungguh membuat saya takjub, komentar salah seorang mereka seputar bank islami. Dia mengatakan bahwa bank konvensional menarik harta orang-orang yang tidak peduli dengan transaksi dengan riba. Tinggallah orang-orang yang agamis (relijius) yang tidak bermuamalah dengan riba dan harta mereka tetap berada di luar bank-bank konvensional. Bank-bank yang disebut "*islâmi*"-lah yang menarik harta orang-orang yang agamis. Bank-bank ini memanfaatkannya dengan cara bukan riba yang pengharamannya diketahui oleh orang umum. Bank itu memanfaatkannya dengan cara muamalah lain yang tetap tidak *syar'î*. Hanya saja, agar mudah meyakinkan orang-orang awam bahwa itu berasal dari syariah, dicarilah istilah di dalam syariah seperti *al-murâbahah*, misalnya. Itu tidak jelas seperti riba, tetapi kadang tidak diketahui oleh banyak orang yang agamis sehingga mereka menduga kebolehanannya.

Kedua: Adapun pertanyaan Anda tentang menempatkan harta sebagai amanah pada bank-bank ini, hal itu telah dijawab atas pertanyaan serupa pada 14/10/2012 sebagai berikut:

Al-Wasilah ilâ al-harâm harâm[un] (Sarana yang mengantarkan pada keharaman adalah haram). Benar hal itu berlaku atas segala hal, baik perbuatan individual seperti seseorang melakukan secara sepihak, atau perbuatan dari dua pihak, yakni akad. Pembedanya adalah bahwa ketika Anda memanfaatkan wasilah/sarana yang mengantarkan pada keharaman, Anda bertanggung jawab atas keharaman ini. Ketika Anda menjadi satu pihak di dalam akad maka keharaman itu terjadi pada pihak yang menempuh wasilah yang mengantarkan pada keharaman itu. Jika kedua pihak menempuh

jalan ini maka dosa atas keduanya.

Penempatan harta Anda sebagai amanah, yakni rekening giro tanpa bunga ribawi di bank, maka jika dalam dugaan kuat Anda bahwa bank akan menggunakan rekening giro Anda dalam riba, maka tidak boleh Anda menempatkan amanah ini (rekening giro) pada bank tersebut. Hanya saja, bank memisahkan antara amanah-amanah dengan bunga ribawi dan rekening giro tanpa bunga ribawi. Adapun harta yang ditempatkan dengan bunga maka digunakan dalam riba dan tidak diragukan dalam hal itu. Adapun rekening giro maka kadang digunakan, kadang dari rekening giro Anda atau dari rekening selain Anda. Hal itu karena rekening giro bisa ditarik kapan saja oleh pemiliknya. Oleh karena itu, itu menyerupai menempatkan amanah pada orang fasik. Jika Anda terpaksa untuk melakukan itu maka tidak ada dosa atas Anda. berdosa jika dia menggunakan amanah itu bukan pada tempatnya selama Anda tidak mengetahui hal itu atau rela. Begitulah bank, jika Anda tahu bahwa bank menggunakan rekening giro Anda di dalam riba maka tidak boleh.

Tentu saja yang lebih afdhal, Anda tidak menempatkan uang di bank atau pada orang fasik itu.

Namun, semua ini jika bank itu terakadkan secara shahih, seperti merupakan milik individu, atau milik negara, atau *syirkah* yang islami, atau *syirkah musâhamah* (PT) yang terakadkan bagi pelakunya. Bukan *syirkah musâhamah* (PT) yang memiliki akad yang batil. Jika tidak, maka bermuamalah dengannya adalah tidak boleh dalam semua kondisi. [Syaikh Athal bin Khalil Abu ar-Rasytah, 01 Muharram 1443 H/09 Agustus 2021 M]

Sumber:

<http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/77083.html>

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2989876937924977?_rdc=1&_rd



MENDIDIK ANAK MENGELOLA KEUANGAN

Arini Retnaningsih

Uang dalam sistem kapitalis sering dianggap sebagai hal utama yang harus dikejar. Bahkan tidak sedikit orangtua yang menjadikan tujuan akhir dari pendidikan anaknya adalah bisa mencari uang. Karena itu saat mereka mengajari anak tentang pengelolaan uang, mereka hanya sekadar mengajarkan tentang apa yang bisa didapat dengan uang. Ataupun jika ada pendidikan mengelola uang sedari kecil, sebagaimana berbagai tips yang diberikan para pakar keuangan, sandarannya juga kapitalis. Pendidikan tersebut diarahkan bagaimana anak bisa mendapat manfaat materi dari uang, misalnya, dengan menabung atau melakukan investasi berbasis bunga.

Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap harta. Islam telah mengatur bagaimana cara memiliki harta dan bagaimana pengelolaannya. Memang benar anak yang belum mukallaf, dalam Islam, tidak diberi hak untuk mengelola harta, termasuk uang. Namun demikian, memberi dia sedikit harta agar dia belajar mengelolanya adalah bagian dari pendidikan kehidupan yang harus dia kuasa.

Karena itu untuk mendidik anak mengelola uang, harus memperhatikan syariah Islam

dalamn pengaturannya.

Uang: Bagian dari Rejeki dari Allah SWT

Sebelum kita mengajarkan tentang pengelolaan uang, kepada anak harus kita tanamkan terlebih dulu keimanan bahwa rezeki telah diatur oleh Allah SWT (Lihat: QS Hud [11]: 6).

Adapun bekerja posisinya hanya sebagai jalan untuk kita sampai pada rejeki yang Allah tetapkan. Bekerja inilah yang Allah perintahkan bagi kita, yang akan menentukan pahala kita.

Karena rejeki adalah ketetapan Allah, dalam berupaya mendapatkan rejeki kita tidak boleh melalaikan Allah dengan meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita, misalnya shalat, dakwah dan sebagainya. Atau berusaha mendapatkan rezeki dengan jalan yang melanggar syariah-Nya seperti mencuri, menipu, riba dan sejenisnya.

Anak harus memahami konsep keberkahan rejeki bukan bergantung pada banyaknya harta, melainkan bagaimana kita memperoleh dan memanfaatkan harta sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Begitu juga anak harus memahami bahwa rejeki tidak selalu dalam bentuk uang, namun boleh jadi Allah berikan dalam bentuk yang lain: kesehatan, kasih

sayang orangtua, kepandaian, dan sebagainya.

Sebab Kepemilikan dan Pengelolaan Uang

Kita perlu menjelaskan pada anak apa saja yang menjadi sebab kepemilikan dan tatacara pengelolaan harta yang dibolehkan oleh syariah (Lihat: *Sistem Ekonomi Islam* karya Imam Taqiyuddin an-Nabhani). Ajarkan hal ini secara bertahap sesuai dengan tingkat umur anak.

Imam Taqiyuddin menjelaskan dalam kitabnya, Islam membatasi sebab-sebab kepemilikan harta dengan bekerja, waris, kebutuhan atas harta untuk menyambung hidup, santunan negara dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi seperti hadiah dan hibah. Di luar ini, misal mencuri bukan karena kelaparan, atau korupsi, atau menjual diri dan sebagainya adalah haram menjadi sebab kepemilikan. Begitu juga mengembangkan harta dengan berjudi, riba, menipu atau dengan cara-cara lain yang mengandung kezaliman adalah haram.

Dari pemahaman akan sebab kepemilikan, kita tanamkan pada anak untuk menjadi orang-orang yang ulet dan mandiri dalam bekerja, terutama anak laki-laki yang kelak akan menjadi pencari nafkah. Mengajari mereka untuk kreatif dan tidak malas serta menghargai uang dengan semestinya. Karena itu anak perlu dilatih dan tidak dibiasakan untuk bergantung pada orangtua.

Dalam hal pengelolaan harta, dibolehkan untuk melakukan jual-beli, pertukaran, menabung, pinjam-meminjam, memberikan kepada orang lain, dan sebagainya. Namun, ada beberapa bentuk pengelolaan yang dilarang oleh Allah. Di antaranya yang perlu dipahami oleh anak dengan benar adalah:

Pertama: Menimbun harta, yaitu menyimpan emas, perak ataupun uang tanpa ada tujuan atau keperluan, yaitu semata-mata menyimpan. Jika ada keperluan seperti untuk

membeli suatu barang yang dibutuhkan, membayar biaya sekolah, atau persiapan menikah, maka hal ini diperbolehkan (Lihat: QS at-Taubah [9]: 34). Uang bisa di-*qiyas*-kan pada emas dan perak karena memiliki kesamaan fungsi sebagai alat tukar yang dibutuhkan masyarakat sehingga bila ditimbun akan mengganggu perekonomian masyarakat.

Ini berarti saat kita mengajari anak mengelola keuangan, penting kita tanamkan konsep menabung yang benar, yaitu mengumpulkan uang untuk suatu tujuan tertentu, misalnya membeli mainan yang dia inginkan atau biaya sekolahnya nanti.

Kedua: Israf atau Tabdzir, yaitu membelanjakan harta dalam perkara yang Allah larang atau haramkan. Misalnya untuk membeli kupon undian semacam togel, minuman keras dan sejenisnya. *Israf* ini bukan semata-mata boros dalam pembelanjaan. Berbelanja banyak-banyak dengan menghabiskan uangnya bukan masalah bila anak menyedekahkannya ke panti asuhan atau korban bencana, misalnya. Namun, akan menjadi *israf* atau *tabdzir* bila ia belanja meskipun hanya selebar kupon judi togel senilai 1000 rupiah.

Ketiga: Tarf, yakni bermewah-mewah untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain. Perlu kita waspadai tren hedonisme di kalangan generasi muda, yang suka berlomba memamerkan materi: gadget tercanggih, makan di restoran mewah semisal model *all you can eat*, traveling ke tempat-tempat *instagramable* dan sebagainya. Sedini mungkin sifat-sifat ini kita rem sehingga saat anak dewasa mereka tidak terbawa arus hedonisme.

Ajari Anak Membedakan Kebutuhan dan Keinginan

Ini merupakan kunci dari mengelola keuangan. Dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, anak belajar untuk membatasi pembelanjannya dan menyusun

prioritas. Anak yang selalu mendapatkan semua yang diinginkan akan tumbuh menjadi anak yang egois, tidak mampu mengendalikan diri dan pada akhirnya akan menghalalkan segala cara untuk mendapat keinginan. Benar, tidak semua keinginan anak buruk atau harus ditolak. Namun, orangtua harus memahami kapan akan memberikan keinginan tersebut, kapan melatih anak untuk menabung agar bisa mendapatkan keinginannya dan kapan menolaknya.

Bila anak menginginkan suatu hal yang berharga, sepeda atau gadget, misalnya, ajari anak untuk berjuang mendapatkannya. Bisa dengan menabung sebagian uang jajannya atau berusaha menambah tabungannya dengan bekerja. Orangtua bisa meminta anak untuk menjual sesuatu atau bekerja membantu mencuci motor dan sejenisnya.

Hanya saja perlu diingat, tidak setiap pekerjaan membantu orangtua, anak diberi upah. Apa yang sudah disepakati menjadi tanggung jawab anak dalam aktivitas membantu orangtua seperti menyapu, mencuci piring dan sebagainya, jelaskan itu adalah bagian dari *birrul walidain* yang berpahala besar di sisi Allah. Namun, hal-hal di luar itu, misalnya membantu memperbaiki pagar rumah yang rusak, atau mengantarkan adik ke sekolah, bila anak sedang memiliki barang yang diinginkan, boleh diakadkan untuk mendapatkan upah. Ini untuk mencegah anak mengejar imbalan finansial saja dalam aktivitasnya, termasuk aktivitas kebaikan yang seharusnya diniatkan karena Allah.

Beberapa tips praktis untuk mendidik anak mengelola keuangannya berikut bisa diterapkan untuk membantu anak mengelola keuangan:

- Saat mulai masuk usia *tamyiz*, anak mulai diperkenalkan dengan akad-akad finansial seperti jual-beli, utang-piutang, upah-mengupah beserta konsekuensi dan hukum-hukumnya secara bertahap sampai

anak mampu memahami dengan baik.

- Ajari anak nilai uang dan bagaimana perjuangan untuk bisa mendapatkan uang sehingga ia bisa menghargai uang. Misal, bila anak ingin suatu mainan yang harganya mahal, jelaskan bahwa harga mainan itu setara dengan uang makan sekeluarga selama sekian hari.
- Tanamkan kebiasaan bersyukur saat mendapatkan nikmat, bersabar saat tidak terpenuhi keinginannya dan menyisihkan sebagian hartanya untuk bersedekah dan membantu orang lain yang membutuhkan.
- Beri anak kesempatan dan kepercayaan untuk mengelola uangnya sendiri secara bertahap sesuai umur dan kemampuannya. Buat evaluasi pengelolaan yang anak lakukan dan berikan saran-saran mana yang perlu diperbaiki dan diprioritaskan.
- Bila anak sudah masuk usia balig, sekitar SMP, berikan uang saku mingguan untuk ia kelola. Jangan menambahnya kecuali ada kepentingan yang mendesak. Bila ia sudah mampu mengelola, tingkatkan menjadi uang saku bulanan. Jumlahnya sesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orangtua, bisa dlebihkan sedikit bila anak memiliki kebutuhan yang harus ia peroleh dengan menabung.

Lakukan upaya-upaya pendidikan ini dengan proses pembiasaan, dalam suasana yang menyenangkan dan tidak menekan anak. Jangan sampai orangtua terlalu pelit dengan meminta anak menahan semua keinginannya atau selalu mengatakan tidak ada uang, padahal anak melihat orangtua memilikinya. Selalu utamakan dialog dalam proses pendidikan ini. Yang terpenting, orangtua senantiasa memberikan contoh dan keteladanan sebaik-baiknya, karena pada merekalah anak berkaca.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. □

Masjid Ebu'l Menuçehr

Adalah masjid Turki pertama di Anatolia. Tepatnya di Kota Kuno Ani. Dibangun pada 1072 oleh Menuçehr, yang ditunjuk Sultan Alparslan sebagai 'Bey of Ani'. Suara adzan bergema di masjid yang sedang direnovasi. Adzan, yang dikumandangkan berabad-abad kemudian di tempat bersejarah itu, menciptakan momen-momen emosional. Masjid Ebu'l Manusehr rencananya akan dibuka untuk ibadah pada 16 Agustus 2021, bertepatan dengan peringatan 957 tahun penaklukan Ani.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/islam/anadoludaki-ilk-turk-camisi-ebul-menucehr-hakkinda-bilgiler/NaN>



Hal yang menarik dari menara Masjid Ebu'l Manusehr adalah tulisan "Bismillah" tertulis dalam kaligrafi kufi dengan batu-batu putih berjajar di atasnya... Teks ini sesuai dengan anak tangga ke-66. 99 langkah menara terkait dengan jumlah nama Allah. Seperti jumlah tasbih, ada celah ventilasi kecil di setiap 33 anak tangga.



Menara masjid terdiri dari 99 anak tangga. Prasasti 'Bismillah' yang ditulis dalam kaligrafi kufi di menaranya sesuai dengan anak tangga ke-66.

Suara adzan bergema di masjid Turki lebih dulu dari Anatolia, yang terletak di reruntuhan Ani, yang saat ini masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO .



Ani, dibangun di dataran tinggi di selatan jalan menuju benteng di tempat Masjid Menuçehr (Menuzih), yang dikenal saat ini merencanakan dan dengan aman mencapai periode Seljuk tertua i Salah satu karyanya ... Langit-langit bangunan dua lantai persegi panjang dihiasi dengan motif Seljuk yang kaya.



Termasuk dalam Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO pada tahun 2016 bersama dengan karya–karya monumental lainnya di Situs Arkeologi Ani. Ani juga memiliki banyak contoh arsitektur sipil yang dihancurkan dan dikubur di bawah tanah.



Prasasti milik bangunan berisi informasi berikut tentang tanggal konstruksi bangunan: “Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pembangunan masjid dan menara ini diperintahkan oleh perintah agung, ьcauddevle Ebu Suca Manuzehr, putra Savr, pada masa Melik Shah, putra Alparslan, Sultan Agung, Sehinsah Agung, Sultan Timur dan Barat.”



Dalam sumber–sumber lama, disebutkan dua prasasti lagi dengan prasasti konstruksi di dinding barat masjid. Kamar mandi dekat masjid (timur laut) ditemukan dalam penggalian arkeologi antara 1965– 1967. Hanya nama Melik Shah dan ayahnya Alp Arslan yang terbaca di Masjid Menuzehr dari prasasti.

Pekerjaan penggalian dimulai pada 1 Juni 2021. Pekerjaan akan berlanjut hingga 30 September. Dalam penggalian yang dilakukan di bawah arahan Anggota dari Kepala Penggalian Fakultas Muhammet Arslan. Sebuah tim yang terdiri dari 35 orang bekerja untuk menggali kekayaan budaya yang penting ini dan menemukannya untuk melayani semua orang.



LINTAS DUNIA

Akun Palsu Cina, Upaya Pengaruhi Opini Dunia

Tak kurang dari 350 akun palsu di dunia maya menyuarakan narasi pro-Cina dan berusaha mendiskreditkan mereka yang dianggap sebagai penentang pemerintah Cina. Ini dinilai sebagai upaya Cina untuk menjadi negara adidaya.

“Keberadaan akun-akun ini menunjukkan bahwa Cina sedang berupaya untuk menjadi negara adidaya, paling tidak menjadi negara yang bisa berhadapan dengan Amerika Serikat,” tutur Pengamat Politik Internasional Farid Wajdi kepada *Mediaumat.news*, Kamis (12/8/2021).

Menurut Farid, itu juga sebagai langkah kontra propaganda terhadap isu yang sering dilontarkan oleh Amerika Serikat terhadap Cina, terutama isu-isu tentang pelanggaran HAM di Xinjiang, Turkistan Timur.

Keberadaan akun-akun itu juga, menurut Farid, sebagai *warning* bahwa Cina sebagai negara yang memiliki keinginan memengaruhi dunia internasional tentu punya kepentingan terhadap kondisi-kondisi yang ada di Indonesia. “Terutama untuk menciptakan semacam habitat, habitat politik dan ekonomi yang kondusif untuk menerima Cina,” jelasnya.

Karena itu ia memandang, tidak seharusnya Pemerintah Indonesia memosisikan Cina sebagai negara yang lugu, negara yang bersahabat dan

tidak memiliki kepentingan yang mengancam. “Selama ini Indonesia selalu memosisikan Cina seolah-olah negara yang tidak punya niat jahat terhadap kepentingan Indonesia. Rezim sekarang seharusnya mewaspadai keberadaan Cina sebagai negara yang punya kepentingan besar di Indonesia,” tambahnya.

Tak hanya sampai di situ, menurut Farid, apa yang dilakukan oleh Cina, juga dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya baik menggunakan akun palsu atau tidak. “Ini sesungguhnya bagian dari pertarungan politik internasional,” ungkapnya.

Bagaimana dengan posisi umat Islam? Itulah yang masih menjadi pertanyaan. Menurut Farid, selama umat Islam tidak memiliki kekuatan politik internasional dalam bentuk institusi negara, umat Islam tidak akan bisa bermain seperti Cina dan Amerika Serikat.

“Ini menunjukkan kepada kita kebutuhan umat Islam akan institusi politik global yang akan bisa memengaruhi politik internasional. Tentu bukan dengan menghalalkan segala cara, seperti yang dilakukan oleh Barat atau oleh Cina, tetapi politik internasional yang dibangun berdasarkan objektivitas dan bukti-bukti yang nyata,” pungkasnya.

Iran Bela Palestina, Hanya Retorika Politik

Pernyataan Presiden Iran terpilih Ebrahim Raisi yang akan tetap mendukung rakyat dan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dinilai Pengamat Politik Internasional Budi Mulyana hanya retorika politik belaka. “Itu hanya retorika politik belaka,” tuturnya kepada *Mediaumat.news*, Selasa (10/8/2021).

Menurut Budi, keseriusan suatu negara dalam membela Palestina dibuktikan dengan adanya tindakan riil untuk menghentikan pendudukan dan penjajahan Israel terhadap Bumi Palestina. “Bila tidak, berarti itu hanya retorika politik belaka,” tegasnya.

Budi menilai, apabila Iran serius membela

Palestina, semestinya Iran menggalang kekuatan untuk menghentikan penjajahan Israel terhadap Palestina. “Mengerahkan pasukan militernya. Melakukan diplomasi politik internasional dengan negara-negara dan institusi yang selama ini membela Israel serta tindakan riil lainnya,” pungkask Budi.

Di Balik ‘Pidato Biden Jakarta akan Tenggelam’

Pidato Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada 27 Juli 2021 lalu yang menyebut bahwa Jakarta terancam tenggelam dan menyarankan Indonesia untuk pindah ibukota dinilai ada kepentingan kapitalisme global di balik itu.

“Pidato Joe Biden ini harus dilihat lebih luas dan dalam. Ada kepentingan kapitalisme global di balik pidato ini,” ujar Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana kepada *Mediaumat.news*, Jumat (6/8/2021).

Menurut Agung, pidato Biden ini dapat dibaca sekaligus dikritisi dari dua aspek. *Pertama*, aspek perubahan iklim dan tata kelola Jakarta. Agung mengatakan, dalam konteks ini peluang Jakarta tenggelam memang ada kaitannya dengan tren kenaikan permukaan air laut di Jakarta, dan bersamaan dengan itu terjadinya penurunan muka tanah di Jakarta.

Agung membeberkan, tren kenaikan permukaan air laut sebenarnya adalah tren global terkait perubahan iklim. Perubahan iklim dipicu oleh efek rumah kaca karena semakin meningkatnya emisi karbon. Hal ini muncul karena pembukaan lahan hutan yang tak terkendali dan industrialisasi dengan energi tak ramah yang gila-gilaan terjadi sejak revolusi industri.

“Ini adalah dampak penerapan kapitalisme yang *clear* merusak alam. Hal ini juga berlangsung di Indonesia sudah sejak lama,” tegasnya.

Sedangkan penurunan muka tanah di Jakarta, kata Agung karena penyedotan air tanah yang tak terkendali. Hal ini terjadi karena beban ibu kota dengan semakin meningkatnya pembangunan di

Jakarta yang melebihi daya dukung lingkungannya. Ditambah pembangunan di hulu Jakarta yang juga merusak lingkungan sehingga banyak daerah aliran sungai (DAS) yang rusak parah.

“Hal ini juga hasil dari tata kelola yang kapitalistik,” ungkapinya.

Kedua, pidato Joe Biden ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik. Hal ini karena kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia di dalamnya, mendapat perhatian penting oleh AS sejak naiknya pengaruh ekonomi Cina di kawasan tersebut.

Agung menyebut, pidato ini juga bertepatan dengan berlangsungnya latihan militer bersama antara US Army dengan TNI AD RI di lokasi strategis yang bersekatan dengan *choke point* (titik sempit) Indonesia. Ditambah bertepatan dengan rencana kunjungan Wapres AS Kamala Harris di beberapa negara di Asia Pasifik.

“Artinya, pidato Joe Biden ini tak bisa dilepaskan dari target penting AS di kawasan Asia Pasifik untuk menghambat pengaruh Cina di kawasan tersebut,” ungkap Agung.

Apalagi dalam penggalan pidato tersebut, kata Agung, muncul saran yang keras Indonesia harus memindahkan ibukota dari Jakarta. Seperti diketahui bersama, rencana pindah ibukota dari Jakarta ke Penajam Kalimantan Timur menimbulkan polemik yang ramai di negeri ini. Apalagi dibangun dengan utang luar negeri, dan posisi Cina cukup santer terkait hal ini. Sekarang ditambah AS yang diduga kuat akan ikut bermain dalam hal ini.

Menurut Agung, AS sebagai negara kapitalis Barat dan Cina sebagai negara kapitalis timur tentu sangat berkepentingan terhadap Indonesia dan pindahnya ibukota. Sebagai negara kapitalis, AS dan Cina pastinya menjalankan agenda penjajahan, bukan agenda kesejahteraan.

Terakhir, Agung mengingatkan, selama Indonesia terus menggunakan kapitalisme dan dipimpin oleh rezim penakut, maka Indonesia hanya jadi obyek jajahan AS maupun Cina. **[Joy dan Tim]**

Dr. Arim Nasim:

SEGERA TERAPKAN EKONOMI ISLAM!



Pengantar Redaksi:

Baru-baru ini Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%. Angka yang cukup tinggi. Namun anehnya, di lapangan yang terjadi sebaliknya. Ekonomi masyarakat terpuruk. Banyak PHK dan pengangguran. Daya beli turun drastis. Penanganan pandemi sangat buruk. Pemerintah pun masih terus menambah utang baru.

Pertanyaannya: Parameter apa yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi selama ini? Mengapa seolah ada kontradiksi dengan realitas di lapangan? Jika benar angka pertumbuhan ekonomi tinggi, mengapa seolah tidak ada dampaknya sama sekali bagi masyarakat? Kalau begitu siapa saja yang menikmati tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut?

Itulah beberapa hal yang ditanyakan kepada Pengamat Ekonomi Islam, **Dr. Arim Nasim**, dalam wawancara dengan *Redaksi* kali ini,

Benarkah pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi sehingga bisa di klaim sesudah keluar dari krisis ekonomi?

Ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 % dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Ini memang lebih tinggi karena kuartal sebelumnya negative. Namun, untuk mengklaim bahwa Indonesia telah keluar dari krisis, menurut saya, terlalu berlebihan. Bahkan menyesatkan. Mengapa?

Pertama: Angka pertumbuhan ini rendah jika kita bandingkan dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama setelah setahun sebelumnya mengalami kontraksi yang lebih dalam. Kita bandingkan, misalnya, dengan Cina yang bisa tumbuh sebesar 18,3%, Singapore 14%, Amerika 12,2% dan Eropa 13,2%.

Kedua: Pertumbuhan PDB pada Triwulan II-2021 ini menunjukkan pertumbuhan yang semu karena menggunakan base rendah di

Kuartal II tahun 2020, yaitu -5,3%. Pada saat itu ada PSBB, sementara pada Triwulan II-2021 terjadi pelonggaran PPKM.

BPS merilis angka pertumbuhan tahunan 7,07%. Apa dasar dan bagaimana membacanya?

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II tahun 2021 sebesar 7,07% itu menggunakan dasar Triwulan II Tahun 2020 atau *year on year* (yoy) terhadap Triwulan 2 tahun 2020. Kita ketahui angka pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 sedang mengalami kontraksi sebesar - 5,3%. Jadi, pertumbuhan ini tinggi karena dasar pembandingnya, yaitu Kuartal 2 tahun 2020, sangat rendah atau *low base effect* (dasar perhitungan rendah). Seperti tahun 2019, misalnya, punya harta 100 juta, kemudian tahun 2020 turun menjadi 95 juta dan tahun 2021 naik lagi menjadi 102 juta. Maka kalau dihitung berdasarkan tahun 2020 memang naik 7 juta. Namun, kalau dasarnya normal, yaitu 100 juta, maka harta kita hanya tumbuh 2 juta. Itu dari sisi angka pertumbuhannya.

Lalu dari sisi apa yang tumbuh kita harus melihat faktor-faktor yang membuat ekonomi Triwulan II itu tumbuh. *Pertama*: Ada peningkatan pendapatan ekspor karena kenaikan harga komoditas ekspor yang signifikan seperti batubara dan minyak sawit, sementara ada penurunan impor karena impor bahan baku industri menurun.

Kedua: Ada peningkatan konsumsi masyarakat yaitu dari kelas menengah (penghasilan diatas 5 juta/bulan) yang melakukan belanja dalam tiga bulan terakhir, khususnya barang-barang *durable goods*.

Jadi dari situ juga bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi 7,07% persen ini tidak dinikmati oleh masyarakat kecil atau orang miskin.

Berarti klaim tersebut tidak sejalan

dengan realitas ekonomi Indonesia yang ada?

Iya, jelas. Bahkan dari sisi kebijakan Pemerintah pun tidak menunjukkan Indonesia itu sudah terbebas dari krisis. Saya malah melihat Indonesia semakin terperosok ke dalam jurang krisis yang lebih parah.

Bagaimana kontradiksinya?

Kita lihat saja realitas ekonomi di masyarakat, PHK semakin massif. Ini dampak dari pandemi Covid-19 dan PPKM yang terus diperpanjang tanpa jaminan pemenuhan kebutuhan pokok. Banyak tenaga kerja kena PHK bahkan mencapai angka 29,6 juta. Ini akan terus bertambah. Jumlah orang miskin terus bertambah. Menurut BPS angka orang miskin pada Maret 2021 berjumlah 27,54 juta orang. Padahal kita tahu standar miskin berdasarkan data BPS Indonesia itu sangat rendah sekali. Itulah kontradiksi pertumbuhan ekonomi dari sisi realitas ekonomi dimasyarakat.

Dari sisi kebijakan Pemerintah juga menunjukkan kontradiksi. Katanya ekonomi tumbuh tinggi, tetapi Pemerintah malah menambah utang baru. Menurut Sri Mulyani, Pemerintah akan menambah utang baru di Semester II Tahun 2021 sebesar Rp 515,1 triliun. Ini berarti bayar bunga utang dari hasil pinjam lagi. Bukan dari peningkatan kegiatan ekonomi. Kemudian kita dengar juga dari pidato kenegaraan, Presiden Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia tahun 2022 diprediksi tumbuh hanya 5%. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi 7,07 hanya pertumbuhan semu .

Apa parameter Pemerintah sehingga bisa menetapkan pertumbuhan 7% dan Indonesia diklaim keluar dari krisis sehingga bisa dikatakan sejahtera?

Ya tadi, Pemerintah hanya melihat dari

angka pertumbuhan yang secara statistik positif dengan angka pertumbuhan 7,07 % *year on year*. Dengan capaian tersebut, menurut Pemerintah seperti yang disampaikan oleh BPS dan Menteri Keuangan, ekonomi Indonesia akhirnya mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak Kuartal II 2020. Kala itu di Kuartal II 2020, ekonomi RI -5,32 persen. Beberapa indikator yang dilihat adalah komponen ekspor-impor, investasi dan konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan di Kuartal II 2021.

Padahal indikator-indikator tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan atau penyelesaian masalah ekonomi bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan peningkatan konsumsi itu dihasilkan dari semakin tingginya kelas menengah (penghasilan di atas > 5 juta/bulan) melakukan belanja dalam tiga bulan terakhir, khususnya barang-barang *durable goods*, yaitu barang-barang seperti TV, Lemari Es, Mobil dll. Bukan konsumsi sandang dan pangan.

Ada yang mengatakan bahwa rilis pertumbuhan tinggi Indonesia ada kepentingan politik?

Ya, memang. Saya melihat ini sekadar untuk menutupi kegagalan Pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus rakyat. Juga untuk menutupi kebijakan Pemerinah yang tidak pernah peduli terhadap kepentingan rakyat banyak, tetapi lebih serius melayani kepentingan para kapitalis yang ada di oligarki kekuasaan. Kepercayaan masyarakat terhadap rezim ini sudah sangat rendah sekali. Padahal dana yang digelontorkan untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pademi Covid-19 itu sampai sekarang sudah melebihi Rp 1.200 triliun. Namun, sebagian besar masyarakat tidak merasakan dan menikmati dana tersebut. Mereka dipaksa PSBB dan PPKM

tanpa dijamin kebutuhan pokoknya. Ada dana bansos, tetapi hanya dinikmati segelintir orang. Sebagiannya juga dikorupsi. Untuk menutupi kegagalan dan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat maka diangkatlah angka pertumbuhan semu. Seolah-olah Pemerintah berhasil mengatasi pandemi dan krisis ekonomi. Kenyataannya krisis bukan berakhir, tetapi malah akan memicu terjadi gempa ekonomi dengan semakin tingginya utang, kemiskinan, tsunami PHK dan dominasi investasi asing terhadap Ekonomi Indonesia.

Bagaimana standar kesejahteraan dalam Islam?

Islam memandang kesejahteraan itu sebenarnya bukan hanya dilihat dari aspek ekonomi. Faktanya, dari segi ekonomi negara-negara kapitalis banyak yang terpenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi kelihatannya banyak yang hidupnya tidak sejahtera. Karena itu Islam mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi saat seseorang dapat mewujudkan semua tujuan (*maqashid*) syariah, yakni: (1) terlindungi kesucian agamanya; (2) terlindungi keselamatan dirinya; (3) terlindungi akalunya; (4) terlindungi kehormatannya; (5) terlindungi hak miliknya/hak ekonominya .

Jadi dalam pandangan Islam, kesejahteraan bukan hanya merupakan hasil dari kebijakan ekonomi yang lahir dari sistem ekonomi, tetapi berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya yang lahir dari sistem yang lannya seperti sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem pergaulan sosial.

Dalam aspek ekonomi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu secara sempurna sebagaimana yang tercermin dalam politik ekonomi. Politik Ekonomi Islam, seperti yang dijelaskan oleh Abdurahman al-Maliki (2001) dalam bukunya, *As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutsâlâ* (Politik Ekonomi Ideal), adalah jaminan pemenuhan atas pemuasan

semua kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan) setiap orang serta pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas.

Lalu apa saja parameter Islam mendefinisikan sebuah negara sejahtera?

Kalau kita melihat definisi sejahtera dalam pandangan Islam seperti yang saya jelaskan di atas, maka indikator sebuah negara itu sebagai negara sejahtera adalah jika negara mampu menjamin *maqashid asy-syari'ah*, seperti yang saya sebutkan di atas, bagi setiap individu masyarakat bukan secara kolektif. Dalam konteks ekonomi sebuah negara dikatakan sejahtera jika setiap individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya baik kebutuhan pokok dalam bentuk barang seperti sandang, pangan dan papan; maupun kebutuhan pokok jasa seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Jadi indikator kesejahteraan dalam Islam bersifat individual, bukan indikator global seperti dalam sistem kapitalis, yang bersifat komunal seperti GNP dan *income* perkapita dan pertumbuhan ekonomi. Semuanya itu merupakan indikator kesejahteraan semu.

Lalu apa langkah-langkah yang wajib dilakukan sebuah negara agar mencapai pertumbuhan riil yang benar-benar menyejahterakan rakyatnya?

Pertumbuhan riil yang benar benar menyejahterakan rakyat terwujud kalau sistem ekonomi yang dikembangkan berbasis sistem ekonomi riil dan tidak mengabaikan distribusi atau pemerataan. Untuk mewujudkan itu maka negara harus menghentikan liberalisasi ekonomi dan menata sistem kepemilikan. Sistem kepemilikan harus ditata ulang dengan

mengelompokkan SDA menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Begitu juga kepemilikan industri harus disesuaikan dengan konsep kepemilikan SDA. SDA dan Industri yang menjadi hajat hidup orang banyak dan industri strategis seperti industri migas, batubara, hutan dan sumberdaya air harus dikelola oleh negara baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Umum (BUMU) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sistem ekonomi yang mampu mewujudkan pertumbuhann riil yang benar benar menyejahterakan setiap individu rakyat hanya ada dalam sistem ekonomi Islam. Dengan kata lain, kalau negara dan pemimpinnya memang serius ingin mengurus rakyat, maka tinggalkan sistem ekonomi kapitalis liberal dan ganti dengan sistem ekonomi Islam yang sudah terbukti selama kurang lebih 13 abad menyejahterakan umat manusia, baik Muslim maupun non-Muslim.

Apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam melihat realitas pertumbuhan ekonomi semu Pemerintah?

Umat Islam harus menyadari bahwa sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan oleh Pemerintah hanya menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan semu. Mereka juga harus memahami dan menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan riil hanya bisa diwujudkan dalam sistem ekonomi Islam. Karena itu saatnya umat Islam merapatkan barisan untuk bersama-sama berjuang mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Karena penerapan sistem ekonomi berhubungan erat dengan sistem lainnya terutama sistem politik, maka perjuangan umat juga harus mengarah pada perjuangagn perubahan sistem politik dan sistem ekonomi dari kapitalis menuju sistem Islam. □

BENARKAH INDONESIA TAK PUNYA UANG?

Ahmad Zufikar

U sulan *lockdown* kembali muncul dari publik saat kasus positif Covid-19 melonjak drastis di Tanah Air. Publik tidak begitu yakin kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini yang dijalankan Pemerintah bisa efektif. Langkah *lockdown* ini dinilai akan sangat ampuh menekan penyebaran Covid-19 seperti yang sudah dilakukan negara tetangga Malaysia yang memberlakukan *lockdown* total.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu sempat menyampaikan, biaya yang ditanggung tidak murah. Untuk DKI Jakarta saja dibutuhkan Rp 550 miliar perhari. Jabodetabek berarti bisa tiga kali lipat dari biaya tersebut. Berdasarkan angka tersebut, jika dihitung secara kasar dengan cara dikalikan 34 provinsi maka biaya total yang diperlukan untuk *lockdown* sekitar Rp 18,7 triliun perhari (<https://nasional.kompas.com/>).

Pada sisi lain, kondisi geografis dan mobilitas penduduk di Indonesia tidak cocok dengan pola *lockdown*. Dikhawatirkan, kas negara habis,

namun Covid juga tidak teratasi.

Alasan lain yang disampaikan Jokowi adalah dalam memutuskan setiap negara itu beda-beda. Tidak bisa kita disuruh meniru negara lain.

Mereka yang juga menolak kebijakan *lockdown* lebih banyak berargumen secara politis dengan berbagai macam alasan. Utamanya dampak perputaran ekonomi yang akan terganggu. Efek domino lainnya, akan banyak para pekerja yang kena PHK karena perusahaan tempatnya bekerja tidak mampu membiayai operasional nantinya. Daya beli masyarakat kita yang masih menurun, kalau ditambah kebijakan *lockdown*, bisa memicu krisis ekonomi. Permasalahan lain, yaitu masyarakat yang kurang disiplin, jadi mau *lockdown* sekalipun kalau tidak dibarengi kedisiplinan akan percuma. *Lockdown* bukan solusi.

Padahal kebijakan *lockdown* untuk tujuan kesehatan selaras dengan kebijakan untuk tujuan ekonomi. Studi yang dilakukan Bernard H Casey konsultan *Organization for Economic Co-*

operation and Development (OECD), pada Desember 2020 menunjukkan bahwa tidak terbukti adanya pertentangan (*trade off*) antara ekonomi dan kesehatan (Bernard H Casey December 18th, 2020 *Covid-19: Is there a trade-off between economic damage and loss of life?*)

Adapun anggaran untuk menangani dampak dari Covid-19 ditetapkan Pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran cukup besar diberikan Pemerintah sejak tahun lalu dan masih saja ditambah bila memang ada kebutuhan yang mendesak.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran PEN hingga 18 Juni 2021 sebesar Rp 226,63 triliun atau 32,4% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 699,43 triliun. Artinya, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 472,8 triliun lagi yang bisa digunakan hingga akhir tahun untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp 744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19.

Rincian alokasi anggaran dari Program PEN dalam APBN meliputi sektor: (1) Kesehatan dengan pagu Rp 214,95 triliun; (2) Perlindungan Sosial dengan pagu Rp 187,87 triliun; (3) Dukungan UMKM dan Korporasi dengan pagu Rp 161,20 triliun; (4) Program Prioritas dengan pagu Rp 117,94 triliun; (5) Insentif Usaha dengan pagu Rp 62,83 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>).

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam dua tahun terakhir ini. Pembiayaan program penanggulangan pandemi Covid-19 dan dampak sistemiknya serta program pemulihan ekonomi nasional mengakibatkan pos belanja negara membengkak jauh di luar dugaan.

Defisit APBN pada 2019 mencapai Rp 348,7 triliun atau setara dengan 2,20 persen produk

domestik bruto (PDB). Pada masa pandemi tahun 2020 melambung 3X lipat menjadi Rp 1.039,2 triliun (6,34 persen dari PDB).

Defisit APBN ini sudah melanggar batas maksimum defisit APBN. Sebagai informasi, defisit anggaran diatur dalam Undang-Undang (UU) 17/2003 tentang Keuangan Negara. Payung hukum tersebut membatasi defisit APBN sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Agar tidak dianggap melanggar UU, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 sebagai respon terhadap gelombang pandemi yang datang tidak terduga.

Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah mengajukan kelonggaran defisit APBN sampai angka tak terhingga selama masa pandemi Covid-19 atau paling tidak sampai tahun 2023. Dikhawatirkan pada tahun 2021 defisit APBN masih sangat tinggi, yaitu mencapai 5,70 persen terhadap PDB atau mencapai angka Rp 1.006,4 triliun.

Di sisi lain, dampak pandemi Covid-19 terhadap sumber-sumber pendapatan negara mengalami tekanan yang tidak kalah beratnya. Negara kehilangan berbagai sumber pendapatan utamanya seperti pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak dari usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada tahun 2020 diperkirakan rasio pajak terhadap PDB kembali turun drastis dari 9,76 persen menjadi hanya 7,90 persen. Hal yang sama juga terjadi dari penerimaan hasil usaha BUMN di mana diperkirakan pada tahun 2020 turun sekitar 15 persen dan pada tahun 2021 diperkirakan kembali turun sebanyak 40 persen.

Beban Utang APBN

Pemerintah harus menutup defisit APBN yang semakin meningkat. Jurus ampuh yang dilakukan Pemerintah, yaitu penambahan utang baru. Di tengah pandemi Covid-19, menggenjot penerimaan dari pajak dan hasil usaha BUMN

merupakan hal yang mustahil. Utang menjadi satu-satunya opsi yang paling realistis menurut pendekatan dan mazhab ekonomi yang selama ini dianut oleh Pemerintah dan mayoritas pelaku ekonomi di Indonesia.

Konsekuensi opsi ini memiliki efek negatif yang sangat besar dalam jangka panjang. Bom waktu berupa warisan utang akan diterima oleh generasi Indonesia selanjutnya. Rezim defisit APBN Pemerintah saat ini akan mewariskan beban utang untuk Pemerintahan Indonesia berikutnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, posisi utang Pemerintah per akhir Juni 2021 menembus di angka Rp 6.554,56 triliun dengan rasio utang Pemerintah terhadap PDB sebesar 41,35%. Walaupun jumlahnya sudah sangat besar, Kementerian Keuangan masih memiliki keyakinan bahwa utang Pemerintah masih berada di zona aman dan tetap terjaga.

Hal ini disebabkan karena komposisi utang Pemerintah sebagian besar sekitar 67,59% atau Rp 4.430,87 triliun dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri dari utang Domestik dalam bentuk mata uang rupiah seperti Surat Utang Negara (SUN) domestik dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>).

Alternatif Sumber Pendanaan

Diperlukan langkah *out of the box* untuk mencari sumber pembiayaan lain yang jauh lebih fleksibel.

Mengutip tulisan Agus Herta Sumarto *Ekonom INDEF*, dalam teori *modern public finance* dan *modern monetary theory*, sebenarnya masih terdapat satu cara yang bisa dijadikan pilihan alternatif Pemerintah untuk menutupi defisit anggaran yang sangat besar ini, yaitu dengan mencetak uang baru (<https://news.detik.com/kolom/d-5481806/menimbang-alternatif-pembiayaan-defisit-apbn>).

Namun, berkaca dari sejarah dan fakta, pencetakan uang ini memiliki beberapa resistensi.

Pertama, penciptaan uang yang dilakukan dalam jumlah besar, secara teori ekonomi *Keynesian* klasik, akan menciptakan inflasi yang sangat tinggi dan cenderung tidak terkendali (*hyperinflation*). Kondisi ini pernah dilakukan pada pemerintahan Orde Lama.

Kedua, penciptaan uang untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar seperti pada masa Orde Lama maka tidak menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang signifikan.

Ketiga, penciptaan uang ini juga dikhawatirkan dapat mengancam independensi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Indonesia. Penciptaan uang atas permintaan Pemerintah akan menghilangkan otoritas BI sebagai ujung tombak utama kebijakan moneter dan makro-prudensial.

Tiga resistensi dari penciptaan uang tersebut akan terus terjadi selama mata uang yang diciptakan terpisah antara nilai intrinsik uang dengan nilai nominal uang (*fiat money*) yang berlaku di pasar.

Berbeda kalau dalam penciptaan uang selalu dijamin dengan cadangan emas. Jaminan emas sebagai jaminan nilai intrinsik uang bisa diganti dengan komoditas berharga lainnya. Nilai intrinsik uang baru yang akan dicetak tidak terkena risiko inflasi.

Sebenarnya sistem mata uang emas telah memainkan peran yang penting dalam peradapan dunia. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad saw. masyarakat Arab menerima koin emas (dinar) yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Bizantium Romawi. Namun, penerbitan *Islamic* dinar sendiri baru dilakukan 50 tahun setelah wafatnya Nabi saw. Tepatnya 75 Hijrah (696 M), yaitu pada saat Khalifah Abd al-Malik ibn Marwan. Dengan demikian 'Dinar Emas' bukan hal yang baru. Namun, karena peranan *fiat money* yang sangat kuat maka 'Dinar Emas' seakan tenggelam dan tergantikan sampai saat ini.

Sumber alternatif kedua yang bisa dilakukan sebagai sumber pembiayaan APBN adalah

mengganti sumber pendapatan dari pajak ke sumber-sumber pendapatan negara yang sesuai tuntutan syariah.

Sektor perpajakan masih menjadi sumber penerimaan utama APBN dengan porsi sekitar 86 persen dari total penerimaan atau meningkat dari 10 tahun yang lalu yang masih 66 persen. Ini menunjukkan semakin bergantungnya Pemerintah pada rakyatnya.

Peningkatan pendapatan pajak dalam kebijakan anggaran Pemerintah tidak lepas dari paradigma negara yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara (fungsi *budgeter*). Pemerintah juga beralasan, pendapatan dari sektor bukan pajak seperti sektor migas cenderung menurun, sehingga Pemerintah cenderung menggenjot pendapatan dari sektor pajak.

Padahal banyak faktor yang menyebabkan pendapatan negara dari sektor migas mengalami penurunan. Di antaranya adalah banyak tambang-tambang minyak di Indonesia yang pengelolaannya tidak lagi di tangan Pemerintah (BUMN) secara penuh, namun telah beralih atau dikelola oleh perusahaan-perusahaan minyak asing/swasta dengan sistem *profit sharing*.

Belum lagi privatisasi yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan milik umum dan negara (BUMN). Hal inilah yang menyebabkan Pemerintah kehilangan pemasukan yang berasal dari sektor migas dan SDA lainnya. Negara hanya mendapatkan sebagian kecil melalui pajak atau pembagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan tersebut (BUMN).

Implikasi lainnya, secara faktual, sektor-sektor perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak atau semestinya dikuasai negara untuk mencegah konsentrasi kepemilikan di tangan segelintir orang malah diserahkan kepada mekanisme pasar yang sudah jelas didominasi kaum kapitalis.

Dengan doktrin *laizzes faire*, negara terus dicegah untuk melakukan dominasi/intervensi atas perekonomian. Akhirnya, munculah berbagai program dan kebijakan yang pro pada pasar dan

Strategi penyusunan APBN Indonesia dipengaruhi oleh ideologi kapitalis yang dianut oleh Pemerintah. Pemerintah mengatasi defisit anggaran dengan melakukan utang dan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Pendapatan pajak dijadikan basis utama APBN, sedangkan pendapatan dari sektor SDA tidak. Privatisasi dan investasi asing menjadi paradigma dalam pengelolaan SDA. Peran negara sebisa mungkin diminimalkan. Subsidi negara di sektor publik secara bertahap harus dihapuskan.

kebebasan kepemilikan (liberalisasi), seperti privatisasi dan penghapusan subsidi.

Dengan demikian strategi penyusunan APBN Indonesia dipengaruhi oleh ideologi kapitalis yang dianut oleh Pemerintah. Pemerintah mengatasi defisit anggaran dengan melakukan utang dan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Pendapatan pajak dijadikan basis utama APBN, sedangkan pendapatan dari sektor SDA tidak. Privatisasi dan investasi asing menjadi paradigma dalam pengelolaan SDA. Peran negara sebisa mungkin diminimalkan. Subsidi negara di sektor publik secara bertahap harus dihapuskan.

Semuanya itu membuktikan, kebijakan negara mengarah pada ideologi yang kapitalistik. Maka tidak aneh, ketika menghadapi masa pandemi Covid-19 pun tidak menjadikan ajaran Islam sebagai solusinya.

Wallahu a'lam bish ash-shawwab. []



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



SIFAT MANUSIA PENGHUNI NERAKA

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ﴿٧٤﴾ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٧٥﴾
كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ﴿٧٦﴾

Bahkan setiap orang dari mereka ingin diberi lembaran-lembaran (kitab) yang terbuka. Tidak! Sebenarnya mereka tidak takut terhadap akhirat. Tidak! Sungguh (al-Quran) itu benar-benar suatu peringatan. (QS al-Muddatstsir [74]: 48-56).

Dalam ayat-ayat sebelumnya diterangkan tentang sikap orang-orang kafir yang berpaling dari al-Quran yang berisi peringatan. Berpalingnya mereka dari peringatan diserupakan seperti keledai liar yang lari terkejut, yang lari dari singa atau para pemanah.

Dalam ayat berikutnya kemudian diterangkan motif mereka sebenarnya.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً﴾

Bahkan setiap orang dari mereka ingin diberi lembaran-lembaran (kitab) yang terbuka.

Ayat ini melanjutkan kalimat dalam ayat sebelumnya dengan kata «بَلْ» yang merupakan

harf 'athf. Kata tersebut bermakna *idhrâb*, mengalihkan pembicaraan dari suatu tema ke tema yang lain.¹

Dalam konteks ayat ini, ini termasuk *idhrâb intiqâli* (pengalihan ke hal lain tanpa disertai pembatalan terhadap kalimat sebelumnya) dengan menghilangkan kalimat yang menjadi jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Seolah dikatakan, “Mereka tidak memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut.” Jadi maknanya adalah, “Mereka tidak punya alasan yang menyebabkan mereka berpaling, bahkan mereka menginginkan.”²

Kemudian disebutkan tiap-tiap dari orang-orang kafir itu menginginkan agar kepada mereka turun ﴿صُحُفًا مُنَشَّرَةً﴾ (*lembaran-lembaran yang terbuka*) dari Allah SWT. Kata «صُحُف» merupakan bentuk jamak dari kata *صَحِيفَةٌ* (*lembaran*). Maknanya adalah *kitâb* (buku,

catatan) atau kertas yang ada tulisannya.³

Buku tersebut disifati dengan kata *«الْمُبَشَّرَةُ»* yang merupakan *ism maf'ul* dari kata: *«نَشَرَ»*. Adanya *syiddah* pada kata tersebut merupakan bentuk *mubâlaghah* dari kata *«نَشَرَ»* (membentangkan, menyebarkan). Maknanya, *shuhuf* atau lembaran-lembaran yang terbuka dan dapat dibaca. Bukan sekadar terbenteng, namun tidak diketahui apa yang tertulis di dalamnya.⁴ Menurut Wahbah al-Zuhaili maknanya adalah lembaran-lembaran yang tersebar, terhampar, disebar dan dibaca.⁵

Menurut Mujahid, tiap-tiap orang-orang musyrik itu menginginkan sebuah kitab sebagaimana kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Penjelasan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ

مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾

Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan beriman hingga kami diberi yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan-Nya." (QS al-An'am [6]: 124).⁶

Ada yang juga yang menerangkan bahwa Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah dan orang-orang kafir Quraisy lainnya berkata kepada Nabi saw., "Kami tidak akan beriman kepadamu sampai datang kepada masing-masing dari kami sebuah kitab yang di dalamnya tertulis ini dari Allah kepada Fulan bin Fulan."⁷

Penjelasan lainnya menyebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad saw., "Hendaknya di kepala masing-masing orang dari kami ditampilkan kitab yang terbuka dari Allah yang menyatakan bahwa engkau adalah utusan Allah."⁸

Permintaan mereka itu adalah sesuatu yang

mustahil. Seandainya pun dituruti tidak lantas membuat mereka mau beriman. Sebaliknya, mereka tetap kafir sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾

Sekiranya Kami menurunkan kepadamu (Muhammad) tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." (QS al-An'am [6]: 7).

Oleh karena itu, sikap mereka itu sesungguhnya merupakan bentuk permusuhan, kecongkakan dan kesombongan.⁹

Ayat ini bertujuan untuk menjelaskan parahnya kesesatan mereka. Seolah Allah SWT berfirman, "Janganlah kamu ingat berpaling dan larinya mereka sebagaimana larinya keledai dari sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan dan kebahagiaan bagi mereka. Dengarkan apa yang lebih aneh dan mengherankan, yakni masing-masing orang dari mereka itu berharap menjadi rasul yang diberi wahyu. Sungguh sangat jauh orang-orang yang celaka itu mencapai tingkatan para nabi."¹⁰

Allah SWT berfirman:

﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾

Tidak! Sebenarnya mereka tidak takut terhadap akhirat.

Ayat ini masih membicarakan tentang orang-orang kafir itu. Diawali dengan kata *«كَلَّا»* yang merupakan huruf yang mengandung makna *الرُّذُوعُ وَالرَّجْزُ* (pelarangan dan pencegahan).¹¹ Artinya, melarang dan mencegah keinginan mereka yang disebutkan dalam ayat sebelumnya.¹² Muhammad Ali ash-Shabuni juga berkata, "Hendaknya mereka

menghentikan ambisi tersebut,”¹³ yakni keinginan diturunkan kitab dari Allah SWT kepada tiap-tiap mereka.

Kemudian disebutkan kata «تَلَّ». Sebagaimana sebelumnya, ini merupakan *idhrâb intiqâliy*, untuk menjelaskan sebab penyifatan tersebut.¹⁴ Maknanya, mereka berpaling dari peringatan bukan disebabkan karena mereka tidak diberi lembaran-lembaran tersebut.¹⁵ Akan tetapi, sebab sebenarnya mereka menolak al-Quran adalah karena mereka tidak takut terhadap akhirat, yakni azab akhirat. Sebab, seandainya mereka takut terhadap neraka, tentu mereka tidak akan mengusulkan ayat-ayat tersebut setelah dalil-dalilnya terbukti. Faktanya, ketika sudah ada banyak mukjizat yang cukup menjadi dalil atas kebenaran kenabian, mereka masih meminta tambahan. Jelas, itu termasuk sikap penentangan.¹⁶

Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Akan tetapi, mereka tidak takut kepada siksa Allah SWT dan mereka tidak mempercayai Hari Kebangkitan, pahala dan siksa.”

Itulah yang mendorong mereka untuk berpaling dari mengingat Allah dan tidak mau mendengarkan wahyu dan yang Dia turunkan.”¹⁷

Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya yang merusak mereka tidak lain adalah tiadanya iman mereka pada Hari Akhirat dan pendustaan mereka terhadap terjadinya hari Kiamat.”¹⁸

Dengan demikian ayat ini memberikan peringatan keras dan sanggahan kepada mereka yang meminta agar diturunkan kepada mereka lembaran-lembaran yang terbuka dan tersebar. Pada hakikatnya, mereka adalah orang-orang yang mengingkari kebangkitan dan hisab. Seandainya mereka takut terhadap neraka, mereka tidak akan mengusulkan ayat-ayat. Cukuplah bagi mereka al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam ayat selanjutnya.¹⁹

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ﴾

Tidak! Sungguh (al-Quran) itu benar-benar suatu peringatan.

Ayat ini kembali diawali dengan kata «كَلَّا». Menurut sebagian mufassir, maknanya adalah الرِّدْعُ وَالرَّجْرُ (pelarangan dan penghalangan).²⁰ Pengulangan kata dengan makna yang sama itu mengandung makna *tawkîd* (untuk menguatkan) apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya,²¹ yakni larangan untuk berpaling



dari peingatan.²²

Kemudian Alalh SWT berfirman: «إِنَّهُ» (sesungguhnya dia). *Dhamîr al-hâ'* pada frasa tersebut menunjuk pada al-Quran.²³

Ditegaskan bahwa al-Quran tersebut adalah «تَذَكُّرَةٌ». Artinya, «تَذَكُّرَةٌ عَظِيمَةٌ» (peringatan yang agung).²⁴ Disebutkan dalam bentuk *nakirah*, yakni diakhiri dengan *at-tanwîn*: «تَذَكُّرَةٌ», mengandung makna *li at-ta'zhîm* (untuk mengagungkan).²⁵

Ibnu Jarir al-Thabari berkata, “Masalahnya bukanlah seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrik itu bahwa al-Quran adalah sihir yang dipelajari dan hanyalah perkataan manusia. Akan tetapi, al-Qur’an adalah peringatan dari Allah SWT untuk makhluk-Nya, yang dengannya Allah SWT memberi peringatan kepada mereka.”²⁶

Ada pula yang mengatakan bahwa kata «كَلَّمَ» di awal ayat ini bermakna «حَقَّقًا» (benar),²⁷ yakni *li tahqîq*, menyatakan bahwa benar-benar. Sesungguhnya al-Quran benar-benar

Dengan demikian ayat ini memberikan peringatan keras dan sanggahan kepada mereka yang meminta agar diturunkan kepada mereka lembaran-lembaran yang terbuka dan tersebar. Pada hakikatnya, mereka adalah orang-orang yang mengingkari kebangkitan dan hisab. Seandainya mereka takut terhadap neraka, mereka tidak akan mengusulkan ayat-ayat. Cukuplah bagi mereka al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam ayat selanjutnya.¹⁹

merupakan *tadzkiroh* (peringatan). Al-Khazin berkata, “Sesungguhnya al-Quran adalah nasihat yang agung.”²⁸

Karena itu cukuplah bagi mereka al-Quran karena dia adalah sebaik-baik peringatan dan nasihat.²⁹

Demikianlah. Orang-orang kafir itu sebenarnya tak punya alasan sama sekali untuk berpaling dan menolak al-Quran. Penolakan mereka terhadap al-Quran disebabkan karena

mereka tidak takut terhadap akhirat.

Wâl-Lâh a 'lam bi ash-shawâb. □

Catatan kaki:

- ¹ al-Syaukani, *Fatḥh al-adiṛ*, vol. 5, 400; al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 3, 402. Lihat juga *Jâmi' al-Durus al-'Arabiyah*, vol. 2, 77
- ² Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhi*, vol. 10, 292; al-Harari, *Tafsir Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 425
- ³ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'âshirah*, vol. 2, 1272
- ⁴ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 331
- ⁵ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 241
- ⁶ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 274
- ⁷ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 329
- ⁸ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 331
- ⁹ al-Syaukani, *Fatḥh al-adiṛ*, vol. 5, 400; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 244-245
- ¹⁰ Lihat al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 244-245
- ¹¹ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 456
- ¹² al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 3, 402; Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29, 164
- ¹³ al-Harari, *Tafsir Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 425; Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhi*, vol. 10, 292
- ¹⁴ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 456
- ¹⁵ Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhi*, vol. 10, 292; Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 331; al-Harari, *Tafsir Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 425
- ¹⁶ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 241
- ¹⁷ al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 368; al-Syaukani, *Fatḥh al-adiṛ*, vol. 5, 401
- ¹⁸ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 43
- ¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 274. Lihat juga al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 456
- ²⁰ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 245
- ²¹ al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 3, 402; Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29, 164; al-Harari, *Tafsir Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 425
- ²² al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 3, 402; Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 329
- ²³ al-Harari, *Tafsir Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 416. Lihat juga Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhi*, vol. 10, 292
- ²⁴ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 44; al-Syaukani, *Fatḥh al-adiṛ*, vol. 5, 401; Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 332; Lihat juga Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 274; al-Nahhas, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 5, 50
- ²⁵ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 332
- ²⁶ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 332; al-Harari, *Tafsir Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 425
- ²⁷ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 44
- ²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 274
- ²⁹ al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 368. Lihat juga al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 90
- ³⁰ Lihat al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 245

PANTANG MUNDUR MEMENANGKAN ISLAM

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

Keimanan membuahkan sikap tegas untuk menunjukkan kemuliaan Islam di atas kebatilan dan pengembannya. Dengan itu sinar Islam mampu menyinari gelapnya jalan-jalan kebatilan yang menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehinaan. Bukankah Allah menurunkan risalah Islam untuk dimenangkan atas seluruh agama? Bukankah Baginda Rasulullah saw. dan para Sahabat pantang mundur memenangkan Islam?

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia menangkan atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci (QS ash-Shaff [61]: 9).

Kata kerja *arsala* jelas berkaitan dengan tanggung jawab mengemban risalah, mengunggulkan kebenaran Islam di atas segala bentuk kebatilan. Sebaliknya, lemah terhadap kebatilan adalah kemungkaran, berujung menyamakan kebenaran yang terang-benderang bagaikan rembulan di tengah kegelapan malam. Dasarnya jelas, Allah SWT mengutus Rasulullah saw. dengan *al-hudâ* (petunjuk) dan *dîn al-haqq* (din yang benar). Ini mengisyaratkan bahwa risalah Islam adalah risalah petunjuk pada satu-satunya jalan

kebenaran. Allah senantiasa memilih diksi *sabiil* dalam bentuk *mufrad* (satu jalan), tidak berbilang.

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

Sungguh inilah jalan-Ku yang lurus. Karena itu ikutilah itu. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena jalan-jalan itu menceraikan kalian dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kalian bertakwa (QS al-An'am [6]: 153).

Keadaan mereka, seperti apa yang dituturkan penyair:

وَمَا الدِّينُ إِلَّا وَاحِدٌ وَالَّذِي نَزَىٰ * صَلَاحَاتِ أَتْبَاعِ
الهَوَىٰ تَتَفَارَعُ

وَمَا تَرَكَ الْمُخْتَارُ أَلْفَ دِيَانَةٍ * وَلَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ
هَذَا التَّنَازُعُ

فَيَا لَيْتَ أَهْلَ الدِّينِ لَمْ يَتَفَرَّقُوا * وَلَيْتَ نِظَامَ الدِّينِ
لِلْكَلِّ جَامِعٌ

Tidaklah agama ini melainkan satu saja Yang kita lihat berbagai kesesatan pengikut hawa nafsu berkecamuk

Tidaklah Nabi saw. membiarkan ada seribu agama

Tiada pula ajaran berpecah-belah ini ada dalam al-Quran

Andai para pemeluk agama tidak berpecah-belah Andai sistem agama ini menyatukan semuanya

Apa hikmah dan tujuan risalah Islam diturunkan? Adanya *lam at-ta'li'l* pada *liyuzhhirahu* menunjukkan bahwa Allah akan senantiasa mengunggulkan Islam atas segala agama, *hattâ* kaum *kuffâr* membencinya. Kalimat *wa law kariha al-musyrikûn* mengisyaratkan bahwa tidak ada kompromi bagi keunggulan Islam dalam kehidupan. Lantas, bagaimana mungkin seorang Muslim menghinakan dirinya di bawah kaki kebatilan dan pengembannya? Relu memarjinalkan peranan Islam dalam kehidupan dengan menolak penerapan hukum-hukumnya, demi mencari keridhaan mereka yang tak beriman?

Mengunggulkan Islam adalah menampilkan syiar-syiarinya. Mengamalkan ajarannya dalam seluruh aspek kehidupan. Mendakwahkan Islam tanpa kecuali. Tanpa kompromi hingga dakwah memasuki setiap pelosok bumi. Apalagi bermanis muka, menjilat para penyeru kebatilan, demi meraih seongkok dunia yang Allah berikan kepada mereka sebagai *istidrâj[an]* (penurun derajat), hingga ditimpa berbagai kehinaan. Prinsip ini pun tergambar dalam *atsar* Umar bin al-Khatthab ra., sebagaimana diriwayatkan al-Hakim, yang menjadikan Islam sebagai sumber kemuliaannya:

«إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَنْ نَبْتَغِيَ الْعِزَّةَ بَعْدَهُ»

Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Karena itu kami tak akan pernah mencari kemuliaan dengan selain Islam.

Kemuliaan Milik Allah, Kehinaan Bagi yang Menyelisihinya

Islam adalah satu-satunya jalan kemuliaan.

Kemuliaan tentu kembali kepada Allah:

«وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»

Bagi Allah kemuliaan itu, juga Rasul-Nya dan bagi kaum Mukmin (QS al-Munafiqun [63]: 8).

Dalam ayat yang agung ini, Allah menisbatkan secara khusus (*qashî*) kemuliaan hanya milik Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukmin. Keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi sebab kemuliaan (*al-izzah*), yakni kemuliaan dengan pertolongan Allah yang turun kepada kaum Mukmin dalam menghadapi musuh-musuhnya hingga mereka meraih kemenangan. Demikian sebagaimana diuraikan oleh Ats-Tsa'labi dalam *Al-Kasyf wa al-Bayân 'an Tafsîr al-Qur'ân* (IX/322).

Relevan dengan paradigma Islam sebagai agama yang mulia, tiada yang lebih mulia dari Islam, Ibn Abbas ra. menuturkan :

«الْإِسْلَامُ يَعْلو وَلَا يُعْلَى»

Islam itu mulia, tiada yang lebih mulia darinya.

Umat yang mulia wajib menjemput kemuliaannya dengan jalan dakwah:

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar makruf nahi mungkar dan mengimani Allah (QS Ali Imrân [3]: 110).

Ayat yang agung ini turun berkenaan dengan klaim kaum Yahudi, Malik bin ash-Shaif dan Wahhab bin Yahudza, di hadapan Ibn Mas'ud r.a., Ubay bin Kaab ra., Muadz bin Jabal ra. dan Salim ra. *mawla* 'Abi Hudzaifah r.a. Keduanya mengklaim, "Sesungguhnya agama kami (Yahudi), lebih baik daripada apa yang

kalian dakwahkan kepada kami, dan kami lebih baik serta lebih utama daripada kalian."

Lalu turunlah ayat yang agung ini, sebagai jawaban dan bantahan telak atas klaim kaum Yahudi, sebagaimana diuraikan oleh Ikrimah dan Muqatil.

Allah SWT menjelaskan kedudukan kaum Muslim sebagai umat terbaik selama mereka melakukan amar makruf nahi mungkar dan mengimani Allah dengan keimanan yang benar. Amar makruf nahi mungkar disebutkan lebih dulu sebelum keimanan kepada Allah. Hal itu karena keduanya (dakwah) merupakan sejeles-jelasnya bukti keutamaan umat Islam atas umat-umat lainnya. Dengan kata lain, kemuliaan ini akan berada di tangan kaum Muslim selama mereka beriman dan melakukan amar makruf nahi mungkar.

Sebaliknya, kehinaan bagi mereka yang menyalahi jalan Islam:

﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا

لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾

Janganlah kalian cenderung pada orang-orang yang zalim yang dapat menyebabkan api neraka menyentuh kalian. Sekali-kali kalian tiada mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan (QS Hud [11]: 113).

Kalimat "*fatamassakum an-nâr*", dalam *ilm al-bayân*, merupakan bahasa kiasan yang dipinjam (*majâz al-isti'ârah*), seakan-akan api secara aktif menyambar dan membakar manusia, sebagai bentuk peringatan kepada manusia yang berakal agar sekali-kali tidak condong pada kezaliman. Kalimat "*wa lâ tarkanû ilâ alladzîna zhalamû*" menisbatkan larangan condong kepada pelaku kezaliman hakikatnya larangan pada perbuatan zalim itu sendiri (*al-majâz al-mursal bi al-'alâqah al-sababiyyah*). Pelaku kezaliman adalah sumber

Kalimat "*wa lâ tarkanû ilâ alladzîna zhalamû*" menisbatkan larangan condong kepada pelaku kezaliman hakikatnya larangan pada perbuatan zalim itu sendiri (*al-majâz al-mursal bi al-'alâqah al-sababiyyah*). Pelaku kezaliman adalah sumber kezaliman, siapapun orangnya, apapun jenis dan bentuk kezalimannya. Di antara kezaliman itu antara lain menyekutukan Allah dengan makhluk yang hina (QS Luqmân [31]: 13) dan mengabaikan hukum-hukum Allah dalam kehidupan (QS al-Maidah [5]: 45). Kecenderungan ini hukumnya haram.

kezaliman, siapapun orangnya, apapun jenis dan bentuk kezalimannya. Di antara kezaliman itu antara lain menyekutukan Allah dengan makhluk yang hina (QS Luqmân [31]: 13) dan mengabaikan hukum-hukum Allah dalam kehidupan (QS al-Maidah [5]: 45). Kecenderungan ini hukumnya haram. Dalam ilmu *ushûl al-fiqh*, adanya ancaman siksa neraka dalam ayat ini menjadi indikasi tegas atas keharaman (*qarînah jâzimah li thalab at-tark*). Jika cenderung kepada individu-individu saja terlarang, misalnya ditandai dengan adanya dukungan pada kezalimannya, maka perkaranya lebih besar lagi (*min bâb al-awlâ*) jika cenderung pada agama, keyakinan, sistem kehidupan yang jelas-jelas menggagas kezaliman bahkan melegitimasinya, seperti sistem kufur Demokrasi, ekonomi Neo Liberalisme, dan yang semisalnya (lihat: QS. Ali Imran [3]: 19).

WaLlâh al-Musta'ân. []

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BUKAN JALAN KEMULIAAN

Najmah Saïdah

Para Feminis berpendapat bahwa permasalahan yang menimpa perempuan (kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dsb) diakibatkan karena perempuan tidak mampu memberikan kontribusi secara materi di dalam keluarga. Pada akhirnya peran perempuan sebagai istri dan ibu sering diabaikan dan dianggap sebagai peran yang tidak berarti. Hal ini menuntut perempuan untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka bersaing dengan pria untuk merebut posisi tertinggi dalam suatu pekerjaan, lembaga bahkan dalam pemerintahan. Mereka bangga menjadi seseorang yang mampu memberikan kontribusi besar secara materi kepada keluarga. Mereka nyaris menanggalkan kebanggaan menjadi seorang Muslimah. Mereka meninggalkan kemuliaannya sebagai istri dan ibu, pengasuh dan pendidik bagi anak-anak dan masyarakatnya. Bahkan peran ini diremehkan oleh mereka.

Apalagi dalam situasi pandemi menerpa dunia saat ini. Banyak para kepala keluarga yang akhirnya dirumahkan sementara. Bahkan tak sedikit yang harus kehilangan pekerjaan. Hal ini mendorong semakin banyak perempuan yang bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, sekaligus mengokohkan opini perempuan sebagai ujung tombak ekonomi keluarga dengan program pemberdayaan ekonomi perempuan.

Hal ini pula yang telah mendorong lebih dari 40 juta perempuan Indonesia terjebak dalam dunia kerja yang tak ramah dan tak memihak perempuan. Jutaan di antaranya hidup di kawasan industri yang kumuh untuk menjadi roda pemutar mesin-mesin pabrik milik para kapitalis dengan upah murah. Sebagiannya lagi bekerja di sektor-

sektor informal yang tak menjanjikan kemudahan. Jutaan lainnya berbondong-bondong menjadi buruh migran, bahkan di antaranya menjadi korban sindikat perdagangan perempuan. Di pedesaan pun, para ibu rumah tangga bergelut dalam industri-industri rumahan yang dikelola UMKM yang dibentuk oleh kalangan akademisi atau PKK dan sebagainya.

Lalu apakah beberapa upaya ini menunjukkan perubahan nasib perempuan atau malah sebaliknya?

Memunculkan Permasalahan Baru

Ketika perempuan keluar dari rumah-rumah mereka, mulailah muncul masalah-masalah baru, termasuk apa yang kalangan feminis katakan dengan peran ganda atau *double burden*; bahkan sekarang *triple burden*. Sebagaimana dilansir *mubadalah.id*, perempuan saat ini dilingkupi dengan beban rangkap tiga, yaitu sektor reproduksi, komunitas dan produksi.

Peran reproduksi berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak dan pekerjaan domestik. Peran komunitas berkaitan dengan peran perempuan di ruang sosial. Perempuan memiliki peran pada beberapa ruang-ruang sosial masyarakat, seperti keterlibatan perempuan pada kegiatan-kegiatan masyarakat. Adapun peran produksi adalah peran yang harus dijalankan oleh perempuan dari tempat kerjanya. Peran produksi ini juga melahirkan beberapa beban terhadap perempuan, hal tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijakan dari perusahaan atau tempat kerja yang kurang ramah terhadap perempuan sebagai tenaga kerja (*Mubadalah.id*, 26 Juli 2021).

Tampak jelas di manapun dan pada situasi apapun akan kita dapati kenyataan bahwa konsep pemberdayaan ekonomi perempuan yang diusung feminis ini tidak membawa kebaikan apapun. Bahkan tidak memberikan solusi apapun, selain hanya menambah panjang daftar persoalan perempuan. Ketika perempuan didorong untuk bekerja, bahkan menjadi ujung tombak keuangan keluarga, justru itu membebani perempuan dengan sesuatu yang seharusnya bukan menjadi tugasnya dan selanjutnya tidak akan mengantarkan perempuan pada kemuliaan.

Tak Butuh Pemberdayaan versi Feminis

Sejatinya, ketika perempuan didorong untuk mandiri, tidak membutuhkan siapapun bahkan suaminya sekalipun, ternyata ini melawan fitrah. Perempuan tetap ingin dan butuh dilindungi, ingin dijaga, mau tidak mau harus bergantung kepada laki laki, apakah suami atau walinya. Apakah kebebasan perempuan menjadikan ia sebagai ujung tombak ekonomi keluarga membawa kebahagiaan? Sama sekali tidak.

Kemandirian perempuan untuk memenuhi kebutuhan materinya bukanlah cara untuk menghilangkan penindasan atas perempuan atau menegakkan kehormatan bagi perempuan. Ide ini tidak menyelesaikan masalah perempuan. Ketika perempuan mandiri, justru lebih rentan dari sisi perlindungan. Lihatlah betapa banyak perempuan bekerja, apalagi mereka yang pergi ke luar negeri tanpa disertai suami atau *mahram*-nya. Banyak di antara mereka yang diperkosa, dianiaya dan tak sedikit yang akhirnya merengang nyawa, pulang hanya tinggal nama.

Demikian halnya perempuan bekerja di negeri ini, mereka harus berjibaku dari pagi hingga petang bahkan malam atau dari malam hingga pagi lagi, demi sebuah kemandirian dan kebebasan atas nama kesetaraan. Apa yang kemudian didapatkan? Terkurasnya tenaga dan pikiran. Buah hati di rumah yang menunggu senyuman dan belaian lembut tangan sang bunda akhirnya harus menelan kekecewaan. Sang bunda

bahkan tak sempat memberi senyuman, ataupun sekadar sapaan karena anaknya sudah tertidur kelelahan menunggu bunda tercinta. Lalu pada pagi buta sang bunda sudah harus berangkat, dengan menempuh perjalanan yang masih sepi, siap menawarkan ancaman kehormatan dan keamanan sang bunda. Lalu siapa yang akan melindungi dirinya?

Hanya Islam yang Memuliakan Perempuan

Sungguh Islam telah memberikan keistimewaan bagi perempuan. Ketika ia bisa menjalankan peran utamanya sebagai '*umm[un] wa rabbah al-bayt'* dengan maksimal maka kemuliaan (surga) dapat ia raih. Asma' binti Yazid pernah bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah bukankah Engkau diutus Allah untuk kaum laki-laki dan juga perempuan, mengapa sejumlah syariah lebih berpihak pada laki-laki. Mereka diwajibkan jihad kami tidak, malah kami mengurus harta dan anak mereka di kala mereka berjihad. Mereka diwajibkan shalat Jumat, kami tidak. Mereka diperintahkan mengantar jenazah, sedangkan kami tidak."

Rasulullah saw. tertegun atas pertanyaan Asma', lalu beliau berkata kepada para Sahabat, "*Perhatikan betapa bagusanya pertanyaan perempuan ini.*" Beliau melanjutkan, "*Wahai Asma'! Sampaikan jawaban ini kepada seluruh perempuan di belakangmu. Jika kalian bertanggung jawab dalam rumah tangga dan taat kepada suami, kalian dapatkan semua pahala kaum laki-laki itu.*" (HR Ibnu Abdil Bar).

Harus dipahami bahwa peran utama perempuan sebagai '*umm[un] wa rabbah al-bayt'* ini tidak menghalangi perannya di tengah masyarakat. Allah SWT berfirman:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka melakukan amar makruf nahi mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat serta menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana (QS at-Taubah [9]: 71).

Allah SWT telah menggariskan bahwa perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam melakukan amar makruf nahi mungkar di tengah masyarakat. Mereka tolong-menolong dalam menegakkan aktivitas yang menjadi pilar kehidupan bermasyarakat.

Istimewanya lagi syariah Islam telah memberikan mekanisme yang sangat jitu sehingga perempuan bisa menjalankan perannya dengan maksimal baik sebagai bagian dari keluarga maupun bagian dari masyarakat. Kaum perempuan dibebaskan dari kewajiban shalat berjamaah di masjid, bekerja, berjihad dan hukum-hukum lain yang akan berpotensi menelantarkan fungsi keibuannya. Shalat di rumahnya adalah lebih baik bagi dirinya. Mencari nafkah dibebankan kepada suami atau walinya. Begitu pula perlindungan dan keamanannya.

Islam menetapkan mekanisme yang menjamin perempuan dalam kondisi apapun mendapatkan nafkah. Mekanisme ini diawali dengan penetapan hukum perwalian laki-laki atas perempuan. Perwalian tidak hanya sekadar hak untuk menikahkan. Namun, para wali (laki-laki) berkewajiban pula untuk melindungi, mendidik dan memberikan nafkah bagi perempuan dan anak yang berada di bawah perwaliannya. Perempuan yang belum menikah, walinya yang utama adalah ayahnya. Perempuan yang sudah menikah, tugas walinya diambil alih oleh suaminya. Bila ayah atau suami tidak ada, perwalian akan berpindah kepada kerabat laki-laki dari pihak ayah sesuai dengan kedekatan hubungan kekerabatannya.

Berkaitan dengan peran perempuan di ruang publik, Islam juga telah menggariskan serangkaian

hukum yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kemuliaan perempuan. Hukum jilbab, safar dan larangan *khalwat* hakikatnya adalah untuk melindungi perempuan dari berbagai fitnah saat beraktivitas di luar rumah, menjauhkan mereka dari para pengganggu dan memastikan *ta'awun* yang terjadi antara laki-laki dan perempuan adalah *ta'awun* yang positif dan produktif.

Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur peran perempuan, melainkan juga menjamin peran tersebut dapat terealisasi dengan sempurna melalui serangkaian hukum yang bersifat praktis. Kelebihan semacam ini tidak mungkin ada kecuali pada Islam; agama yang bersumber dari Sang Pencipta manusia, Sebaik-baik Pembuat Hukum.

Pemberdayaan Perempuan Perspektif Islam

Telah sangat jelas sesungguhnya bahwa kemuliaan perempuan hanya akan terwujud jika kaum perempuan menjalankan Islam secara sempurna dalam naungan Islam. Karena itu pemberdayaan perempuan harus diarahkan bagaimana kaum perempuan mengoptimalkan seluruh peran-perannya sesuai dengan Islam dan demi kepentingan perjuangan menegakkan Islam. Bukan pada seruan kemandirian dan kesetaraan. Apalagi menjadikan mereka sebagai ujung tombak perekonomian keluarga.

Sudah saatnya kita sadar, bahwa tidak ada satu alasan pun yang membuat kaum Muslim harus ikut-ikutan mengadopsi, mempropagandakan bahkan memperjuangkan ide yang diusung oleh feminis ini, yang justru akan membawa perempuan kepada keterpurukan.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. []

Catatan kaki:

- [1] https://www.eramuslim.com/berita/nasional/survei-tragis-siswi-smp-dan-sma-di-depok-937-sudah-tidak-perawan.htm/3#.X-c_29gzY2w
- [2] <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011735501/belasan-pelajar-smp-pilih-menikah-bupati-bone-bolango-beberkan-alasannya?page=2>



MUHASABAH DIRI

M *uhâsabah* (menghisab) diri, dalam pandangan Haris bin Asad al-Muhasibi, adalah pangkal takwa. Demikian sebagaimana ia nyatakan, “Pangkal ketaatan adalah sikap *wara’* (waspada terhadap dosa). Pangkal *wara’* adalah takwa. Pangkal takwa adalah *muhâsabah* diri. Pangkal *muhâsabah* diri adalah sikap *khawf* dan *raja’* (harap dan cemas kepada Allah SWT). Pangkal *khawf* dan *raja’* adalah memahami janji dan ancaman-Nya.” (Abu Nu’aim al-Asbahani, *Hilyah al-Awliya’*, 4/282).

Pentingnya *muhâsabah* diri diungkapkan dalam kata-kata terkenal Umar bin al-Khaththab ra., “*Hisablah diri kalian sebelum dihisab (oleh Allah SWT). Timbanglah (amal) kalian sebelum ditimbang (oleh Allah SWT).*”

Generasi *salafush-shalih* adalah generasi yang terbiasa meng-*hisab* dirinya lebih keras daripada peng-*hisab*-an seseorang atas mitranya. Karena itu sebagian ulama menyatakan, “Di antara tanda yang dibenci adalah seorang hamba banyak menyebutkan aib orang lain dan melupakan aib diri

sendiri; membenci orang lain atas dasar prasangka dan mencintai diri sendiri dengan penuh keyakinan; serta tidak melakukan *muhâsabah* diri.” (Abu Thalib al-Makki, *Qût al-Qulûb*, 1/109).

Terkait *muhâsabah* diri ini, kita bisa belajar dari kisah Hanzhalah al-Usayidi, salah seorang juru tulis Rasulullah saw. Ia pernah berkisah: Abu Bakar pernah menemui aku. Lalu ia berkata, “Bagaimana keadaanmu, Hanzhalah?” Aku menjawab, “Hanzhalah kini telah jadi munafik.” Abu Bakar berkata, “*Subhanallâh*, apa yang engkau katakan?” Aku menjawab, “Kami, jika berada di sisi Rasulullah saw., teringat neraka dan surga hingga kami seperti benar-benar melihatnya. Namun, ketika kami keluar dari majelis Rasul saw. dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi banyak lalai.” Abu Bakar pun berkomentar, “Kami pun begitu.” Kemudian aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah saw. mengadukan keadaan kami. Rasulullah saw. lalu bersabda,

“Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya. Seandainya kalian mau kontinu dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidurmu dan di jalanan. Namun Hanzhalah, lakukanlah sesaat demi sesaat.” Beliau mengulangi hal itu sampai tiga kali. (HR Muslim).

Dalam pandangan Imam Hasan al-Bashri *muhâsabah* akan meringankan hisab pada Hari Akhir. Jadi tidak sepatutnya jika seorang Muslim melewati hari-harinya tanpa melakukan *muhâsabah* diri. Sebab, dengan *muhâsabah* itulah hati kita terjaga dari kelalaian, mulut terhindar dari mengucapkan keburukan dan perbuatan kita akan terpelihara dari segala maksiat dan kemunkaran. Menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Mukhtasyar Minhâj al-Qâshidîn*, berkata, “Muhâsabah diri itu sejatinya dilakukan sebelum dan setelah melakukan perbuatan.”

Muhâsabah diri tentu amat penting dilakukan oleh setiap Muslim. Bukan setahun sekali, tetapi setiap hari. Bahkan setiap waktu. Sebelum datang masanya saat ia dihisab oleh Allah SWT pada Hari Akhir nanti. Peralnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw., “*Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada Hari Kiamat sehingga ditanya tentang empat perkara: tentang umurnya, untuk apa dia habiskan; tentang masa mudanya, untuk apa digunakan; tentang hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan; dan tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmunya itu.*” (HR at-Tirmidzi).

Karena itulah, seorang Muslim sejatinya tidak bertindak atau berucap sebelum menghisab dirinya dan menimbang-nimbang apakah tindakan atau ucapannya terkategori halal atau haram. Hal itu dimaksudkan agar seluruh tindakan dan ucapannya dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-

Nya. Ia pun sejatinya memiliki waktu khusus pada malam atau siang hari untuk melakukan *muhâsabah* diri atas segala ucapan dan tindakannya. Jika telah sesuai dengan syariah, alhamdulillah. Jika ada yang menyimpang dari syariah, hendaknya ia bertobat kepada Allah SWT (Lihat: Abu Abdurrahman as-Silmi, *Thabaqât as-Sufiyyah*, 1/33).

Berkaitan dengan tobat, Allah SWT berfirman: *Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai kaum Mukmin, agar kalian beruntung* (TQS an-Nur [24]: 31).

Allah SWT pun berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang tulus. Semoga Tuhan kalian menghapus keburukan-keburukan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai...* (TQS at-Tahrim [66]: 8).

Allah SWT berfirman: *Katakanlah, “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (TQS az-Zumar [39]: 53).

Rasulullah saw. pun bersabda kepada Aisyah ra., “*Wahai manusia, bertobatlah kalian dan bersitigfarlah kepada Allah, karena sungguh aku pun bertobat kepada Allah sehari seratus kali.*” (HR Muslim).

Rasulullah saw. juga bersabda, “*Sungguh Allah SWT meluaskan tangan-Nya pada malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berdosa pada siang harinya. Allah SWT pun meluaskan tangan-Nya pada siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa pada malam harinya.*” (HR Muslim).

Semoga dengan sering *muhâsabah*, juga sering bertobat kepada Allah SWT, kita bisa meraih ridha-Nya. Amin.

Wa ma tawfiqi illa bilLah. [Arief B. Iskandar]

KEBOLEHAN KONTRAK KERJA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ».

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. bersabda: *Allah SWT berfirman, "Ada tiga golongan yang Aku menjadi lawan perkara mereka pada Hari Kiamat: laki-laki yang memberi (perjanjian atau sumpah) karena-Ku lalu dia melanggar; laki-laki yang menjual orang merdeka dan dia makan harganya; dan laki-laki yang mempekerjakan seorang ajir (pekerja) dan pekerja itu telah menunaikan (pekerjaan) untuk dirinya, tetapi dia tidak memberikan upah kepada dirinya." (HR al-Bukhari dan al-Baghawi).*

Hadis ini diriwayatkan dengan lafal sedikit berbeda dari Abu Hurairah ra., dari Rasul saw., yang bersabda:

«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ حَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ»

Allah SWT berfirman, "Ada tiga golongan yang Aku menjadi lawan perkara mereka pada Hari Kiamat dan siapa yang aku lawan perkaranya maka Aku memperkarakan dia (yaitu): laki-laki yang memberi (perjanjian atau sumpah) karena-Ku lalu dia melanggar; laki-laki yang menjual orang merdeka dan dia memakan harganya; dan laki-laki yang mempekerjakan seorang ajir (pekerja) dan pekerja itu telah menunaikan (pekerjaan) untuk dirinya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya." (HR Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Baihaqi dan Abu Ya'la).

Kedua riwayat ini dinyatakan dengan redaksi berita, tetapi maknanya adalah larangan karena berita itu dikaitkan dengan celaan atau konteksnya berupa celaan.

Larangan itu disertai *qarinah jazim*, yaitu diperkarakan oleh Rasul saw. pada Hari Kiamat kelak. Hal itu menunjukkan bahwa larangan itu bersifat tegas. Oleh karena itu apa yang diberitakan dalam riwayat ini hukumnya adalah haram.

Yang diharamkan dalam riwayat di atas ada tiga: *Pertama*, melanggar perjanjian atau sumpah karena Allah. *Kedua*, menjual orang merdeka dan memanfaatkan/memakan harganya. *Ketiga*, tidak memberikan upah kepada pekerja yang sudah menunaikan pekerjaan yang diakadkan.

Masalah yang ketiga dalam hadis ini juga diperkuat maknanya oleh riwayat lainnya. Rasul saw. bersabda:

«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ»

Berilah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah, al-Baihaqi, ath-Thabarani, Ibnu Zanjawayh, al-Qudha'iy, al-Hakim at-Tirmidzi, dan Tamam bin Muhammad).

Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur yang tidak kosong dari perawi *dha'if* atau *layin*. Namun, riwayat-riwayat itu dapat dinilai saling menjadi *syahid* dan *tabi'*. Dengan demikian

makna hadis ini dapat diterima sebagai *hujjah*. Hukum yang dinyatakan di dalam hadis ini adalah menyegerakan pemberian upah kepada pekerja.

Masih ada hadis-hadis lain yang berbicara tentang pemberian upah atas pekerja dan *ijarah* secara umum.

Kedua hadis di atas, secara *dalâlah at-tadhammun*, juga mengandung *dalalah* hukum lain yang tak terpisahkan dari hukum yang ditunjukkan itu, yaitu hukum kebolehan *ijârah al-ajîr* (kontrak kerja). Upah dan kewajiban pemberian upah kepada pekerja yang sudah menunaikan pekerjaannya hal itu tak lain muncul dari adanya kontrak kerja. Dengan demikian, keharaman tidak memberikan upah kepada pekerja itu dan perintah memberikan upah kepada pekerja yang sudah menunaikan pekerjaannya, juga mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa kontrak kerja itu boleh.

Kebolehan kontrak kerja itu juga diisyaratkan di dalam firman Allah SWT:

﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain (QS az-Zukhruf [43]: 32).

Al-Hafizh Ibnu Katsir menjelaskan, “Firman Allah “*liyattakhidza ba’dhuhum ba’dhan sukhriyan*” maknanya agar sebagian mereka menggunakan sebagian yang lain dalam berbagai pekerjaan karena yang ini memerlukan yang itu dan yang itu memerlukan yang ini. Ini dikatakan oleh as-Sudi dan lainnya.”

Secara lebih gamblang dinyatakan dalam firman Allah SWT:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) kalian untuk kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya (QS ath-Thalaq [65]: 6).

Ayat ini secara gamblang menyatakan kebolehan kontrak kerja berupa menyusui. Sebab, perintah memberikan upah kepada istri yang telah dicerai ketika dia menyusui anak untuk suaminya, baik anak dengan dia atau dengan istri yang lain, hal itu menunjukkan kebolehan kontrak kerja menyusui.

Meski ayat ini secara tekstual menyatakan “menyusui”, kebolehan kontrak kerja (*ijârah al-ajîr*) itu tidak terbatas pada menyusui saja. Penyebutan menyusui itu hanya sesuai konteks pembicaraan, namun tidak menunjukkan batasan. Apalagi kedua hadis di atas tidak menyebut pekerjaan atau manfaat yang menjadi obyeknya. Hal itu mengisyaratkan bahwa kontrak kerja itu dapat berlaku secara umum atas pekerjaan atau manfaat tentu selama pekerjaan atau manfaat itu halal.

Hadis dan ayat di atas juga menunjukkan bahwa pekerja itu menunaikan pekerjaan atau manfaat dan karenanya dia berhak mendapat upah. Kesepakatan timbal balik pekerja dengan majikannya itu merupakan akad yang mana pekerja memberikan manfaat dan majikan membrikan upah. Dari situ dapat dirumuskan pengertian kontrak kerja, yaitu akad atas manfaat dengan mendapat imbalan (upah).

Sesuai ayat dan hadis-hadis di atas, kontrak kerja itu adalah boleh. Kebolehan itu adalah selama manfaat atau pekerjaannya halal yakni tidak haram atau tidak dilarang.

WalLâh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]

BAGAIMANA STATUS “IMARAT ISLAMIYAH” YANG DIUSUNG TALIBAN?

Soal:

Dengan keberhasilan Taliban menguasai kembali Afganistan, setelah 20 tahun berperang melawan AS dan pasukan koalisi, istilah “*Imarat Islamiyyah*” yang pernah digunakan dan diterapkan Taliban kembali menguat. Bagaimana status “*Imarat Islamiyyah*” yang diusung Taliban? Apakah sama dengan Khilafah?

Jawab:

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa aspek politik yang harus dikemukakan, agar pertanyaan ini bisa dijawab dengan tepat.

Pertama: Taliban pernah berkuasa di Afganistan selama 1996 sampai 2001, atau 5 tahun. Ketika itu mereka sudah menerapkan apa yang disebut “*Imarat Islamiyyah*”, dengan menerapkan syariah Islam. Namun, dalam praktiknya, banyak penerapan hukum-hukum syariah yang tidak tepat, seperti melarang wanita bekerja, pergi ke sekolah, dan sebagainya.

Kedua: Saat berkuasa, Taliban pernah ditawarkan oleh Hizbut Tahrir, untuk mendirikan Khilafah dengan konsepnya yang sudah sangat jelas dan siap diterapkan dalam kehidupan, tetapi dengan tegas tawaran itu ditolak.

Ketiga: Taliban, sebelum diserang oleh Amerika dan koalisinya, pasca serangan WTC, 11 September 2001, telah melakukan



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

penghancuran terhadap patung Budha, yang sempat dikritik oleh para ulama, termasuk Hizbut Tahrir. Pasalnya, ini merupakan perkara mubah, yang bisa dieksploitasi oleh negara-negara kafir penjajah untuk menyerang Afganistan, dengan alasan melindungi situs purbakala internasional. Akhirnya, terbukti. Serangan itu terjadi, tepat setelah Peristiwa 11/09/2001. Ini membuktikan kesadaran politik Taliban sebagai gerakan jihad dan politik sangat lemah.

Keempat: Setelah AS dan Koalisi menduduki Afganistan, selama 20 tahun, dan berperang melawan Taliban, mereka kalah. Lebih dari 4500 tentara AS mati sia-sia. Belum lagi tentara koalisi. Karena itu AS mencari cara agar bisa keluar dari Afganistan tanpa kehilangan muka. Sejak George W. Bush Junior lengser, digantikan Obama, keputusan penarikan pasukan AS dari Afganistan dan Irak dilakukan secara bertahap.

Keputusan final akhirnya dilakukan oleh Donald Trump, setelah menandatangani Perjanjian 29/02/2020 yang lalu. Namun, AS tidak ingin terlihat kalah. Karena itu AS sebelumnya meminta bantuan Inggris. Melalui tangan Qatar, Taliban diberi fasilitas membuka Kantor Perwakilan Politikanya di Qatar. Dari sini, Taliban mulai bisa keluar melakukan hubungan dengan berbagai pihak, termasuk ke Indonesia, dengan menemui sejumlah kalangan.

Isi perjanjian itu, antara lain, AS bersedia menarik pasukannya dari Afganistan. Karena itu rezim boneka yang dibentuk AS di Afganistan kehilangan sandaran kekuasaan, karena tidak didukung umat, dan pasukan AS. Karena itu dengan mudah Taliban, yang sudah menguasai 85% wilayah, akhirnya berhasil

menguasai Kabul dan Istana Presiden Asyraf Ghani. Sang Presiden pun kabur dari sana.

Kelima: Setelah Taliban berkuasa, pada masa transisi ini, Taliban telah mengumumkan bentuk pemerintahannya, yaitu “*Imarat Islamiyyah*”, sebagaimana dulu pernah mereka terapkan selama 5 tahun. Namun, karena pengalaman buruk pada masa lalu, banyak muncul kekhawatiran. Karena itu Taliban melakukan berbagai kunjungan ke sejumlah instansi pemerintahan, termasuk menemui bekas Presiden sebelumnya, Hamid Karzai, yang notabene adalah antek Amerika.

Taliban saat ini memang melunak. Tidak seperti Taliban yang dulu. Karena itu “*Imarat Islamiyyah*” yang saat ini hendak diterapkan kemungkinan akan berbeda wajahnya dengan “*Imarat Islamiyyah*” yang dulu pernah mereka terapkan. Hanya saja, ada satu hal yang sama, lemahnya kesadaran politik dan pemahaman Taliban terhadap “Islam Politik” yang hendak diterapkan.

Keenam: Masuknya Cina, Rusia dan tekanan dunia internasional kepada Taliban, ditambah dengan lemahnya kesadaran politik dan pemahaman Taliban terhadap “Islam Politik” yang hendak diterapkan, dikhawatirkan akan membelokkan Taliban dari visi dan misi perjuangannya, memenangkan Islam dan kaum Muslim. Bukan sekadar berkuasa kembali. Apalagi melakukan Sinkretisme Islam dengan Sekularisme.

Tentu kita tetap berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka dari berbagai jebakan setan yang terkutuk, baik dari kalangan jin maupun manusia. Dengan demikian kemenangan yang mereka raih tidak berujung pada kesia-siaan.

Karena itu berdasarkan fakta-fakta di atas, kita bisa menyimpulkan:

Pertama, “*Imarat Islamiyyah*” yang pernah diterapkan 5 tahun, antara 1996-2001, ketika Taliban berkuasa, jelas berbeda dengan

Taliban saat ini memang melunak. Tidak seperti Taliban yang dulu. Karena itu “*Imarat Islamiyyah*” yang saat ini hendak diterapkan kemungkinan akan berbeda wajahnya dengan “*Imarat Islamiyyah*” yang dulu pernah mereka terapkan. Hanya saja, ada satu hal yang sama, lemahnya kesadaran politik dan pemahaman Taliban terhadap “Islam Politik” yang hendak diterapkan.

Khilafah. Perbedaannya:

- 1- Khilafah adalah Negara Islam untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sebaliknya, “*Imarat Islamiyyah*” adalah negara yang diklaim menerapkan Islam, hanya untuk wilayah tertentu, yaitu Afganistan.
- 2- Khilafah dipimpin oleh seorang Khalifah, yang dipilih oleh seluruh kaum Muslim di seluruh dunia. Sebaliknya, “*Imarat Islamiyyah*” dipimpin oleh seorang Amir, yang dipilih oleh rakyat di wilayah tertentu. Bahkan lebih spesifik lagi, dipilih oleh kalangan tertentu di kalangan mereka, baik yang disebut *Ahlul Halli wa al-'Aqdi*, maupun yang lain.
- 3- Dalam praktiknya, “*Imarat Islamiyyah*” telah menerapkan syariah Islam meski tidak sempurna. Termasuk adanya sejumlah kesalahan dalam penerapannya, seperti larangan perempuan bekerja dan pergi ke sekolah. Berbeda dengan Khilafah ‘ala



Minhaj Nubuwwah, yang menerapkan syariah Islam secara *kaffah* dan sempurna. Karena itu kesalahan-kesalahan dalam penerapan syariah Islam seperti ini, insya Allah, tidak akan terjadi.

Kedua, adapun “*Imarat Islamiyyah*” yang akan mereka terapkan saat ini, jika faktor kelemahan kesadaran politik dan pemahaman Taliban terhadap “Islam Politik” yang hendak diterapkan masih ada, ditambah tingginya tekanan dunia internasional, dan agen-agen mereka di dalam negeri, maka tidak menutup kemungkinan kompromi politik akan dilakukan, meski hasilnya, tetap dengan menggunakan nama “*Imarat Islamiyyah*”.

Jika ini sampai terjadi maka bentuk “*Imarat Islamiyyah*” Taliban ke depan justru semakin jauh dari Islam. *Fa al-‘iyadzu billah*. Kalau begitu, di mana masalahnya?

1- Sinkretisme Islam dengan Sekularisme.

Apalagi dengan melabelinya dengan label Islam. Ini jelas haram. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Janganlah kalian mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan serta menutupi kebenaran, sementara kalian tahu (QS al-Baqarah [2]: 42).

2- Islam wajib diterapkan secara *kaffah*, tidak boleh setengah-tengah

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh kalian yang nyata (QS al-Baqarah [2]: 208).

Jika mereka berjuang karena Allah, dan benar-benar ingin menerapkan Islam secara *kaffah*, maka dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Dengan catatan, mereka harus mempunyai kesadaran politik dan pemahaman terhadap “Islam Politik” yang hendak diterapkan dengan benar, jelas dan jernih. Jika semuanya itu ada, dengan izin dan pertolongan Allah, mereka akan menemukan Islam yang hendak mereka terapkan.

Selebihnya, apakah kelak “*Imarat Islamiyyah*” Taliban akan menerapkan Islam secara *kaffah*, hingga menjadi tonggak tegaknya Khilafah, atau tidak, kembali kepada para pejuang yang ikhlas. Jika mereka berjuang karena Allah, dan benar-benar ingin menerapkan Islam secara *kaffah*, maka dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Dengan catatan, mereka harus mempunyai kesadaran politik dan pemahaman terhadap “Islam Politik” yang hendak diterapkan dengan benar, jelas dan jernih. Jika semuanya itu ada, dengan izin dan pertolongan Allah, mereka akan menemukan Islam yang hendak mereka terapkan.

Namun, jika tidak, mereka akan kembali kalah, setelah mendapatkan kemenangan dalam perang 20 tahun. Kekalahan yang mungkin tidak mereka sadari. Sebaliknya, kaum kafir penjajah akan meraih kemenangan yang tidak bisa mereka raih melalui peperangan panjang.

Wallahu a'lam. []

MAFHUM AL-MUKHALAFAH - MAFHUM AL-GHAYAH

مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ - مَفْهُومُ الْغَايَةِ

Mafhûm adalah *dalâlah* lafal bukan pada posisi prononsiasi atau pengucapan, yakni *dalâlah* atau penunjuk lafal pada posisi diam (*fi mahalli as-sukût*). Dengan kata lain, *mafûm* adalah makna yang tidak diucapkan (*ma'nâ al-maskût 'anhu*).

Mafhûm merupakan bagian dari *dalalah* lafal (*dalâlah al-lafzhiyyah*) dalam bentuk *dalâlah al-iltizâm*. Artinya, *mafûm* itu merupakan makna yang menjadi kelaziman dari makna yang diucapkan. Jika makna lazim itu bertentangan (*mukhâlafah*) dengan makna yang terucapkan, disebut *mafûm al-mukhâlafah*.

Menurut Imam al-Amidi (w. 631 H) di dalam *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, *mafûm al-mukhâlafah* adalah apa yang *madlul* lafal pada posisi diam berlawanan untuk *madlul* nya pada posisi pengucapan. Al-'Allamah

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah* Juz 3, setelah menyatakan hal yang sama, beliau menjelaskan, *mafûm al-mukhâlafah*, yakni bahwa makna dan hukum yang dipahami dari *madlul* lafal berlawanan (*mukhâlifan*) untuk apa yang dipahami dari lafal itu sendiri. Jadi makna lazim untuk *madlul* lafal itu, jika berlawanan untuk *madlul* tersebut, maka itu adalah *mafûm al-mukhâlafah*.

Imam Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H) di dalam *Bahru al-Muhîth fi Ushûl al-Fiqhi* mengatakan, *mafûm al-mukhâlafah* adalah penetapan lawan hukum yang diucapkan (*al-manthûq*) untuk yang tidak diucapkan (*al-maskût*).

Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) di dalam *Irsyâdu al-Fuhûl* menjelaskan bahwa *mafûm al-mukhâlafah* yang mana yang tidak diucapkan (*al-maskût 'anhu*) berlawanan



untuk yang disebutkan dalam hal hukum baik berupa penetapan (*itsbât[an]*) atau penafian (*nafy[an]*), sehingga ditetapkan untuk yang tidak diucapkan (*al-maskût 'anhu*) lawan dari hukum yang diucapkan (*al-manthûq bihi*).

Menurut Abdul Karim bin Ali an-Nimlah di dalam *Al-Muhadzdzab fi 'ilmi Ushûl al-Fiqhi al-Muqâran*, *mafhûm al-mukhâlafah* adalah *dalalah* lafal terhadap *tsubut*-nya hukum untuk yang tidak diucapkan (*al-maskût 'anhu*) berlawanan untuk hukum yang ditunjukkan oleh yang diucapkan (*al-manthûq*), secara penafian (*nafy[an]*) dan penetapan (*itsbât[an]*). Juga dikatakan, *mafhûm al-mukhâlafah* adalah *istidlal* dengan pengkhususan sesuatu dengan penyebutannya terhadap penafian hukum dari selainnya. Maknanya, jika sesuatu dikhususkan dengan disebutkan dan diucapkan serta dinyatakan hukumnya, maka kita ber-*istidlal* dengan hal itu bahwa yang tidak diucapkan (*al-maskût 'anhu*) adalah berlawanan dengannya dalam hukum. Jika yang diucapkan menetapkan hukumnya maka yang tidak diucapkan, hukum itu dinafikan darinya. Jika yang diucapkan menafikan hukumnya maka yang didiamkan, hukum itu ditetapkan untuknya.

Jumhur ulama menggunakan istilah *mafhûm al-mukhâlafah*. Sebagian lainnya seperti Ibnu Furak menggunakan istilah *dalîl al-khithâb*. Menurut Ibnu an-Najar al-Hanbali (w. 972 H) di dalam *Syarhu al-Kawkabu al-Munîr (Mukhtashar at-Tahrîr)*, disebut *dalîl al-khithâb* karena *dalalah*-nya termasuk jenis *dalalah al-khithâb* atau karena *khithab* menunjukkannya atau karena berlawanannya dengan *manthûq (manzhûm) al-khithâb*.

Para ulama berbeda pendapat tentang jenis-jenis *mafhûm al-mukhâlafah*. Ada yang berpendapat jenisnya ada empat, lima, sepuluh, dua belas dan lainnya. Di antaranya: *mafhûm shifat*, *syarth*, 'adad, *ghâyah*, *al-laqab*, *al-ismu*, *az-zamân*, *al-makân*, *al-hashr*, *al-*

istitsnâ', *lafzhul innamâ*, dsb.

Hanya saja, menurut Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Juz 3 dan Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, yang berlaku dalam *mafhûm al-mukhâlafah* hanya empat, yaitu: *mafhûm al-ghâyah*, *mafhûm ash-shifat*, *mafhûm asy-syarth* dan *mafhûm al-'adad*.

Mafhûm al-Ghâyah.

Menurut Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Juz 3, *mafhûm al-ghâyah* adalah pengaitan hukum dengan *ghâyah*. Jika hukum dibatasi dengan *ghâyah* maka itu menunjukkan atas penafian hukum tersebut setelah *ghâyah* itu.

Ibnu Najar di dalam *Syarhu al-Kawkabu al-Munîr (Mukhtashar at-Tahrîr)* dan Imam Asy-Syaukani di dalam *Irsyâdu al-Fuhûl* mendefinisikan *mafhûm al-ghâyah* adalah pembentangan hukum dengan *ilâ* dan *hattâ*. *Ghâyah* dari sesuatu adalah akhir atau ujungnya. Ibnu an-Najar mengatakan bahwa ini lebih kuat dari *mafhûm asy-syarth* dari sisi *dalâlah*, sebab mereka (para ulama ushul) sepakat atas penamaannya sebagai *huruf al-ghâyah*, dan *ghâyah* sesuatu adalah akhirnya. Seandainya hukum tetap berlaku sesudahnya niscaya penamaannya sebagai *ghâyah* tidak berfaedah.

Mafhûm al-ghâyah juga diartikan bahwa pembatasan oleh *Asy-Syâri'* untuk hukum dengan *ghâyah* menunjukkan penafian hukum tersebut pada apa setelah *al-ghâyah*. Sebab, apa setelah *al-ghâyah* membuat pertanyaan tentangnya tercela. Hal itu karena jawabannya telah dipahami tanpa perlu pertanyaan itu. Ini karena *ghâyah* sesuatu adalah akhirnya dan akhir sesuatu adalah pemutusannya. Sudah diketahui bahwa sesuatu itu jika terputus dan berakhir maka menjadi khusus dengan hukum



itu dan apa yang sesudahnya menjadi dengan hukum lain, yaitu lawannya (Abdul Karim bin Ali an-Nimlah, *Al-Jâmi' li Masâ'ili Ushûl al-Fiqhi wa Tathbîqatuhu 'alâ Madzhabi ar-Râjih*).

Imam Asy-Syafi'i di dalam *Al-Umm* menyatakan, apa yang Allah jadikan untuknya *al-ghâyah*, maka hukum setelah berlalunya *al-ghâyah* berbeda dengan sebelum berlalunya *al-ghâyah*.

Mañûm al-ghâyah itu juga diamalkan oleh para pengkritik *mañûm al-mukhâlafah*. Al-Qadhi Abu Syuja' berkata di dalam *A-Taqrîb*, "Sebagian besar pengkritik *dalîl al-khithâb* berpendapat bahwa pembatasan dengan huruf *al-ghâyah* menunjukkan penafian hukum dari apa yang di belakang *al-ghâyah*. Karena itu mereka bersepakat atas penamaannya *huruf al-ghâyah* dan *ghâyah* sesuatu adalah akhirnya. Seandainya hukum tetap berlaku setelahnya maka penamaannya dengan *ghâyah* tidak berfaedah. Pengaitan hukum dengan *al-ghâyah* dibuat untuk menunjukkan bahwa apa yang sesudah *al-ghâyah* berlawanan dengan yang sebelumnya.

Contoh *mañûm al-mukhâlafah* dari *mañûm al-ghâyah* adalah firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan shalat, basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku (QS al-Maidah [5]: 6).

Manthûq-nya, wajib membasuh tangan sampai siku. *Mañûm al-mukhâlafah*-nya, apa yang sesudah siku tidak wajib dibasuh.

Contoh lainnya, firman Allah SWT tentang wanita yang sedang haid:

﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾

Janganlah kalian mendekati mereka sebelum

Al-Qadhi Abu Syuja' berkata di dalam *A-Taqrîb*, "Sebagian besar pengkritik *dalîl al-khithâb* berpendapat bahwa pembatasan dengan huruf *al-ghâyah* menunjukkan penafian hukum dari apa yang di belakang *al-ghâyah*. Karena itu mereka bersepakat atas penamaannya *huruf al-ghâyah* dan *ghâyah* sesuatu adalah akhirnya. Seandainya hukum tetap berlaku setelahnya maka penamaannya dengan *ghâyah* tidak berfaedah. Pengaitan hukum dengan *al-ghâyah* dibuat untuk menunjukkan bahwa apa yang sesudah *al-ghâyah* berlawanan dengan yang sebelumnya.

mereka suci (QS al-Baqarah [2]: 222).

Manthûq-nya, larangan menggauli istri sebelum berhenti haid. *Mañûm al-mukhâlafah*-nya, boleh menggauli istri setelah suci, yakni berhenti haidnya.

Contoh lain, sabda Rasul saw.:

﴿مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَشْبِطَهُ﴾

Siapa yang membeli makanan maka jangan dia jual sampai dia memegang (menerimanya) (HR asy-Syafi'iy, Ahmad, al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

Manthûq-nya tidak boleh menjual makanan sebelum dipegang (diterima). *Mañûm al-mukhâlafah*-nya, setelah dipegang, yakni diterima, makanan yang dibeli boleh dijual.

Contoh lainnya, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan Aisyah menuturkan,



Rasul saw. bersabda:

«لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّىٰ يُحُولَ عَلَيْهِ الْهَوْلُ»

Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu atasnya satu haul (satu tahun hijrah) (HR asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Manthûq-nya, sebelum berlalu satu haul atas kepemilikannya harta zakat, maka tidak ada zakat atasnya. *Mafhûm al-mukhâlafah*-nya, jika sudah berlalu satu tahun hijriyah atas kepemilikan harta zakat maka di dalamnya ada kewajiban zakat.

Dari sini jelas bahwa *mafhûm al-mukhâlafah* dari *mafhûm al-ghâyah* itu ada dan berlaku. Dalil bahwa *mafhûm al-ghâyah* diamalkan adalah bahwa hukum yang dinyatakan *ghâyah* (ujung)-nya dengan kata *ilâ* atau *hattâ* maka hukum itu *tsâbit* (berlaku) untuk sebelum *ghâyah* dan dinafikan dari apa yang sesudah *ghâyah* itu. Firman Allah SWT:

﴿ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam (QS al-Baqarah [2]: 287).

Maknanya, setelah masuk malam maka tidak ada puasa. Dalilnya adalah sabda Rasul saw.:

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»

Orang-orang akan terus baik selama mereka menyegerakan berbuka (HR asy-Syafi'i, Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi).

Dengan dalil larangan atas puasa *wishal* (menyambung puasa hingga malam).

Begitu pula semua nas yang dinyatakan ujungnya dengan *hattâ* atau *ilâ* maka datang hukum apa yang sesudah *ghâyah* itu berlawanan dengan yang sebelumnya. Ini

Begitu pula semua nas yang dinyatakan ujungnya dengan *hattâ* atau *ilâ* maka datang hukum apa yang sesudah *ghâyah* itu berlawanan dengan yang sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa *mafhûm al-mukhâlafah* dengan *al-ghâyah* itu diamalkan. Hal itu dipertegas bahwa pembatasan hukum dengan *al-ghâyah*, seandainya itu tidak memiliki *mafhûm al-mukhâlafah* maka pembatasan dengan *al-ghâyah* itu niscaya tidak punya faedah, dan ini menyalahi fakta dan menyalahi yang ditempuh di dalam al-Quran.

menunjukkan bahwa *mafhûm al-mukhâlafah* dengan *al-ghâyah* itu diamalkan.

Hal itu dipertegas bahwa pembatasan hukum dengan *al-ghâyah*, seandainya itu tidak memiliki *mafhûm al-mukhâlafah* maka pembatasan dengan *al-ghâyah* itu niscaya tidak punya faedah, dan ini menyalahi fakta dan menyalahi yang ditempuh di dalam al-Quran. Sebab faktanya, hukum itu dinafikan dan penafian itu hasil dari *mafhûm al-mukhâlafah* untuk *al-ghâyah*. Apa yang berlaku di dalam al-Quran bahwa semua huruf atau kata yang disebutkan di dalam al-Quran itu, disebutkan untuk faedah tertentu dan tidak ada sesuatu yang sifatnya tambahan tanpa faedah sama sekali. Tidak diamalkannya *mafhûm al-mukhâlafah* untuk *al-ghâyah* membuat penyebutannya di dalam al-Quran menjadi sia-sia dan itu tidak boleh. Oleh karena itu *mafhûm al-ghâyah* itu diamalkan.

Wallâh a'lam wa *ahkam*. [Yoyok Rudianto]

AMERIKA MEMIMPIN KEMUNDURAN BARAT

Umat Islam Harus Memanfaatkan Kesempatan Ini (Bagian 2-Habis)

Abdul Majeed Bhatti

AS Menghadapi Kontraksi Ekonomi

Ekonomi Amerika bernasib lebih baik daripada sistem politiknya. Ekonomi Amerika adalah yang terbesar di dunia dengan PDB 21,4 triliun dolar. Bahkan Amerika menikmati bagian terbesar dari ekonomi global, sebesar 25%.^[24] Sedang dolar Amerika merupakan mata uang cadangan yang tak terbantahkan di dunia, dan secara luas digunakan untuk menyelesaikan transaksi lebih dari mata uang lainnya. Sementara perusahaan-perusahaan Amerika mendominasi daftar 20 perusahaan terbesar.^[25] Amerika juga memiliki pendapatan per kapita tertinggi di antara negara-negara Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).^[26] Namun terlepas dari dominasi ekonomi ini, kekuatan ekonomi Amerika telah berkontraksi selama bertahun-tahun.

Pada tahun 1960, bagian Amerika dari ekonomi global mencapai 40% dan selama bertahun-tahun—namun karena semakin banyak negara berusaha untuk menduduki posisi ekonomi global—ekonomi AS turun hampir setengah dari jumlah ini.^[27] Ekonominya masih tetap kuat karena sistem dolar, tetapi mengalami

penurunan daya beli yang mencolok karena efek kumulatif inflasi, di mana satu dolar pada tahun 1960 setara dengan daya beli sekitar 8,84 dolar hari ini, dengan peningkatan sebesar 7,84 dolar lebih dari 61 tahun. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, harga hari ini 884% lebih tinggi dari harga rata-rata pada tahun 1960.^[28] Diperkirakan bahwa daya beli dolar akan menurun lebih jauh dengan dimulainya rencana stimulus Biden senilai 1,9 dolar triliun. Fortune Global 500 tidak lagi mencerminkan dominasi perusahaan-perusahaan Amerika. Pada tahun 2020, Global Fortune 500 membanggakan 133 perusahaan China, dan 121 perusahaan Amerika—hanya 2 perusahaan AS yang berhasil masuk 10 Besar.^[29] Terakhir, penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang di Amerika menimbulkan keraguan baru pada validitas indeks yang mengukur pendapatan perkapita AS. Untuk pertama kalinya, rata-rata pendapatan perkapita AS mencapai 63.000 dolar pada tahun 2019—tetapi setelah disesuaikan dengan inflasi, pendapatan itu hanya berada di level 1999 dolar saja.^[30] Sementara itu, 1% orang terkaya di Amerika telah memperkaya diri mereka

sendiri secara signifikan dengan menghasilkan 50 dolar triliun dari 90%,^[31] dan jika tren seperti itu terus berlanjut—terutama perampasan kekayaan oleh kapitalis Amerika dari ultra-kaya—kekuatan ekonomi Amerika akan menjadi kurang kredibel dan efektif, dan akan menimbulkan pergolakan domestik, seperti yang dikatakan Ibn Khaldun dan Turchin.

Biaya Militer Makin Meningkat

Terlepas dari adanya 800 pangkalan militer di 70 negara dan wilayah, dan pengeluaran militer tahunan sebesar 734 dolar miliar—hampir 3 kali lipat dari saingan terdekatnya China—kekuatan militer AS memudar.^[32, 33] Pada tahun 2010, Pentagon secara resmi tidak memprioritaskan pertempuran dua perang simultan di dua teater operasi militer yang berbeda dari doktrin perangnya. Pada tahun 2010, Tinjauan Pertahanan Empat Tahunan (QDR) tidak lagi memandang “persyaratan dua perang sebagai faktor fundamental dalam menentukan komposisi kekuatan.”^[34] Keunggulan militer AS selama puluhan tahun atas negara lain, serta kemampuannya untuk menghalangi dan mengalahkan musuh, juga telah berkurang. Pada tahun 2018, sebuah komisi independen terdiri dari dua partai menunjukkan tentang strategi pertahanan Amerika bahwa “keunggulan militer Amerika telah berkurang” dan “keraguan tentang kemampuan Amerika untuk melindungi, jika perlu, mengalahkan lawan dan menepati komitmen globalnya.”^[35] Ada komplikasi tambahan yang tercermin pada kemampuan Amerika untuk melakukan perekrutan baru, di mana minat di kalangan anak muda untuk bertugas di militer AS telah jatuh ke titik terendah sepanjang masa, dan situasinya menjadi sangat buruk sehingga hanya untuk mendukung Angkatan Darat dan Korps Marinir AS, keduanya menggunakan cara kenaikan gaji dan skema bonus yang luar biasa untuk menarik kaum muda.^[36] Dalam hal ini tidak ada keraguan bahwa kinerja militer Amerika yang buruk di Afghanistan dan Irak berkontribusi pada penurunan kekuatan militer AS. Jika tren ini terus

berlanjut, maka perang dengan negara-negara yang tidak kecil, seperti Rusia dan China, maka akan sangat menjadi ujian keras bagi kekuatan militer Amerika, yang membuatnya tidak mungkin menang. Namun, ancaman yang lebih mendesak berasal dari biaya ekonomi dan politik yang diperlukan untuk mempertahankan keterlibatan militer di luar negeri seperti yang disoroti oleh Kennedy. Disfungsi politik di dalam negeri dikombinasikan dengan pengaruh ekonomi yang surut diperkirakan akan mengganggu komitmen militer Amerika di luar negeri.

Munculnya Kekuatan Besar yang Lain

Jelas bahwa Amerika tengah menghadapi penurunan relatif dalam kekuatan ekonomi dan militer, serta diperburuk oleh sistem politik yang rusak. Ini juga mempengaruhi kemampuan Amerika untuk membujuk Eropa mengenai isu-isu kunci dan untuk mencegah negara-negara revisionis seperti Rusia dan China. Hubungan transatlantik telah menjadi landasan tatanan politik Amerika sejak tahun-tahun pasca perang. Eropa telah dengan sukarela menarik garis Amerika pada sejumlah besar masalah, dan memberikan dukungan kepada tindakan Amerika bila diperlukan. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet perbedaan di antara mitra transatlantik muncul pada sejumlah isu penting seperti arah ekspansi Uni Eropa, misi baru NATO, peningkatan unilateralisme Amerika dalam urusan internasional, kebijakan terhadap selatan global dan sebagainya. Perang pilihan melawan Afghanistan dan Irak menambah kekecewaan Eropa yang membara pada Amerika. Pada tahun 2003, Dominique Moisi, wakil direktur Institut Hubungan Internasional Prancis yang berbasis di Paris menyatakan “apa yang kita saksikan adalah munculnya dua Barat—Barat Amerika dan Barat Eropa—dengan kepekaan dan emosi yang berbeda.”^[37] Krisis keuangan global yang didahului oleh krisis zona Euro, krisis utang Yunani, perang mata uang dan ketidaksepakatan atas penghematan versus stimulus moneter memperparah hubungan antara keduanya.

Musim semi Arab dan krisis pengungsi Suriah semakin mengikis kepercayaan dalam hubungan transatlantik.

Setelah naiknya Trump, hubungan itu mencapai titik terendah sepanjang masa. Tekad Trump bagi Eropa untuk meningkatkan bagiannya dari beban keuangan NATO dan ketidakpatuhannya pada Pasal 5 organisasi itu menuai kritik tajam dari sekutu. Berbicara tentang penolakan Trump menegaskan kembali janji Amerika untuk melindungi Eropa, Kanselir Merkel mengatakan, “Saat-saat di mana kita dapat sepenuhnya bergantung pada orang lain dalam perjalanan keluar... Kita orang Eropa harus mengambil takdir kita ke tangan kita sendiri”.^[38] Trump tanpa malu melanjutkan omelannya terhadap Eropa. Dia secara terbuka mendukung Brexit dan disintegrasi UE, menegur Macron karena menyarankan Eropa membutuhkan pasukan untuk mempertahankan diri dari Amerika dan memicu perang dagang.^[39] Eropa bereaksi dengan mengabaikan kekhawatiran AS dan berkomitmen untuk menandatangani kesepakatan perdagangan yang komprehensif dengan China, mereka mengetahui sepenuhnya bahwa Trump akan keluar dari Gedung Putih. Hubungan transatlantik yang rusak parah telah membuat kerja sama menjadi sangat bermasalah—suatu hal yang ditekankan oleh Dalio. Macron dan Merkel mengingatkan Biden—pada pertemuan publik pertamanya—bahwa aliansi Prancis-Jerman akan menjaga otonomi dan kepentingan Eropa. Pada pertemuan itu, Macron menekankan “otonomi strategis” dari AS, sementara Merkel membela perjanjian perdagangan yang dicapai dengan China yang menyatakan “kepentingan kita tidak akan selalu bertemu”.^[40] Ada sedikit optimisme bahwa hubungan antara benua Eropa dan Amerika akan membaik dalam waktu dekat.

Hubungan Amerika dengan Rusia juga anjlok ke titik terendah baru—tidak terlihat sejak tahap awal Perang Dingin—setelah menghadapi sejumlah batu sandungan selama bertahun-tahun. Tidak terpengaruh oleh asimetri kekuasaan, Rusia telah menantang keunggulan Amerika dan

mendorong kembali pengaruh Amerika di Kaukasus, Ukraina dan Asia Tengah. Pada tahun 2008, Rusia menginvasi Georgia dan menduduki Ossetia Selatan, pada tahun 2014 mencaplok Krimea dan mengobarkan perang di Ukraina untuk menciptakan lingkup pengaruhnya sendiri di bagian timur negara itu. Rusia mampu mencapai ini, sambil menghadapi sanksi keras dan hukuman dari Barat. Di Asia Tengah, Rusia berhasil menggulingkan pengaruh Amerika di Uzbekistan dan Kirgistan. Mantan Menteri Pertahanan AS, Robert Gates menulis di *The Wall Street Journal*, tentang kekuasaan baru Rusia, dia berkata: “Kami ingin Rusia menjadi mitra, tetapi itu sekarang jelas tidak mungkin dilakukan di bawah kepemimpinan Putin. Dia telah memberikan tantangan yang tidak terbatas pada Krimea atau bahkan Ukraina. Tindakannya menantang seluruh tatanan pasca-Perang Dingin”.^[41] Rusia lebih jauh membuat Barat khawatir dengan memotong pasokan gas ke Eropa selama bulan-bulan musim dingin yang keras, melakukan pembunuhan yang berani di tanah asing dan mencampuri pemilihan Amerika dan Eropa. Tampilan Rusia dari persenjataan siber canggih dan perangkat keras militer canggih dalam konflik Suriah dan di tempat lain mengungkapkan kepada pembuat kebijakan Amerika bahwa Rusia memiliki kecenderungan untuk menantang hegemoni Amerika di bidang-bidang tertentu.

Pertanyaannya: Bagaimana Amerika membiarkan ini terjadi? Bisa dibayangkan di tahun 90-an Amerika berada di puncak kekuatan ekonomi dan militernya, serta menikmati supremasi global sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Sementara Rusia berada di tengah-tengah krisis ekonomi dan politik yang mendalam. Rusia—yang tengah dalam pendarahan akibat pinjaman IMF—dalam posisi yang tidak dapat menghentikan ekspansi UE dan NATO ke bekas Eropa Timur. Juga, Kremlin tidak dapat mencegah Amerika menggusur pengaruh Rusia di Balkan. Hilangnya kapal selam Kursk (K-141) di Laut Barents pada tahun 2000, dan ketidakmampuan Kremlin untuk menyelamatkan awaknya menunjukkan seberapa jauh Rusia telah jatuh dari

status kekuatan supernya.^[42] Namun, selama dua dekade, Rusia dengan populasi yang menua dan ekonomi yang lemah mampu menegaskan kembali dirinya dan menantang Amerika. Kekuasaan yang sempit (hanya kekuatan militer) Rusia menunjukkan bahwa AS yang disibukkan oleh perang-perang yang membawa bencana di Afghanistan dan Irak, serta krisis keuangan global tidak mampu melawan perang Rusia secara spesifik di wilayah tertentu di dunia. Yang pasti Rusia tidak dapat menggeser kepemimpinan global Amerika, tetapi itu pasti dapat mengganggu rencana Amerika dan menggerogoti keunggulan Amerika di Eurasia.

Yang juga patut dipertanyakan adalah upaya AS untuk menahan kebangkitan China di Asia Pasifik. Sejak pertengahan tahun sembilan puluhan, Washington menganggap China sebagai musuh terbesar Amerika. Pemerintah AS berturut-turut bekerja dengan cermat untuk mencoba dan menjaga agar China tetap lumpuh di dalam perbatasannya melalui berbagai tindakan. AS melibatkan China dengan pembicaraan nuklir Korea Utara yang berlarut-larut—dengan sengaja menghindari penyelesaian permanen. Pada saat yang sama, Amerika mengeksploitasi pelanggaran hak asasi manusia China di Tibet, Xinjiang dan perlakuan terhadap kelompok agama Falun Gong untuk mendiskreditkan kepemimpinan China dan tetap fokus ke dalam.

Amerika menjadikan India benteng untuk menentang ekspansi China ke Barat. Washington meletakkan dasar bagi perang masa depan antara kedua negara dengan mendorong India untuk merombak kemampuan militer dan nuklirnya. Dalam upaya untuk mencegah ekspansi angkatan laut China, AS memasukkan India ke dalam Dialog Keamanan Segiempat (QSD). Dalam dekade terakhir, QSD—Amerika, India, China, dan Jepang—telah melakukan banyak latihan angkatan laut untuk mengirim pesan yang tidak menyenangkan ke Beijing agar tidak menjelajah di luar rantai pulau pertama dan kedua—tujuannya adalah untuk mengampulasi kaki laut China

sebelum mereka tumbuh. Washington juga mendorong Vietnam, Filipina, dan Jepang untuk melibatkan China dalam sengketa wilayah yang sia-sia di Timur dan Laut China Selatan. Namun, andalan pengaruh Amerika atas China adalah Taiwan—ahli strategi Amerika memandang pulau itu sebagai kapal induk yang tidak dapat tenggelam—yang didukung AS dengan peralatan militer untuk menggagalkan segala upaya aneksasi dari daratan utama. Di sisi lain, China menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari satu China, dan sumber penghinaan besar selama pulau itu tetap berada di orbit Amerika.

Terlepas dari inisiatif keras Amerika yang dimaksudkan untuk menopang penahanan China, Beijing mampu mengatur negara itu pada jalur meteorik menuju dominasi regional. China dengan cepat naik menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 2010 menyalip Jepang, dan saat ini menikmati 17% dari PDB global, China berada di posisi kedua setelah AS.^[43, 44] Dalam kurun waktu tiga dekade, ekonomi China sebagai persentase dari PDB nominal AS tumbuh dari 6% pada tahun 1990 menjadi 67% pada tahun 2019.^[45, 46] Sementara PDB Uni Soviet yang pada puncaknya hanya 50% saja dari AS, dapat secara efektif bersaing dengan Amerika untuk supremasi global.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, kecakapan teknologi China meningkat secara substansial, terutama dalam 5G dan kecerdasan buatan. Ketua Alphabet Eric Schmidt terus-menerus memperingatkan tentang China yang menyalip AS dalam bidang kecerdasan buatan.^[47] Di bidang militer, China membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi kesenjangan dengan Amerika. Pada tahun 2000, Departemen Pertahanan AS (DoD) mencatat “pasukan darat, udara, dan angkatan laut PLA cukup besar, tetapi sebagian besar sudah usang”.^[48] Dua puluh tahun kemudian, DoD mengamati bahwa “China telah menyusun sumber daya, teknologi, dan kemauan politik selama dua dekade terakhir untuk memperkuat dan memodernisasi PLA dalam hampir segala hal. China sudah di depan AS di bidang-bidang

tertentu”.^[49] Peningkatan ekstensif dalam kemampuan militer China benar-benar mengkhawatirkan bagi ahli strategi militer AS.

Mungkin cacat dalam strategi penahanan China terletak pada keyakinan yang salah, bahwa dengan membatasi ambisi teritorial China dan secara bersamaan mengintegrasikan ekonomi China ke dalam sistem ekonomi global yang didominasi Barat akan memungkinkan AS untuk mendemokratisasikan dan mengelola kebangkitan China. Pada tahun 2000, Presiden Clinton membuat hubungan eksplisit antara pertumbuhan ekonomi dan promosi demokrasi sambil mendukung masuknya China ke WTO. Dia berkata, “Akibat bergabung dengan WTO, maka China setuju untuk mengimpor salah satu nilai demokrasi yang paling dihargai, yaitu kebebasan ekonomi. Semakin China meliberalisasi ekonominya, semakin membebaskan potensi rakyatnya”.^[50] Dengan cerdas China membuka ekonominya sesuai dengan buku pedomannya sendiri—pertumbuhan ekonomi yang spektakuler tanpa harus PKC hilang kendali kekuasaan. Sementara Amerika membutuhkan satu dekade atau lebih, sebelum dapat menanggapi kesalahan dalam kebijakan penahanan China.

Pada tahun 2012, Presiden Obama mengumumkan strategi poros AS ke Asia yang telah lama ditunggu-tunggu, yang terutama terdiri dari reposisi 60% armada angkatan laut Amerika dari Eropa ke Asia Pasifik. Presiden Trump mengikuti pendahulunya dan memulai perang dagang dengan China yang secara khusus menargetkan industri teknologi tinggi China. Namun, sampai sekarang, tidak satu pun dari langkah-langkah ini telah merusak kemajuan China.

Beberapa pengamat seperti Dalio melihat kegagalan Amerika untuk menahan China, sebagai bukti bahwa China akan menggantikan Amerika untuk memimpin dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang lain, seperti Fareed Zakaria dari CNN memperkirakan bahwa AS dan China akan menetapkan pengaturan bipolaritas yang mirip dengan AS-Soviet.^[51] Pendapat ini

didasarkan pada penilaian ulang kekuatan Amerika dan penurunan yang dirasakan.

Faktanya, beberapa pemikir kebijakan luar negeri terkemuka Amerika memperkirakan penurunan Amerika dua dekade lalu, tetapi menggambarkannya sebagai relatif daripada absolut. Pada tahun 1997, pada puncak kekuasaan Amerika, Zbigniew Brzezinski meramalkan kehancuran Amerika yang tak terhindarkan. Dia menulis di surat kabat *The Guardian*, “begitu kepemimpinan Amerika mulai memudar ... apa yang akan Amerika wariskan kepada dunia ...”^[52] Haass menulis di Jurnal *Foreign Affairs* pada tahun 1999, yang meramalkan bahwa “superioritas AS pasti tidak akan bertahan” sebagai “posisi dan kebijakan Amerika, yang didasarkan pada memakan orang lain”.^[53]

Tidak ada keraguan bahwa sebelum Covid-19 polarisasi sistem politik Amerika dan lemahnya kekuatan nasionalnya—khususnya kekuatan ekonomi dan militer—berkontribusi pada kemunduran negara terkemuka dunia. Memburuknya hubungan Amerika dengan Eropa, dan dorongan balik dari Rusia dan China membuat keunggulan Amerika semakin surut. Selain itu, Amerika yang melemah juga menyiratkan Barat yang melemah. Penanganan virus corona yang buruk di Barat telah sangat merusak kepercayaan pada kepemimpinan Amerika dan Eropa. Nasionalisme vaksin telah memberikan stigma buruk lainnya pada kompetensi Barat untuk memimpin. Hal ini sangat kontras dengan diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Rusia dan China untuk meningkatkan citra mereka di antara negara-negara miskin di dunia.

Peluang Kaum Muslim

Dengan keluarnya dunia dari epidemi, sangat jelas bahwa hegemoni Barat atas dunia tidak akan pernah tetap sama (Lihat: QS al-A'raf [7]: 34).

Di sinilah letak peluang bagi negara-negara Islam untuk membebaskan diri dari dominasi Barat [Adnan Khan. Sumber: *hizb-ut-tahrir.info*, 26/05/2021].



JEJAK KHILAFAH DI TATAR SUNDA:

Abdurrahman Al-Khaddami dan Wirahadi Geusan Ulin

(Tim Penulis Naskah Film Jejak Khilafah di Tatar Sunda)

Islam sudah masuk ke Tatar Sunda sebelum abad ke-15 M melalui jalur perdagangan laut yang masyhur, yang menjadi penghubung antara Timur Tengah, India dan Cina. Terdapat beberapa tokoh Ulama dan Dai yang menjadi para perintis dakwah Islam di Tatar Sunda sebelum era Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati, yaitu (1) Raden Bratelegawa atau Haji Purwa dari Galuh (Ciamis), (2) Syaikh Hasanuddin atau Syekh Quro yang mukim di Karawang, dan (3) Syaikh Dzatul Kahfi atau Syekh Nur Jati di Cirebon. Dari namanya diketahui bahwa Haji Purwa adalah pribumi Tatar Sunda dan kedua Syaikh adalah pendatang dari luar Tatar Sunda.

Haji Purwa mengenal Islam saat dalam perjalanan dagang di Gujarat, India. Kemudian setelah masuk Islam, ia menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sepulang dari Makkah,

ia kembali ke negeri asalnya, Galuh dan berdakwah di sana. Namun, keluarga dan masyarakat negerinya belum menerima Islam meskipun juga tidak memusuhinya. Akhirnya, beliau hijrah untuk melakukan dakwah tidak di daerah asalnya.

Para Sultan di India pada masa tersebut secara umum tunduk pada Khilafah Abbasiyyah di Mesir, termasuk Sultan Gujarat, sedangkan para Syarif di Hijaz (Makkah – Madinah) merupakan pemimpin resmi yang diangkat Khalifah. Demikian pula Aceh, sejak awal hubungannya dengan India, Makkah dan Mesir sangatlah erat. Artinya, proses keislaman Haji Purwa dari Galuh berkaitan dengan negeri-negeri Islam yang berada dalam naungan dan perlindungan Khilafah Abbasiyyah.

Syaikh Quro sampai ke Tatar Sunda bersama rombongan Laksamana Cheng Ho dari Cina masa Dinasti Ming yang singgah di Champa.

Beliau tiba di Tatar Sunda melalui Cirebon dan sempat menjalin hubungan baik dengan Ki Gedeng Tapa. Namun, karena tekanan penguasa Padjadjaran, ia akhirnya hijrah dari Cirebon dan mendirikan pusat dakwah dan pendidikan Islam di Tanjung Pura, Karawang. Pada masa tersebut Cina masih memberikan kelonggaran bagi kaum Muslim, namun dengan banyak syarat yang menyulitkan, terutama keharusan untuk penyesuaian antara Islam dengan budaya Cina. Berbeda dengan masa sebelumnya, saat Dinasti Yuan dari Mongol berkuasa. Mereka tidak ikut campur terhadap urusan internal kaum Muslim bahkan cenderung mendukung. Pada masa tersebut yakni sekitar abad ke-14 M, saudara mereka di bagian Timur, yakni Ilkhanate, Golden Horn maupun Chatagai memilih Islam sebagai agama dan jalan hidup. Pada masa sebelumnya, yakni setelah jatuhnya Baghdad, pemimpin Golden Horn sejak masuk Islam tak ragu untuk mendukung Khilafah Abbasiyyah, memisahkan diri dari Mongol dan bekerjasama dengan Mamluk.

Adapun Syaikh Nur Jati diutus oleh penguasa Baghdad, Irak (Parsi atau Persia) sekitar abad ke-14 atau ke-15 M. Ia berasal dari Malaka, namun pernah mukim di Makkah, lalu rihlah ke Baghdad, selanjutnya hijrah untuk dakwah di Tatar Sunda. Beliau mukim dan mendirikan pusat dakwah dan pendidikan Islam di Amparan Jati, Cirebon. Penguasa Baghdad yang dimaksud ialah Syarif Sulaiman, yang dimungkinkan ialah para Naqib 'Alawiyyin yang masih eksis setelah jatuhnya Baghdad oleh Mongol. Jabatan Naqib adalah pejabat pemerintahan yang diangkat Khilafah Abbasiyyah untuk mengurus para 'Alawiyyin atau 'Abbasiyyin.

Secara praktis, kekuasaan yang diberikan Khalifah dan keutamaan sebagai Ahlul Bait menjadikan mereka menjadi pemimpin yang dimuliakan dan ditaati masyarakat, terutama

Terdapat beberapa tokoh Ulama dan Dai yang menjadi para perintis dakwah Islam di Tatar Sunda sebelum era Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati, yaitu (1) Raden Bratelegawa atau Haji Purwa dari Galuh (Ciamis), (2) Syaikh Hasanuddin atau Syekh Quro yang mukim di Karawang, dan (3) Syaikh Dzatul Kahfi atau Syekh Nur Jati di Cirebon. Dari namanya diketahui bahwa Haji Purwa adalah pribumi Tatar Sunda dan kedua Syaikh adalah pendatang dari luar Tatar Sunda.

saat negara pusat mengalami krisis politik atau serangan militer. Pada masa Khalifah Sulaiman al-Qanuni, para Naqib di Baghdad bahkan masih tetap ada dan memimpin masyarakat, kemudian diangkat sebagai pejabat resmi Khilafah Utsmaniyyah, di antaranya Sayyid Zainuddin al-Kailani al-Qadiri.

Berkaitan dengan struktur Naqib, Imam al-Mawardi menjelaskan sebagai berikut:

الأَنْسَابِ الشَّرِيفَةِ عَنْ وِلَايَةِ مَنْ لَا يُكَافِئُهُمْ فِي النَّسَبِ، وَلَا يُسَاوِيهِمْ فِي الشَّرَفِ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ أَحْبَبِي وَأَمْرُهُ فِيهِمْ أَمْضَى... وَوِلَايَةُ هَذِهِ النَّقَابَةِ تَصْحُحُ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثِ جِهَاتٍ: إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْخَلِيفَةِ الْمُسْتَوَلِي عَلَى كُلِّ الْأُمُورِ. وَإِمَّا مِنْ فَوْضِ الْخَلِيفَةِ إِلَيْهِ تَدْبِيرَ الْأُمُورِ؛ كَوَزِيرِ التَّفْوِضِ وَأَمِيرِ الْإِقْلِيمِ. وَإِمَّا مِنْ نَقِيبِ عَامِ الْوِلَايَةِ اسْتَخْلَفَ نَقِيبًا خَاصَّ الْوِلَايَةِ، فَإِذَا أَرَادَ الْمَوْلَى أَنْ

يُؤَلَّى عَلَى الطَّالِبِينَ نَقِيْبًا أَوْ عَلَى الْعَبَّاسِيِّنَ نَقِيْبًا
يُخَيَّرُ مِنْهُمْ أَجْلُهُمْ بَيْتًا وَأَكْثَرُهُمْ فَضْلًا وَأَجْرُهُمْ رَأْيًا
فَيُؤَلَّى عَلَيْهِمْ؛ لِتَجْتَمِعَ فِيهِ شُرُوطُ الرِّيَاسَةِ
وَالسِّيَاسَةِ، فَيُسْرِعُوا إِلَى طَاعَتِهِ بِرِيَاسَتِهِ، وَتَسْتَقِيمَ
أُمُورُهُمْ بِسِيَاسَتِهِ. وَالتَّقَابَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
حَاصَّةٌ وَعَامَّةٌ، فَأَمَّا الْحَاصَّةُ فَهُوَ أَنْ يُقْتَصَرَ بِنَظَرِهِ
عَلَى مُجَرَّدِ التَّقَابَةِ مِنْ غَيْرِ تَجَاوُزٍ لَهَا إِلَى حُكْمٍ
وَإِقَامَةٍ حَدِّ...

Bagian kedelapan tentang Wilayah an-Niqabah atas nasab mulia. Niqabah ini merupakan jabatan untuk menjaga nasab mulia dari wilayah pihak yang tidak se-kufu dengan mereka dalam hal nasab dan tidak menyamainya dalam kemuliaan supaya ada atas mereka kecintaan dan perintahnya terhadap mereka terlaksana ... Wilayah Niqabah ini sah dengan 3 (tiga) cara, (1) dari pihak Khalifah yang menguasai atas segala urusan, (2) dari pihak orang yang diserahkan kepadanya urusan oleh Khalifah semisal Wazir dan Amir di daerah dan (3) dari pihak Naqib yang umum wilayahnya, dia menunjuk Naqib yang khusus wilayahnya. Apabila seorang Maula menyerahkan wilayah atas Thalibiyin seorang Naqib atau atas Abbasiyyin seorang Naqib hendaknya dipilih yang terbaik dari mereka, paling mulia keluarganya, paling banyak keutamaannya dan paling tepat pendapatnya lalu menjadi Wali atas mereka, supaya terkumpul padanya syarat – syarat kepemimpinan dan politik maka mereka bersegera untuk taat pada kepemimpinan dia dan menjadi lurus urusan mereka dengan politiknya. Niqabah ada 2 (dua) jenis, yakni khusus dan umum. Adapun jenis khusus maka dia terbatas dengan pandangannya atas sekedar Niqabah

Oleh karena itu, dakwah Islam sampai ke Tatar Sunda setelah Khilafah Abbasiyyah berpindah ibukota dari Baghdad, Irak ke Kairo, Mesir. Artinya, sejarah Islam di Tatar Sunda pada masa awal terkait erat dengan perkembangan Dunia Islam sejak masa al-Khulafa al-Rasyidin di Madinah, lalu Kufah; Khilafah Umayyah di Damaskus, Syam; dan Khilafah Abbasiyyah di Baghdad Irak, lalu Kairo, Mesir.

yang bukan berkaitan dengan pemerintahan dan penegakan hadd (sanksi pidana) ...¹

Oleh karena itu, dakwah Islam sampai ke Tatar Sunda setelah Khilafah Abbasiyyah berpindah ibukota dari Baghdad, Irak ke Kairo, Mesir. Artinya, sejarah Islam di Tatar Sunda pada masa awal terkait erat dengan perkembangan Dunia Islam sejak masa al-Khulafa al-Rasyidin di Madinah, lalu Kufah; Khilafah Umayyah di Damaskus, Syam; dan Khilafah Abbasiyyah di Baghdad Irak, lalu Kairo, Mesir. Dengan demikian, terdapat pengaruh langsung secara kultural dari Kesultanan Salajiqah (Seljuk), Kesultanan Ayyubiyyah, Kesultanan Mamalikah (Mamluk), para Sultan India dan dakwah Islam di kalangan Tatar – Mongol terhadap rintisan dakwah Islam di Tatar Sunda. [Bagian Kedua-Bersambung]

Catatan Kaki

¹ al-Mawardi, al-Ahkam ash-Shultaniyyah



Komite Persatuan dan Kemajuan memastikan proklamasi restorasi Monarki Konstitusional dan menjadi fokus kehidupan politik, tetapi partai tidak memiliki persiapan apa pun untuk administrasi negara. Beberapa orang berusaha untuk memberikan kepentingan pribadi mereka dengan bersembunyi di balik tirai kebebasan dan konstitusionalisme. Kestabilan dan ketertiban yang diinginkan tidak dapat dibangun di negara ini, karena mereka yang berkuasa harus bekerja sama dengan mereka. Kaum Unionis, yang bertindak dengan pola pikir sektarianisme, memaksa mereka yang tidak setuju untuk mengundurkan diri dan menggantikan mereka dengan orang-orang mereka sendiri, dan administrasi negara jatuh ke tangan orang-orang bodoh dan tidak berpengalaman. Sultan Reşad yang berusaha memerintah dalam kerangka konstitusi berusaha memenuhi usul - usul kekuasaan yang berdasarkan konstitusi atau yang seolah-olah berdasarkan konstitusi, sejalan dengan usulan mereka.

Setelah dimulainya kembali kekacauan di Balkan, Unionis membawa sultan dalam tur ke Rumelia dengan harapan dapat menenangkan orang-orang di wilayah tersebut dan mengintegrasikan



kembali mereka ke dalam negara. Perjalanan laut antara Istanbul dan Tesalonika dilakukan dengan kapal perang Barbaros dan Mesudiye serta kapal Gülcemal. Sultan Reşad memulai perjalanannya ke Rumelia pada tanggal 5 Juni 1911, berangkat daridermaga Dolmabahçe.



Praktik-praktik Unionis, yang tidak sesuai dengan realitas negara dan dunia, menyebabkan pemberontakan di banyak bagian negara, dari Albania hingga Yaman. Penindasan

kekerasan terhadap pemberontakan Albania semakin meningkatkan kerusuhan. Sejak negara-negara Balkan mendirikan gereja nasional mereka dan meninggalkan gereja Yunani-Ortodoks, masalah kepemilikan gereja dan sekolah di Rumeli terus berlanjut. Mereka mencoba memecahkan masalah ini, yang digunakan Sultan Abdulhamid II untuk mencegah aliansi negara-negara Balkan melawan Kekhalifahan Ottoman, dengan memberlakukan undang-undang. Patriark Yunani Fener mengunjungi Sultan Reşad dan memintanya untuk tidak menyetujui undang - undang tersebut . Tetapi Sultan Reşad menyetujui undang-undang ini, yang dia yakini akan menghilangkan konflik antara unsur-unsur Kristen. Dengan undang-undang ini , jalan bagi negara-negara Balkan untuk bersatu melawan Kekhalifahan Ottoman dibuka. Hal ini menyebabkan pecahnya Perang Balkan.

Antara 5-26 Juni 1911, Sultan Reşad mengunjungi kota-kota anakkale, Thessaloniki, Skopje, Pristina, Kosovo dan Manastr dengan wazir agung dan beberapa anggota pemerintah. Selama perjalanan ini, Sultan Reşad melakukan kontak tatap muka dengan komunitasSerbia, Bulgaria, Yunani, dan Albania yang merupakan rakyat Ottoman. Sultan Mehmed Reşad



disambut dengan sorak-sorai antusias baik di kota-kota ini maupun di tempat-tempat yang dilaluinya . Dia bertemu dengan semua segmen masyarakat tanpa memandang agama dan kebangsaan , memberikan sumbangan untuk amal dan membagikan hadiah dari koin yang dicetak untuk mengenang perjalanan ini. Selama tiga minggu , Sultan Reşad melakukan salam Jumat pertama di Masjid Ayastefanos di Thessaloniki, yang kedua di Sahara Kosovo, dan yang ketiga di Masjid shakiye di Manastr. Di Kosovo, tempat makam Gazi Sultan Murad I, ia melaksanakan salat Jumat dengan jamaah yang berjumlah seratus ribu orang.



Perjalanan ke Balkan yang dilakukan oleh Sultan Mehmed Reşad membawa dampak positif bagi berbagai elemen dan khususnya bagi masyarakat Albania. Dengan perjalanan ini, bertujuan untuk mencegah konflik antara negara-negara Balkan dan untuk memberikan pesan politik kepada negara-negara imperialis yang memprovokasi negaranegara tersebut untuk merdeka.

Salah satu detail luar biasa dari perjalanan Balkan adalah bagian Thessaloniki dari perjalanan kunjungan ke Sultan Abdulhamid II.

Sementara para pengunjung menunggu Sultan Abdulhamid II untuk menerima mereka di sebuah ruangan, dia menyapa tamunya yang berdiri di luar mansion. Menurut Halid Ziya, Abdulhamid tidak melanggar istana dan aturan dinasti, dan bertindak seperti ini untuk menghormati sultan di atas takhta. Menurut berita dari Badan Ottoman, Sultan Reşad adalah ragu-ragu untuk mengunjungi Thessaloniki karena ia takut mengganggu saudaranya. Akibat keragu-raguan tersebut, ia memutuskan untuk berkunjung karena kemaslahatan bangsa dan kepentingan negara diutamakan. Dalam kunjungan ini, Sultan Reşad meminta agar kata-kata berikut disampaikan kepada Abdülhamid: "Kamu akan pergi ke saudaraku, tetapi ketika kamu berbicara tentang aku, kamu tidak akan mengatakan 'Yang Mulia'; kamu akan mengatakan 'saudaramu.'"



Sultan Abdulhamid II, setelah menyambut para pengunjung di Istana Selatini, mendengarkan pemberitahuan yang dibuat atas nama Sultan Reşad dan menanggapi dengan baik.



Disebutkan bahwa Sultan Abdulhamid II menjaga sopan santun terhadap para tamu. Dalam percakapan antara keluarga, putrinya Ayşe Osmanoğlu mengatakan dalam memoarnya bahwa dia tidak berpikir seperti itu tentang kunjungan ini.